

Dr. H. Muhamad Rakhmat., SH., MH.



Etika Profesi

Etika Dasar Setiap
Profesi Kehidupan
dalam Perspektif
Hukum Positif

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si.

Etika Profesi
Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan
dalam Perspektif Hukum Positif

Dr. H. Muhamad Rakhmat, SH., MH.

Copyright © 2013

All right reserved

Editor: Muhamad Haerun, SH., MH.
Friska Bara Nurrahmat, SH.

Desain Sampul: Tim Kreatif Penerbit
Perwajahan dan tataletak: Tim Kreatif Penerbit

Diterbitkan oleh
LoGoz Publishing

Office Residence:
Soreang Indah V-20 Bandung 40911
Telp/Fax : 022-85874472
e-mail: logoz_publishing@hotmail.com

Cetakan Kesatu, Juli 2013

ISBN 978-602-9272-07-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Pengantar Menuju Gerbang Etika	vii
Kata Pengantar Penulis	xix
Kata Pengantar: Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si.	xxiii

BAB SATU

MEMPELAJARI ETIKA SEBAGAI SEBUAH ILMU TERAPAN	1
A. Pengertian dan Istilah Etika	1
1. Etika, Etiket, moral dan Moralitas	1
2. Etika Sebagai Cabang Filsafat Ilmu	26
3. Pendefinisian Etika Profesi	34
4. Sejarah Etika	37
5. Sejarah Akhlak Sebagai Sebuah Ilmu Etika.	44
6. Objek dan Kajian Etika	49
a. Objek Etika Umum	50
b. Nilai, Norma Sebagai Objek Etika	53
B. Teori Etika	59
1. Teori Idealisme-Etis	59
2. Teori Dentologi Etis	63
3. Teori Teologisme Etis	66

BAB DUA

MENGENAL TOKOH ETIKA PROFESI	69
A. Tokoh Etika Dalam Alam Pemikiran Yunani Kuno.	69
1. Menapak Tilas Sejarah Perkembangan Pemikiran Yunani Kuno: Dari Mitos ke Logos.	69
2. Jaman Patristik dan Skolastik: Filsafat Dalam dan Untuk Agama.	72
3. Memahami Ajaran Etika Socrates.	74
a. Sejarah Kelahiran Socrates.	74
b. Memahami Ajaran Etika Socrates.	76
c. Intisari Pemikiran Etika Socrates	79
4. Pelajaran Etika Menurut Plato	81
a. Menapak Tilas Kelahiran Plato	81
b. Epistemologi Dasar Pemikiran Filsuf Plato.	85
c. Negara Ideal Menurut Plato.	88
d. Ajaran (Ilmu) Etika Menurut Plato.	95
5. Aristoteles	98
a. Sejarah Kelahiran Filsuf Aristoteles	98
b. Pemikiran Etika Aristoteles	99
c. Kebahagiaan sebagai tujuan	100
d. Kebahagiaan menurut isinya.	101
e. Ajaran tentang keutamaan	103
B. Tokoh Etika Barat	105
1. Thomas Aquinas	105
2. Immanuel Kant	108
C. Konsep Etika Menurut Para Filosof Muslim	112
1. Antara Etika dengan Etika Islam.	112
2. Al-Kindi	113
3. Al-Razi	115
4. Al-Farabi	116
5. Ikhwan al-Safa	117
6. Ibnu Maskawaih	118

7. Al-Ghozali	120
8. Ibnu Bajjah	121
9. Ibnu Thufail	122
10. Ibnu Rusyd	123
11. Nashiruddin At-Thusi	123
12. Mulla Shadra	125
13. Iqbal	125

BAB TIGA

MELINTASI ETIKA PROFESI KEHIDUPAN

DENGAN PISAU ANALITIS ETIKA KEILMUAN	129
A. Prospek Etika Keilmuan Untuk Etika Profesi.	129
1. Berkenalan Dengan Etika Keilmuan.	129
2. Problema Etika Ilmu Pengetahuan.	132
3. Pendekatan Ontologis dalam Keilmuan.	134
4. Pendekatan Epistemologi dalam Keilmuan.	135
5. Pendekatan Aksiologi dalam Keilmuan.	136
6. Sikap Ilmiah yang harus Dimiliki Ilmuwan.	137
B. Etika Profesi Kehidupan Manusia	140
1. Antara Manusia Dan Kebutuhannya	140
2. Istilah-Istilah Dasar Profesi	143
a. Pekerjaan, Profesi Dan Profesional	143
b. Istilah Profesi dan Profesional	145
c. Hubungan antara profesi pada umumnya dan profesi luhur	150
3. Syarat Sebuah Profesi Kehidupan	153
4. Prinsip Dasar Etika Profesi	155
5. Manfaat Mempelajari Etika Profesi	156
6. Organisasi Penindakan dan Pengawasan Etika Profesi ...	159
7. Bentuk Organisasi Etika Profesi.	165
C. Berbagai Macam Profesi Yang Terpenting.	170
1. Etika Hukum Profesi Kedokteran.	170

a.	Menyoal Etika Profesi Kedokteran.	170
b.	Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien.	172
c.	Hubungan Hukum Kontraktual.	176
d.	<i>Informed Consent</i>	178
e.	Etika (Tanggung Jawab) Hukum Dokter Terhadap Pasien	182
2.	Kode Etik Profesi Bidan.	184
a.	Siapakah Bidan itu?	184
b.	Pelayanan Kebidanan.	185
c.	Penerapan Etika Kebidanan.	186
d.	Penerapan Etika & Moral Dalam Pelayanan Kebidanan.	188
3.	Kode Etika Profesi Pendidik.	193
4.	Profesi Hukum.	197
D.	Menyoal Objektivitas Etika Birokrat.	206
1.	Antara Politisasi Birokrasi dan Pola Hubungan Politik dalam Birokrasi di Indonesia.	206
2.	Konsep Politik dan Birokrasi.	209
3.	Tipe Ideal Birokrasi	211
4.	Pejabat Politik dan Pejabat Birokrasi	212
5.	Konteks Historis Politik-Birokrasi di Indonesia.	213
a.	Periode Prakolonial (Kerajaan).	214
b.	Periode Kolonial.	216
c.	Periode Pascakolonial (Penjajahan)	219
1.1	Era Orde Lama.	219
1.2	Era Orde Baru.	222
6.	Politisasi Birokrasi: Sebuah Fenomena Mutakhir	224
a.	Era Transisi, Gusdur dan Megawati	224
b.	Politisasi pada Pemerintahan SBY-JK	226
1.1	Analisis Komposisi dan Koalisi di Parlemen serta Isu-isu Kontemporer.	227

1.2 Analisis Komposisi Kabinet Indonesia Bersatu.	230
1.3 Analisis Hubungan Golkar, Jusuf Kalla dan Pemerintah.	235
E. Etika Pelayanan Kesehatan.	237
1. Mengenal Sistem Pelayanan Kesehatan.	237
2. Etika Pelayanan Kesehatan di Indonesia.	238
3. Etika Hukum Kesehatan.	240
F. Fenomena Etika Pejabat Publik: Sebuah Sorotan	243
1. Ada Apa dengan Aceng HM Fikri.	243
2. Mempertanyakan Etika PNS (Pegawai Negeri Sipil).	244

BAB EMPAT

MERANCANG MODEL PELAYANAN PUBLIK

UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH: PISAU ANALISIS

ETIKA ADMINISTRASI NEGARA	257
A. Eksistensi Desentralisasi di Indonesia.	257
1. Dari Desentralisasi Menuai Pelayanan Publik.	257
2. Mereformasi Pemerintahan Daerah.	260
3. <i>Reinventing Government Management:</i> Konsep Pelayanan Publik di era Moderen.	262
4. Rekonstruksi Paradigma Pelayanan Publik.	264
B. Mengungkap Lemahnya Etika Pelayanan Publik.	267

BAB LIMA

CATATAN PENUTUP;

MENUJU ETIKA HUKUM DENGAN PENEGAKKAN

HUKUM BERKARAKTER <i>GOOD GOVERNANCE</i>	277
A. Wacana Penegakan Hukum.	277
1. Substansi Hukum (<i>legal substance</i>).	282
2. Struktur Hukum (<i>legal structure</i>)	285
3. Budaya Hukum. (<i>legal culture</i>)	288
B. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.	291

C. Pengaruh Penegakkan Hukum terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	294
DAFTAR PUSTAKA	301
TENTANG PENULIS	309

Bab Satu

Mempelajari Etika

Sebagai Sebuah Ilmu Terapan

A. Pengertian dan Istilah Etika.

1. Etika, Etiket, moral dan Moralitas.

Istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa *etika* adalah semacam *penelaahan*, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri. Pendapat lain menyebutkan bahwa *etika* adalah *kajian moralitas*. Sedangkan moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penalaran yang baik, dan dengan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan tentang moral yang benar dan salah, dan moral yang baik dan jahat.

Etika dari segi etimologi (ilmu asal usul kata), berasal dari bahasa yunani, *ethos* (*ta etha*)¹ arti utamanya adalah kebiasaan, yang berarti

1 Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Pengertian ini penulis kutip dari K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama:

juga watak kesusilaan atau adat (*custom*).² Turunan dari kata *ethos*, Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*ethikos*" yang berarti "*timbul dari kebiasaan*" adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya etika membahas tentang tingkah laku manusia. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu "*Mos*" dan dalam bentuk jamaknya "*Mores*", yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Maka secara etimologis, apa yang dinamakan dengan etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup baik dan hidup yang buruk.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. **St. John of Damascus** (abad

Jakarta, 1994, hlm: 4-6. Sementara itu dalam bahasa Inggris etika adalah berasal dari kata *Ethics*, yang artinya sistem prinsip moral bagi perilaku manusia. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa etika merupakan ilmu atau konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar dan buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari kontrol diri karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

- 2 Dalam hal ini, yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang tentunya melekat pada kodrat manusia, seperti kebiasaan berbuat dan berkata jujur, menghormati orang tua, menghargai hidup dan kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain.

ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (*practical philosophy*). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenai dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Pengertian harfiah dari etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah di institusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana lainnya sebuah kebiasaan. Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai.

Penulis berpendapat bahwa etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai;

1. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia;
2. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima;

Etika sebagai sebuah ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional,

1. Mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret terutama yang dihadapi seseorang, atau etika mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan karena itu dikutuk atau justru sebaliknya
2. Apakah dalam situasi konkret yang saya hadapi saya memang harus bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakatku ataukah justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya yang bahkan melawan nilai dan norma moral tertentu.

Etika sebagai ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Dengan menggunakan bahasa **Nietzsche**, etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba. Dalam bahasa **Kant**, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat di pertanggungjawabkan.

Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang

baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

1. **O.P. Simorangkir;** Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. **Sidi Gajalba;** Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal;
3. **Burhanudin Salam;** Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang *praxis* (tindakan) manusia.³ Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su); Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

3 Berbicara tentang etika sebagai cabang filsafat ilmu pengetahuan, maka etika dapat disebut sebagai "*Philosophical study of morality*", dari pernyataan tersebut maka yang dapat melakukan etika adalah manusia, bukan makhluk ciptaan Tuhan selain manusia, hanya manusia sajalah yang melakukan dan dapat beretika, sehingga tidaklah salah apabila etika ditempatkan sebagai sub cabang dari filsafat manusia (antropologi). Lihat dalam: **Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir**, PT. Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm: 18-19. Penulis berpendapat bahwa Etika termasuk ilmu pengetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang salah satunya berarti juga sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, di mana mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Dari segala ini diselidiki oleh Etika, suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk.

Terkait dengan istilah etika, sebagian dari pengguna istilah sering menggunakan juga istilah *etiket*.⁴ Misalnya, jika seorang mahasiswa menghadap dosennya dengan mengenakan sandal jepit, mungkin akan muncul sebuah komentar “*bahwa mahasiswa tersebut tidak beretika*”, hal ini sudah menjadi hal yang umum, namun salah dalam penerapannya, sebenarnya mahasiswa tersebut tidak beretiket.⁵ Pengertian etiket menunjukkan cara suatu perbuatan dilakukan yang diharapkan atau ditentukan dalam suatu kalangan masyarakat, sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket berlaku apabila ada saksi mata atau orang lain yang hadir, sedangkan etika selalu berlaku entah ada orang lain maupun tidak ada. Etiket bersifat relatif, yang dianggap sopan dalam satu kebudayaan bisa dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan lain, sedangkan etika lebih absolut, etika tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, perbuatannya bisa saja baik, tapi ternyata adalah seorang penipu, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam, orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh baik.

Antara etika dengan etiket sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif. Yakni, memberikan norma kepada tingkah laku

4 Etiket merupakan padanan dari kata “*etiquette*” yang artinya aturan-aturan kesopanan atau tata krama bagi perilaku manusia dalam pergaulan bermasyarakat atau diantara anggota-anggota suatu profesi. Etiket berkenaan dengan cara bersopan santun dalam pergaulan. Lihat dalam: A. S. Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University: London, 1995, hlm: 393.

5 Pengertian etiket dalam hal ini merupakan sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Tentunya apa yang dinamakan dengan sopan dalam situasi atau oleh suatu budaya, akan berbeda menurut situasi atau budaya yang lain. Selanjutnya dapat diperiksa dalam: Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm: 16-17. Menanggapi hal ini, penulis berpendapat bahwa: Etiket adalah perilaku kita sehari-hari yang kita lakukan dan memandang orang yang ada di sekeliling kita apakah tersinggung atau tidaknya orang dengan perbuatan kita, dan orang yang ber etiket mungkin saja dia bisa membohongi dirinya sendiri karena perbuatannya itu hanya untuk menghargai orang yang ada di sekelilingnya saja tidak murni keluar dari hati nuraninya yang secara tidak langsung dilakukan untuk mendapatkan pujian dari sekelilingnya.

manusia sehingga dapat menentukan mana yang baik dengan mana yang tidak baik (buruk), apa yang harus dilakukan dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian perbedaan mendasarnya adalah terletak pada cara melakukan suatu perbuatan, tetapi juga memberi norma tentang perbuatan tersebut, berikut adalah penjelasan tentang perbedaan antara etika dengan etiket:⁶

“Dalam mempelajari etika, tentunya akan terkait dengan persoalan-persoalan masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sehingga etika selalu berlaku di mana dan kapan saja, entah ada atau tidak ada orang lain sebagai saksi mata. Maka dalam hal ini, prinsip etika adalah suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara itu etiket, menyangkut tentang cara bagaimana suatu perbuatan. Pada umumnya cara tersebut merupakan cara yang tepat dan diharapkan, serta ditunjuk bagi suatu kalangan tertentu”.

Persamaan antara etika dan etiket adalah pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah-istilah ini hanya dipakai mengenai manusia. Hewan tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.⁷

Perbedaan sangat penting antara etika dan etiket menurut Bertens⁸ ada empat macam, yaitu:

1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Diantara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan meng-

6 E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Stora Grafika: Jakarta, 2001, hlm: 3-5.

7 K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia: Jakarta, 1993, hlm: 9-13.

8 K. Bertens, *Etika*, Ibid: 9.

gunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket, bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Tetapi etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan; etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan ya atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak pernah diperbolehkan. 'Jangan mencuri' merupakan suatu norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri disini sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak terbatas pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.

2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket, bila kita makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, dan sebagainya. Sebaliknya, etika selalu berlaku, juga kalau tidak ada saksi mata. Etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak.
3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh yang jelas adalah makan dengan tangan, di suatu daerah tertentu mungkin masih dianggap sopan, namun di Jawa makan yang sopan harus pakai sendok. Lain halnya etika, etika jauh lebih absolut. 'Jangan mencuri', 'jangan bohong', 'jangan membunuh' merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi 'dispensasi'.
4. Jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja, sedang etika menyangkut manusia dari segi dalam.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat empat perbedaan antara etika dan etiket, secara umum sebagai berikut:

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah menetapkan cara, untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan;
2. Etika adalah nurani (bathiniyah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas (lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan;
3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi. Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya;
4. Etika berlakunya, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku, jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku.

Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan. Secara metodologi, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu melihat perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk.

Etika dapat dibagi menjadi *etika deskriptif* dan *etika normatif*. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Contohnya sejarah etika. Sedangkan etika normatif sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati dan sebagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan dari pada prinsip-prinsip umum, seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan dan sebagainya.

Pembagian etika yang lain adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu. Misalnya tujuan hidup manusia. Etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya; baik/buruk dalam keluarga, masyarakat, negara.⁹

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama yakni: *meta-etika* (studi konsep etika), *etika normatif* (studi penentuan nilai etika), dan *etika terapan* (studi penggunaan nilai-nilai etika) atau ada juga yang menyebut dengan etika deskriptif.¹⁰ Berikut akan penulis jelaskan perbedaan macam dari etika tersebut

1. **Etika Deskriptif:** *Etika ini melukiskan adat istiadat, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, moralitas dalam arti luas, pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya.*

9 Sunoto, *Bunga Rampai Filsafat*, Yayasan Pembinaan Fak. Filsafat UGM: Yogyakarta, 1982, hlm: 1-5.

10 Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Ibid: 8-9.

Pendekatan ini bersifat netral, tidak mengemukakan penilaian moral. Sekarang ini etika deskriptif dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial: antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah. Studi tentang perkembangan kesadaran moral yang dilakukan oleh **Jean Pieget** (1896-1980) dan **Lawrence Kohlberg** (1927-1988);

2. **Etika Normatif:** Etika ini bersifat preskriptif (memerintahkan), tidak melukiskan secara netral, melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Lewat argumentasi-argumentasi, berdasar alasan-alasan yang kuat, prinsip-prinsip etis dirumuskan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Etika normatif dapat dibedakan dalam etika umum dan etika khusus yang juga dinamakan etika terapan;
3. **Metaetika:** Awalan meta-(Yun) mempunyai arti “melebihi”. Istilah ini menunjukan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, melainkan bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan atau pertanyaan etis. Disini, seperti pada etika deskriptif, peneliti bersikap netral terhadap setiap posisi moral. Keterkaitan dengan filsafat analitis, salah satu pelopornya **George Moore** (1873-1958), yang menganggap analisis bahasa merupakan tugas terpenting bagi filsafat, membuat metaetika disebut juga etika analitis. Jika kita berbicara tentang bahasa moral, dengan mudah sekali pembicaraan kita beralih ke apa yang ditunjukan oleh bahasa itu, yaitu perilaku moral itu sendiri. Karena itu sulit ditarik garis batas yang tajam antara etika normatif dan metaetika.
4. Metaetika dan etika deskriptif merupakan pendekatan non-normatif. Etika deskriptif sendiri merupakan pendekatan non-filosofis. Sedangkan pendekatan filosofis terdiri dari etika normatif dan metaetika.

Franz Magnis Suseno¹¹ Menggambarkan tiga pendekatan etika tersebut dalam sebuah ragaan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Model Pendekatan etika Frans Magnis Suseno & K Bertens

Meta-etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam meta-etika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Sebagai contoh, “Seorang anak menendang bola hingga kaca jendela pecah.” Secara meta-etis, baik-buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah suatu kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain, karena memang dunianya (dunia anak-anak) salah satunya adalah bermain, apalagi ia tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi kalau dilihat dari pihak pemilik jendela, tentu ia akan mendefinisikan hal ini sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan. Bagaimanapun juga hal-hal seperti ini tidak akan pernah menemui kejelasannya hingga salah satu pihak

¹¹ **Franz Magnis Suseno**, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK GRamedia: Jakarta, 1991, hlm: 75; Lihat pula dalam: **Shidarta**, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Ibid: 8.

terpaksa kalah atau mungkin masalah menjadi berlarut-larut. Mungkin juga kedua pihak dapat saling memberi maklum. Menyikapi persoalan-persoalan yang semacam inilah, maka meta-etika dijadikan bekal awal dalam mempertimbangkan suatu masalah, sebelum penetapan hasil pertimbangan dibuat.

Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Dalam perbincangan dan diskusi-diskusi yang acapkali ditampilkan dan diungkapkan di media masa baik cetak, elektronik maupun virtual, kajian etika normatif yang berkaitan dengan masalah moral merupakan topik bahasan yang paling menarik.

Etika terapan merupakan kepedulian terhadap etika yang lebih mendalam dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik. Etika terapan (*applied ethics*) sama sekali bukan hal yang baru dalam sejarah filsafat moral. Sejak **Plato** dan **Aristoteles**, etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperlihatkan apa yang harus dilakukan. Sifat praktis ini bertahan selama seluruh sejarah filsafat. Dalam abad pertengahan, **Thomas Aquinas** melanjutkan tradisi filsafat praktis ini dan menerapkannya di bidang teologi moral. Pada awal zaman modern muncul etika khusus (*ethica specialis*) yang membahas masalah etis suatu bidang tertentu seperti keluarga dan negara. Namun pada dasarnya etika khusus dalam arti sebenarnya sama dengan etika terapan.

Adapun jenis-jenis Etika adalah sebagai berikut:

1. **Etika Filosofis:** Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah

bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat. Ada dua sifat etika, yaitu:

- a. Non-empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
 - b. Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif, dimana etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dsb, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya.
2. **Etika Teologis:** Terdapat dua hal-hal yang berkait dengan etika teologis. Pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena itu banyak unsur-unsur di dalamnya yang terdapat dalam etika secara umum, dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum. Secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi-presuposisi teologis. Definisi tersebut menjadi kriteria pembeda antara etika filosofis dan etika teologis. Setiap agama dapat

memiliki etika teologisnya yang unik berdasarkan apa yang diyakini dan menjadi sistem nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, antara agama yang satu dengan yang lain dapat memiliki perbedaan di dalam merumuskan etika teologisnya.

Etika dalam perkembangannya dapat juga disebut sebagai moral, istilah moral dalam hal ini berasal dari bahasa latin yakni *mores* kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Moral (Bahasa Latin *Moralitas*) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif.

Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, peraturan-peraturan apakah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak seperti kitab *Wulangreh* karangan **Sri Sunan Pakubuwono IV**.

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada ditingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang karena etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu.¹²

Etika pada hakekatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkatkan kerancuan (kekacauan). Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawaban.

Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral. Sedangkan kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.¹²

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama.

Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial

12 Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Kanisius: Yogyakarta, 1987, hlm: 14-17.

13 Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Ibid: 18-23.

kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Moral sebenarnya tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya, setempat yang diyakini kebenarannya. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Hal tersebut akan lebih mudah kita pahami manakala mendengar orang mengatakan perbuatannya tidak bermoral. Perkataan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Franz Magnis Suseno¹⁴ membahas, ajaran tentang moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketentuan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Ajaran moral bersumberkan kepada berbagai manusia dalam kedudukan yang berwenang, seperti para bijak, antara lain para pemuka agama dan masyarakat, tulisan-tulisan para bijak.

E. Sumaryono¹⁵ mengklasifikasikan moralitas atas:

1. **Moralitas objektif:** *Moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia sebagaimana apa adanya. Jadi perbuatan itu mungkin baik atau buruk, mungkin benar atau salah terlepas dari berbagai modifikasi kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap pelakunya. Contoh: membunuh merupakan perbuatan tidak baik;*
2. **Moralitas subjektif:** *Moralitas perbuatan yang melihat perbuatan manusia tidak sebagaimana adanya karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor pelakunya, seperti emosional, latar belakang, pengetahuan, dsbnya.*

14 Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Ibid: 90-96.

15 E.Sumaryono, *Etika Hukum*, Kanisius: Jakarta, 2002.

3. **Moralitas intrinsik:** *Moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan atas benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya terlepas tidak bergantung dari pengaruh hukum positif, contohnya berilah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal tersebut pada dasarnya sudah merupakan kewajiban. Meskipun kemudian diatur dalam hukum positif, tidaklah memberikan akibat yang signifikan;*
4. **Moralitas ekstrinsik:** *Moralitas perbuatan yang menentukan suatu perbuatan benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan hakikatnya bergantung dari pengaruh hukum positif. Hukum positif dijadikan patokan dalam menentukan kebolehan dan larangan atas suatu perbuatan.*

EY. Kanter¹⁶ tidak hanya membahas etika pada wilayah individu akan tetapi terdapat pendapatnya, bahwa moralitas individu mendapat ruang gerak dalam wilayah moralitas masyarakat (publik). Moralitas publik adalah moralitas yang terwujud dan didukung oleh wilayah publik, artinya didukung oleh struktur kekuasaan politik, ekonomi dan ideologi. Mutu moralitas publik banyak ditentukan oleh pelaksanaan kepemimpinan dalam suatu negara, misalkan cara pengambilan keputusan dibuat dengan etis ataukah tidak. Etika merefleksikan mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai moralitas.

Sementara itu, **Liliana Tedjosaputro**¹⁷ membagi moralitas kedalam dua bagian yakni:

16 E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Op cit.

17 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum*, Aneka ilmu: Semarang, 2003, hlm: 56. Bandingkan dengan pendapatnya dari **Immanuel Kant**, yang membedakan moralitas dalam dua tingkatan: *pertama*; Moralitas heteronom, sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak sipelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas

1. **Moralitas dapat bersifat intrinsik**, berasal dari diri manusia itu sendiri sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada;
2. **Moralitas yang bersifat ekstrinsik**, penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan.

Pelaksanaan peraturan hukum membutuhkan moral dari pelaku. Hukum meskipun harus mengacu pada kepentingan sosial kemasyarakatan agar tercapai suatu kepastian dan keadilan hukum, namun produk hukum itu sendiri tidak dapat lepas dari produk politik yang tidak dapat mengcover seluruh kehendak masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dengan baik dan ikhlas sesungguhnya bergantung pada moral setiap individu, bukan bergantung pada sifat memaksa dari hukum. Guna memudahkan pengertian tersebut maka dapat diberikan suatu gambaran manakala seseorang tidak melaksanakan suatu peraturan ataupun etika maka orang tersebut merasa sebagai beban moral.

Shidharta¹⁸ mengemukakan, setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral dalam menghadapi keadaan-keadaan yang menyertai perjalanan hidupnya. Sikap moral ini ada yang hadir begitu saja tanpa harus disertai pergulatan atas pilihan-pilihan dilematis, namun ada pula sikap moral yang perlu direnungkan secara mendalam sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan. Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika

kewajiban itu; *Kedua*; Moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Didalam moralitas otonom orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya taupun lantaran takut pada penguasa, melainkan itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan mahluk rasional atau manusia.

18 Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Ibid: 69-dst.

mengambil suatu tindakan. Renungan terhadap moralitas tersebut merupakan pekerjaan etika. Dengan demikian, setiap manusia siapapun dan apapun profesinya membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya. Dalam konteks inilah lalu timbul suatu cabang etika yang disebut etika profesi.

Etika merupakan hasil perenungan dari moralitas yang dirasakan perlu adanya etika dalam kehidupan, karena merupakan kewajiban moral untuk mewujudkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pendapat lain menyatakan moral berasal dari dalam relung hati yang terdalam sehingga perbuatan baik ataupun buruk sebenarnya dirinya sendiri sebagai penilai utama, sedangkan etika merupakan manifestasi dari moral yang berasal dari adat kebiasaan dan sosial kemasyarakatan yang telah berproses menjadi suatu bentuk etika sebagai pedoman bertindak baik ranah formal maupun non formal sehingga sering dikatakan suatu perbuatan baik bila dilaksanakan maka telah beretika serta sebaliknya dikatakan tidak beretika.

Nilai-nilai etika dan moral harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan di bidang keilmuan. Tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar **Charles Darwin**, adalah ketika menyadari bahwa kita seyogyanya mengontrol pikiran kita. Pikiran merupakan faktor penentu dan pemutus suatu tindakan yang akan kita lakukan, pikiran yang baik dapat menghasilkan moral atau etika yang baik sedangkan pikiran yang buruk akan menghasilkan tindakan yang buruk, yang perlu dipahami bahwa segala gerakan organ tubuh merupakan pikiran sebagai pemimpin. Pada kondisi manusia yang telah mampu mempergunakan pikiran sebagai *filter* atau alat kontrol bagi perbuatannya maka hal yang buruk dapat ditiadakan minimal dapat ditekan.

Dalam lingkup global seperti yang kita rasakan saat ini, **Alvin Tofler**¹⁹ memberi gambaran betapa manusia dewasa ini dan dimasa-masa mendatang akan mengalami *indeks kesementaraan*, yang

mengakibatkan manusia terjebak dalam keanekaragaman gaya hidup dan banyak kepribadian. Menurutnya,

“Apabila keanekaragaman bertemu dan berpadu dengan kesementaraan dan kebaruan, masyarakat akan meroket kesuatu krisis adaptasi yang historis. Kita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementara asingnya dan kompleksnya sehingga mengancam jutaan orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejutan masa depan”.

Ajaran-ajaran moral guna meningkatkan moralitas agar manusia menjadi baik, sedangkan etika bertugas memberikan argumentasi rasional dan kritis guna mendukung ajaran moral. Dalam perkembangan jaman yang makin kompleks timbullah tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada. Salah satu dari keragaman itu ditandai oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan diri sebagai pilihan terbaik. Padahal apa yang baik menurut satu pihak sering dianggap buruk oleh yang lainnya. Etika yang telah disepakati oleh setiap kelompok akan menepis kehilangan orientasi sehingga kebenaran sebenarnya bersifat relatif karena kebenaran merupakan produk pikiran masing-masing sehingga perlu adanya kesepakatan yang tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kebenaran universal.

Lilana Tedjosaputro²⁰ memaparkan bahwa, dalam perkembangannya kajian etika, terdapat banyak aliran-aliran di dalamnya. Beberapa aliran penting dalam etika adalah sebagai berikut:

1. Etika naturalisme; ialah aliran yang beranggapan bahwa

19 Alvin Toffler, *Future Shock: Kejutana Masa Depan*, PT. Panjja Simpati: Jakarta, 1990.

20 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum*, Op cit: 106.

kebahagiaan manusia itu didapatkan dengan menuruti panggilan natura (fitrah) kejadian manusia sendiri;

2. **Etika hedonisme;** ialah aliran yang berpendapat bahwa perbuatan susila itu adalah perbuatan yang menimbulkan hedone (kenikmatan dan kelezatan);
3. Etika utilitarianisme ialah aliran yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia itu ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi manusia (utility=manfaat);
4. **Etika idealisme;** ialah aliran yang berpendirian bahwa perbuatan manusia janganlah terikat pada sebab musabab lahir, tetapi haruslah berdasarkan pada prinsip kerohanian (idea) yang lebih tinggi;
5. **Etika vitalisme;** ialah aliran yang menilaibai buruknya perbuatan manusia itu sebagai ukuran ada tidak adanya daya hidup (vital) yang maksimum mengendalikan perbuatan itu;
6. **Etika theologis;** ialah aliran yang berkeyakinan bahwa ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia itu dinilai dengan sesuai dan tidak sesuainya perbuatan itu dengan perintah Tuhan (Theos=Tuhan).

Franz Magnis Suseno²¹ mengemukakan pendapat tentang, etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini perlu dicari dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral. Dalam keseharian kita banyak bertemu dan bergaul dengan berbagai orang dan karakter yang serba berbeda dari suku

21 Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Op cit : 90-96.

yang beragam, daerah asal yang bervariasi, agama berbeda, dan sebagainya. Kita ada ditengah-tengah pandangan mengenai etika dan moral yang beraneka ragam bahkan tidak jarang saling bertentangan sehingga kita bingung mengikuti moralitas yang mana. Untuk menentukan pilihan itulah perlu refleksi kritis etika.

2. Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang kian lama menuju modernisasi. Meski masih belum dijumpai batasan baku tentang makna modernisasi, konsep ini membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menentang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Proses perubahan sosial budaya dan moral ternyata tidak jarang digunakan berbagai pihak untuk memancing di air keruh. Adanya pelbagai ideologi yang ditawarkan sebagai penuntun hidup, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika dapat dijadikan tatanan untuk mengkritisi secara objektif dan memberi penilaian agar tidak mudah terpancing, tidak naif, atau ekstrem untuk cepat-cepat menolak hanya karena masih relatif baru dan belum biasa.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu
5. Refleksi kritis etika tidak hanya untuk menentukan moralitas mana yang dipakai karena terdapat norma yang bertentangan. Refleksi kritis etika merupakan alat untuk memecahkan permasalahan moral, seperti perubahan moral yang diakibatkan oleh proses transformasi menuju modernisasi yang menentang keberadaan pandangan moral tradisional.

Etika yang berkaitan dengan etika profesi merupakan etika yang senantiasa mengikuti perkembangan modernisasi yang tak dapat

dibendung, sehingga perlunya etika yang kritis untuk mengatasi kendala yang ada. Tidak dapat dipungkiri penyandang profesi, pemuka masyarakat/adat, filosof, hukum yang berfungsi sebagai salah satu faktor penentu etika yang kritis. Keadilan, kepastian hukum, equality before the law merupakan harapan moral masyarakat yang masih terus diperjuangkan.

Berdasarkan hasil dari perenungan penulis, etika dapat juga disebut sebagai akhlak, Secara linguistik atau bahasa, akhlak berasal dari bahasa arab yakni *khuluqun* yang menurut loghat diartikan: *budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat*. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalakun* yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan *khaliq* yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Menurut **Al Ghazali** akhlak adalah *sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi*. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu:

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila.
3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas

dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk.

4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara
5. Sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.

Secara garis besar, akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak baik (*akhlak al-karimah*) dan akhlak yang buruk (*akhlak madzmumah*). Yang termasuk akhlak baik misalnya seperti berbuat adil, jujur, sabar, pemaaf, dermawan, amanah, dan lain sebagainya. Sedangkan, yang termasuk akhlak buruk adalah seperti berbuat dhalim, berdusta, pemaaf, pendendam, kikir, curang, dan lain sebagainya. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan *Khaliq* atau dengan sesama makhluk. **Rasulullah saw** bersabda: “*Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah ialah yang paling baik akhlaknya*”.

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk *infinitive*) dari kata *al-akhlaqa*, *yukhliqu*, *ikhlaqan*, sesuai timbangan (*wazan*) *tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *at-thobi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik) dan *al-din* (agama). Namun akar kata akhlak dari *akhlaqa* sebagai mana tersebut diatas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata *akhlaqa* bukan akhlak, tetapi *ikhlaq*. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara *linguistic*, akhlak merupakan

isim jamid atau *isim ghair mustaq*, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya.

2. Etika Sebagai Cabang Filsafat Ilmu.

Filsafat dapat dimaknai sebagai pandangan hidup, tentunya pandangan hidup yang cinta akan kebijaksanaan, disisi lain filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang selalu mencari hakekat yang terdalam. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk nilai atau sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman perilaku oleh individu, kelompok, masyarakat. Pada prinsipnya cabang filsafat dapat dikelompokkan pada tiga cabang filsafat yaitu: *Ontologi*; *Epistemologi*; serta, *Aksiologi*.

Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. *Epistemologi* adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat susunan, metode, dan validitas pengetahuan. *Aksiologi* merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Pada kelompok aksiologi dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat etika dan estetika. Dapat disimpulkan etika merupakan cabang dari filsafat tentang hakikat nilai atau aksiologi yang merupakan nilai berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia atau kelompok manusia. Etika membahas tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia dan nilai inilah dikenal sebagai moral.

Ontologi²² merupakan salah satu kajian kefilosofan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang terkenal diantaranya **Thales, Plato, dan Aristoteles**. Pada dasarnya, kebanyakan orang belum mampu

22 Ontologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *on* atau *ontos*, artinya *being* atau ada, dan *logos* = *logic* atau ilmu. Jadi, ontologi bisa diartikan: "*The theory of being qua being*" (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan), atau Ilmu tentang yang ada.

membedakan antara *penampakan* dengan *kenyataan*. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* yang berbentuk jasmani/kongkret maupun rohani/ abstrak.²³ Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh **Rudolf Goclenius** pada tahun 1636 M untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangan selanjutnya **Christian Wolf** (1679–1754 M) membagi Metafisika menjadi 2 yaitu:²⁴

1. Metafisika Umum, disebut juga sebagai Ontologi merupakan *Metafisika umum* dimaksudkan sebagai istilah lain dari *ontologi*. Jadi *metafisika umum* atau *ontologi* adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada;
2. Metafisika Khusus, dapat berupa *Kosmologi, Psikologi, Teologi*.

Dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran antara lain: *Monoisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, dan Agnotisisme*. Aliran dalam mempelajari ontologi tersebut, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:²⁵

1. **Monoisme:** Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun rohani. Paham ini kemudian terbagi kedalam 2 aliran:
 - a) **Materialisme:** Aliran materialisme ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Bapak Filsafat yaitu **Thales** (624-546 SM). Dia berpendapat bahwa *sumber asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan*. Aliran ini sering juga disebut *naturalisme*. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi/

23 Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.

24 Anton Bakker, *Ontologi Metafisika Umum*. Pustaka Kanisius: Yogyakarta, 1992.

25 Bagus Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

alam, sedangkan jiwa/ruh tidak berdiri sendiri. Tokoh aliran ini adalah **Anaximander** (585-525 SM). Dia berpendapat bahwa *unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan*. Dari segi dimensinya paham ini sering dikaitkan dengan teori Atomisme. Menurutny semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap tak dapat dirusakkan. Bagian-bagian yang terkecil dari itulah yang dinamakan atom-atom. Tokoh aliran ini adalah **Demokritos** (460-370 SM). Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat di hitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam.

- b) **Idealisme**: Idealisme diambil dari kata *idea*, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. *Idelisme* sebagai lawan *materialisme*, dinamakan juga *spiritualisme*. *Idealisme* berarti serba cita, *spiritualisme* berarti serba ruh. Aliran *idealisme* beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Tokoh aliran ini diantaranya: **Plato** (428-348 SM) dengan teori ide-nya. Menurutny, *tiap-tiap yang ada dalam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu*. **Aristoteles** (384-322 SM), memberikan sifat keruhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Pada Filsafat modern pandangan ini mula-mula kelihatan pada **George Barkeley** (1685-1753M) yang menyatakan objek-objek fisis adalah ide-ide. Kemudian **Immanuel Kant** (1724-1804 M), **Fichte** (1762-1814 M), **Hegel** (1770-1831 M), dan **Schelling** (1775-1854 M);

2. **Dualisme:** Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Tokoh paham ini adalah **Descartes** (1596-1650 M) yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran (ruhani) dan dunia ruang (kebendaan). Tokoh yang lain: **Benedictus De spinoza** (1632-1677 M), dan **Gitifried Wilhelm Von Leibniz** (1646-1716 M);
3. **Pluralisme:** Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Tokoh aliran ini pada masa Yunani Kuno adalah **Anaxagoras** dan **Empedocles** yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah **William James** (1842-1910 M) yang terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya *The Meaning of Truth*, **James** mengemukakan bahwa *tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Apa yang kita anggap benar sebelumnya dapat dikoreksi/diubah oleh pengalaman berikutnya;*
4. **Nihilisme:** Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti *nothing* atau tidak ada. Doktrin tentang nihilisme sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, tokohnya yaitu **Gorgias** (483-360 SM) yang memberikan 3 proposisi tentang realitas yaitu: *Pertama*, tidak ada sesuatupun yang eksis, *Kedua*, bila sesuatu itu ada ia tidak dapat diketahui, *Ketiga*, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh modern aliran ini diantaranya: **Ivan Turgenev** (1862 M) dari Rusia dan **Friedrich Nietzsche** (1844-1900 M), ia dilahirkan di Rocken di Prusia dari keluarga pendeta;

5. **Agnosisisme:** Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun ruhani. Kata *Agnosisisme* berasal dari bahasa Greek yaitu *Agnostos* yang berarti *unknown* A artinya *not* Gno artinya *know*. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti: **Soren Kierkegaard** (1813-1855 M), yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat *Eksistensialisme* dan **Martin Heidegger** (1889-1976M) seorang filosof Jerman, serta **Jean Paul Sartre** (1905-1980M), seorang filosof dan sastrawan Prancis yang atheis.

Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat, epistemologi dikenal sebagai sub sistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.

Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti juga lazimnya keterkaitan masing-masing sub sistem dalam suatu sistem—membuktikan betapa sulit untuk menyatakan yang satu lebih penting dari yang lain, sebab ketiga-tiganya memiliki fungsi sendiri-sendiri yang berurutan dalam mekanisme pemikiran. Ketika kita membicarakan epistemologi, berarti kita sedang menekankan bahasan tentang upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Dari sini setidaknya didapatkan perbedaan yang cukup signifikan bahwa aktivitas berpikir dalam lingkup epistemologi adalah aktivitas yang paling mampu mengembangkan kreativitas keilmuan dibanding ontologi dan aksiologi.

Menurut **EY. Kanter**,²⁶ Etika sama artinya dengan filsafat moral atau ilmu tentang moralitas. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan filsafat atau pemikiran rasional-kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Jadi etika bukan sebuah ajaran

26 EY Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Op cit: 8

melainkan sebuah ilmu. Filosof **Plato** mengungkapkan filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang didalamnya mencakup empat persoalan sebagai berikut:

1. Apakah yang dapat kita ketahui? Pertanyaan tersebut dijawab oleh metafisika (ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non fisik atau tidak terlihat).
2. Apakah yang boleh kita kerjakan? Pertanyaan tersebut dijawab oleh etika.
3. sampai dimanakah pengharapan kita? Pertanyaan tersebut dijawab oleh agama.
4. Apakah yang dinamakan manusia? Pertanyaan tersebut dijawab oleh antropologi (ilmu tentang manusia).

Mengamati pemikiran **Plato** maka makin mendukung opini bahwa etika merupakan bagian dari filsafat hal tersebut merupakan jawaban terhadap tujuan utama dari filsafat yang berarti cinta akan kebijaksanaan adalah untuk kebaikan umat manusia yang bijaksana penuh dengan kedamaian. Guna mendukung pendapat **Plato** dapat kita padukan dengan pendapat **Aristoteles** yang dikutip dari **I Gede A.B.Wiranata sebagai**²⁷ berikut:

Pembagian filsafat menurut **Aristoteles**, dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. **Filosofia teoritika/spekulatif:** Filsafat yang bersifat objektif, yang terdiri atas;
 - a) Fisika (mengkaji tentang dunia materiil);
 - b) Matematika (mengkaji tentang barang menurut kuantitasnya);
 - c) Metafisika (mengkaji tentang "ada").
2. **Filosofia praktika** (Filsafat yang memberi petunjuk dan berbagai

27 **I Gede A.B.Wiranata**, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.

pedoman mengenai tingkah laku hidup dan kesusilaan yang seharusnya dilakukan/diperbuat, yang meliputi:

- a) Etika (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup perse-orangan);
- b) Ekonomia (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup kekeluargaan)
- c) Politika (mengkaji tentang kesusilaan dalam tantanan hidup kenegaraan).

Filosofia produktiva (pencipta) (filsafat yang mengkaji dan membimbing serta menuntun manusia tentang pengetahuan sehingga menjadikan manusia produktif melalui sebuah ketrampilan yang bersifat khusus). **Aristoteles** merupakan tokoh filsafat yang menempatkan etika sebagai pembahasan utama dalam tulisannya "*Ethika Nichomachea*" dengan pendapatnya, tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh *egoisme* atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan kepada hal-hal yang *alruistik*, yaitu memperhatikan orang lain.

Menurut **Srisumantri**²⁸ filsafat dalam perkembangannya antara lain mencakup:

1. Epistimologi (filsafat pengetahuan);
2. Etika (filsafat moral);
3. Estetika (filsafat seni);
4. Metafsika;
5. Filsafat politik;
6. Filsafat;
7. Filsafat agama;
8. Filsafat pendidikan;
9. Filsafat hukum;

28 Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan: Jakarta, 2007.

10. Filsafat sejarah;
11. Filsafat matematika.

Sebagai bagian filsafat dan bahkan sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua, maka etika juga dikembangkan sebagai bagian dari kajian ilmu pengetahuan. Filosof **H.De Vos** juga menyatakan etika sebagai bagian dari filsafat. Etika dapat dibedakan menjadi, etika umum dan etika khusus. Etika umum *membahas tentang prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, tanggung jawab, suara hati*. Etika khusus *merupakan etika yang sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, kehidupan pribadi, antar pribadi*.

Penulis mempunyai pandangan bahwa Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Maka dengan demikian, etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sementara itu Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud, bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanaknya, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya. Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian: Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Serta, Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Etika dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besar terdapat tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika yaitu:

1. **Aspek Normatif:** aspek normatif ialah aspek yang mengacu pada norma-norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur profesional. Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala unsur-unsurnya tetap berpijak pada norma, baik norma-norma kehidupan bersama ataupun norma-normamoral yang diatur dalam standar profesi bagi kaum profesi;
2. **Aspek Konseptual:** diarahkan pada penjernihan konsep-konsep/ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Kajian konseptual ini juga untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri;
3. **Aspek Deskriptif:** kajian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Aspek ini memberikan informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi, sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera direalisasikan.

Etika merupakan cabang filsafat sebagai ilmu yang merupakan *philosophical study of morality*, sehingga subyek yang melakukan etika adalah manusia, dengan demikian etika sebagai filsafat manusia.

3. Pendefenisian Etika Profesi.

Belum ada kata sepakat mengenai pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang bisa dikatakan

Bab Dua

Mengenal Tokoh Etika Profesi

A. Tokoh Etika Dalam Alam Pemikiran Yunani Kuno.

1. Menapak Tilas Sejarah Perkembangan Pemikiran Yunani Kuno: Dari Mitos ke Logos.

Secara historis kelahiran dan perkembangan pemikiran Yunani Kuno (sistem berpikir) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelahiran dan perkembangan filsafat, dalam hal ini adalah sejarah filsafat. Dalam tradisi sejarah filsafat mengenal 3 (tiga) tradisi besar sejarah, yakni tradisi: Sejarah Filsafat India (sekitar 2000 SM–dewasa ini); Sejarah Filsafat Cina (sekitar 600 SM–dewasa ini), dan Sejarah Filsafat Barat (sekitar 600 SM–dewasa ini).⁵⁸

Dari ketiga tradisi sejarah tersebut di atas, tradisi Sejarah Filsafat Barat adalah basis kelahiran dan perkembangan ilmu (*scientiae / science / sains*) sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.⁵⁹ Titik-tolak

58 K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta, 1975, hlm: 1-7.

59 Dapat dibaca dalam bukunya: Harun Hadiwijono, *Sejarah Filsafat Barat (1 & 2)*, Kanisius: Yogyakarta, 1980.

dan orientasi sejarah filsafat baik yang diperlihatkan dalam tradisi Sejarah Filsafat India maupun Cina disatu pihak dan Sejarah Filsafat Barat dilain pihak, yakni semenjak periodesasi awal sudah memperlihatkan titik-tolak dan orientasi sejarah yang berbeda. Pada tradisi Sejarah Filsafat India dan Cina, lebih memperlihatkan perhatiannya yang besar pada masalah-masalah keagamaan, moral / etika dan cara-cara / kiat untuk mencapai keselamatan hidup manusia di dunia dan kelak keselamatan sesudah kematian.⁶⁰

Sedangkan pada tradisi Sejarah Filsafat Barat semenjak periodesasi awalnya (Yunani Kuno / Klasik: 600 SM–400SM), para pemikir pada masa itu sudah mulai mempermasalahkan dan mencari unsur induk (*arché*)⁶¹ yang dianggap sebagai asal mula segala sesuatu / semesta alam Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Thales** (sekitar 600 SM) bahwa “air” merupakan *arché*, sedangkan **Anaximander** (sekitar 610–540SM) berpendapat *arché* adalah sesuatu “yang tak terbatas”, **Anaximenes** (sekitar 585–525SM) berpendapat “udara” yang merupakan unsur induk dari segala sesuatu. Nama penting lain pada periode ini adalah **Herakleitos** (± 500SM) dan **Parmenides** (515–440 SM), **Herakleitos** mengemukakan bahwa segala sesuatu itu “mengalir” (*panta rhei*) bahwa segala sesuatu itu berubah terus-menerus / perubahan, sedangkan **Parmenides** menyatakan bahwa segala sesuatu itu justru sebagai sesuatu yang tetap (tidak berubah).⁶²

60 Lihat dalam: **Fung Yu-Lan**, *Short History of Chinese Philosophy*, The Macmillan Company: New York, 1960; Lihat juga terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. *Sejarah Filsafat Cina*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007.

61 Yang hendak dikatakan disini adalah hal upaya mencari unsur induk segala sesuatu (*arche*), itulah momentum awal sejarah yang telah membongkar periode *myte* (*mythos/mitologi*) yang mengungkung pemikiran manusia pada masa itu kearah rasionalitas (*logos*) dengan suatu metode berpikir untuk mencari sebab awal dari segala sesuatu dengan merunut dari hubungan *kausalitasnya* (sebab-akibat).

62 **Gordon Scott**, *The history and philosophy of social science*. New York: Routledge, 1991; lihat pula dalam: **Wedberg Anders**, *A History of Philosophy*. Oxford: Clarendon Press. Volume 1 & 2, 1982. Buku dalam bahasa Indonesia dapat dibaca dalam: **K. Bertens**, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius: Yogyakarta, 1992, hlm: 1-40.

Lain lagi **Pythagoras** (sekitar 500SM) berpendapat bahwa segala sesuatu itu terdiri dari “bilangan-bilangan”: struktur dasar kenyataan itu tidak lain adalah “ritme”, dan **Pythagoras** lah orang pertama yang menyebut / memperkenalkan dirinya sebagai sorang “filsuf”, yakni seseorang yang selalu bersedia / mencinta untuk menggapai kebenaran melalui berpikir / bermenung secara kritis dan radikal (*radix*) secara terus-menerus.⁶³

Dari uraian tersebut, maka dapat penulis katakan bahwa unsur penting berpikir ilmiah sudah mulai dipakai, yakni: rasio dan logika (konsekuensi). Meskipun tentu saja ini *arché* yang dikemukakan para filsuf tadi masih bersifat *spekulatif* dalam arti masih belum dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan pembuktian (*verifikasi*) melalui observasi maupun eksperimen (metode) dalam kenyataan (*empiris*), tetapi prosedur berpikir untuk menemukannya melalui suatu bentuk berpikir sebab-akibat secara rasional itulah yang patut dicatat sebagai suatu arah baru dalam sejarah pemikiran manusia. Hubungan sebab-akibat inilah yang dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai hukum (ilmiah).

Singkatnya, hukum ilmiah atau hubungan sebab-akibat merupakan obyek material utama dari ilmu pengetahuan. Demikian pula kelak dengan tradisi melakukan verifikasi melalui observasi dan eksperimen secara berulang kali dihasilkan teori ilmiah.

Zaman keemasan / puncak dari filsafat Yunani Kuno / Klasik, dicapai pada masa **Sokrates** (\pm 470 – 400 SM), **Plato** (428-348 SM) dan **Aristoteles** (384-322 SM). **Sokrates** sebagai guru dari **Plato** maupun tidak meninggalkan karya tulis satupun dari hasil pemikirannya, tetapi pemikiran-pemikirannya secara tidak langsung banyak dikemukakan dalam tulisan-tulisan para pemikir Yunani lainnya tetapi terutama ditemukan dalam karya muridnya **Plato**. Filsafat **Plato** dikenal sebagai *ideal (isme)* dalam hal ajarannya bahwa kenyataan itu tidak lain adalah

63 K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Ibid: 41-47.

proyeksi atau bayang-bayang / bayangan dari suatu dunia "*ide*" yang abadi belaka dan oleh karena itu yang ada nyata adalah "*ide*" itu sendiri. Filsafat **Plato** juga merupakan jalan tengah dari ajaran **Herakleitos** dan **Parmenides**. Dunia "*ide*" itulah yang tetap tidak berubah / abadi sedangkan kenyataan yang dapat diobservasi sebagai sesuatu yang senantiasa berubah. Karya-Karya lainnya dari **Plato** sangat dalam dan luas meliputi logika, epistemologi, antropologi (metafisika), teologi, etika, estetika, politik, ontologi dan filsafat alam.⁶⁴

Sedangkan **Aristoteles** sebagai murid **Plato**, dalam banyak hal sering tidak setuju / berlawanan dengan apa yang diperoleh dari gurunya (**Plato**). Bagi **Aristoteles** "*ide*" bukanlah terletak dalam dunia "abadi" sebagaimana yang dikemukakan oleh **Plato**, tetapi justru terletak pada kenyataan / benda-benda itu sendiri. Setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi ("*hylé*") dan bentuk ("*morfé*").

Lebih jauh bahkan dikatakan bahwa "*ide*" tidak dapat dilepaskan atau dikatakan tanpa materi, sedangkan presentasi materi mestilah dengan bentuk. Dengan demikian maka bentuk-bentuk "bertindak" di dalam materi, artinya bentuk memberikan kenyataan kepada materi dan sekaligus adalah tujuan (finalis) dari materi. Aristoteles menulis banyak bidang, meliputi logika, etika, politik, metafisika, psikologi dan ilmu alam. Pemikiran-pemikirannya yang sistematis tersebut banyak menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan

2. Jaman Patristik dan Skolastik: Filsafat Dalam dan Untuk Agama.

Pada jaman ini dikenal sebagai Abad Pertengahan (400-1500). Filsafat pada abad ini dikuasai dengan pemikiran keagamaan (Kristiani). Puncak filsafat Kristiani ini adalah *Patristik* (Lt. "*Patres*" / Bapa-bapa

64 Hamersma Harry, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1981. Lihat pula dalam: Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Op cit: 32-26.

Gereja) dan Skolastik Patristik sendiri dibagi atas Patristik Yunani (atau Patristik Timur) dan Patristik Latin (atau Patristik Barat). Tokoh-tokoh Patristik Yunani ini antara lain **Clemens** dari Alexandria (150-215), **Origenes** (185-254), **Gregorius** dari Naziane (330-390), **Basilius** (330-379). Tokoh-tokoh dari Patristik Latin antara lain **Hilarius** (315-367), **Ambrosius** (339-397), **Hieronymus** (347-420) dan **Augustinus** (354-430). Ajaran-ajaran dari para Bapa Gereja ini adalah falsafi-teologis, yang pada intinya ajaran ini ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia. Ajaran-ajaran ini banyak pengaruh dari Plotinos. Pada masa ini dapat dikatakan era filsafat yang berlandaskan akal-budi “diabdikan” untuk dogma agama.⁶⁵

Pemikiran-pemikiran **Aristoteles** kembali dikenal dalam karya beberapa filsuf Yahudi maupun Islam, terutama melalui **Avicena** (**Ibn. Sina**, 980-1037), **Averroes** (**Ibn. Rushd**, 1126-1198) dan **Maimonides** (1135-1204). Pengaruh **Aristoteles** demikian besar sehingga ia (**Aristoteles**) disebut sebagai “Sang Filsuf” sedangkan **Averroes** yang banyak membahas karya **Aristoteles** dijuluki sebagai “Sang Komentator”.

Pertemuan pemikiran **Aristoteles** dengan iman Kristiani menghasilkan filsuf penting sebagian besar dari ordo baru yang lahir pada masa Abad Pertengahan, yaitu, dari ordo Dominikan dan Fransiskan. Filsafatnya disebut “Skolastik” (Lt. “scholasticus”, “guru”), karena pada periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah biara dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang baku dan bersifat internasional. Inti ajaran ini bertema pokok bahwa ada hubungan antara iman dengan akal budi. Pada masa ini filsafat mulai ambil jarak dengan agama, dengan melihat sebagai suatu kesetaraan antara satu dengan yang lain (Agama dengan Filsafat) bukan yang satu “mengabdikan” terhadap yang lain atau sebaliknya.⁶⁶

65 Wallace Walter L, *The Logic of Science in Sociology*. New York: Aldine Publishing Company, 1971.

66 Wallace Walter L, *The Logic of Science in Sociology*. Ibid: 203.

Sampai dengan di penghujung Abad Pertengahan sebagai abad yang kurang kondusif terhadap perkembangan ilmu, dapatlah diingat dengan nasib seorang astronom berkebangsaan Polandia **N. Copernicus** yang dihukum kurungan seumur hidup oleh otoritas Gereja, ketika mengemukakan temuannya tentang pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari (*Heleosentrisme*). Teori ini dianggap oleh otoritas Gereja sebagai bertentangan dengan teori *geosentrisme* (Bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa) yang dikemukakan oleh **Ptolomeus** semenjak jaman Yunani yang justru telah mendapat "mandat" dari otoritas Gereja. Oleh karena itu dianggap menjatuhkan kewibawaan Gereja.

3. Memahami Ajaran Etika Socrates.

a. *Sejarah Kelahiran Socrates.*

Socrates Lahir di Athena pada tahun 470 SM dan meninggal pada tahun 399 SM. Bapakny adalah tukang pembuat patung, sedangkan ibunya seorang bidan pada permulaannya, **Socrates** mau menuruti jejak bapakny menjadi tukang pembuat patung pula, tetapi ia berganti haluan. Dari membentuk batu jadi patung, ia mmembentuk watak manusia. Masa hidupnya hampir sejalan dengan perkembangan sofisme di Athena. Pada hari tuanya, socrates melihat kota tumpah darahnya mulai mundur, setelah mencapai puncak kebesaran yang gilang gemilang.⁶⁷

Socrates terkenal sebagai orang yang berbudi baik, jujur, dan adil. Cara penyampaian kepada para pemuda menggunakan metode tanya jawab. Oleh sebab itu, ia memperoleh banyak simpati dari para pemuda di negerinya. Namun, ia juga kurang disenangi oleh orang banyak dengan menuduhnya sebagai orang yang merusak moral para pemuda negerinya. Selain itu, ia juga di tuduh menolak dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang telah di akui negara.⁶⁸

67 Harun Hadiwidjono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Op cit: 35.

68 Atang Abdul Hakim, *Filsafat umum*, Pustaka Setia: Bandung, 2008, hlm: 117-125.

Socrates juga dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki dan berkelilingi mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Merasa diri tidak bijak dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut, dia datang satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan dia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya Socrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana.

Peran Socrates dalam mendobrak pengetahuan semua itu meniru pekerjaan ibunya sebagai seorang bidan dalam upaya menolong kelahiran bayi, akan tetapi ia berperan sebagai bidan pengetahuan. Teknik dalam upaya menolong kelahiran (bayi), pengetahuan itu disebut majayutike (kebidanan) yaitu dengan cara mengamati-hal-hal yang konkret dan beragam coraknya tetapi pada jenis yang sama. Kemudian unsur-unsur yang berbeda di hilangkan sehingga tinggalah unsur yang sama dan bersifat umum, itulah pengetahuan sejati atau pengertian sejati sangat penting dalam mencapai keutamaan moral. Barang siapa yang mempunyai pengertian sejati berarti memiliki

kebaikan (*arete*) atau keutamaan moral berarti pula memiliki kesempurnaan manusia sebagai manusia.

Seperti halnya kaum sofis, **Socrates** mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Berbeda dengan kaum Sofis, yang setiap mengajarkan pengetahuan selalu memungut bayaran, tetapi Socrates tidak memungut bayaran kepada murid-muridnya. Maka, ia kemudian oleh kaum Sofis sendiri dituduh memberikan ajaran barunya, merusak moral para pemuda, dan menentang kepercayaan negara. Kemudian ia ditangkap dan akhirnya dihukum mati dengan minum racun pada umur 70 tahun yaitu pada tahun 399 SM. Pembelaan Socrates atas tuduhan tersebut telah ditulis oleh **Plato** dalam karangannya, yaitu *Apologia*.⁶⁹

b. Memahami Ajaran Etika Socrates.

Ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan, mengguncangkan keyakinan agama. Ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam kehidupan. Inilah sebabnya **Socrates** harus bangkit. Ia harus meyakinkan orang Athena bahwa tidak semua kebenaran itu relatif, ada kebenaran umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Sebagaimana kebenaran memang relatif, tetapi tidak semuanya. Sayangnya, **Socrates** tidak meninggalkan tulisan. Ajarannya kita peroleh dari tulisan murid-muridnya terutama **Plato**.

Kenns Bartens,⁷⁰ di dalam *sejarah filsafat Yunani* menjelaskan bahwa ajaran **Socrates** itu ditujukan untuk menentang ajaran *relativisme sofis*. Ia ingin menegakkan sains dan agama. Kalau dipandang sepiantas lalu, **Socrates** tidaklah banyak berbeda dengan orang-orang sofis. Sama dengan orang sofis, **Socrates** memulai filsafatnya dengan bertolak dari pengalaman sehari-hari. Akan tetapi,

69 Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm: 49-67.

70 K Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Op cit: 94-97.

ada perbedaan yang amat penting antara orang sofis dan **Socrates**. **Socrates** tidak meminta biaya untuk orang-orang yang belajar kepadanya.

Menurut pendapat **Socrates** ada kebenaran obyektif, yang tidak bergantung pada saya atau pada kita. Ini memang pusat permasalahan yang dihadapi oleh **Socrates**. Untuk membuktikan adanya kebenaran obyektif, **Socrates** menggunakan metode tertentu. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Ia menganalisis pendapat-pendapat. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan tidak salah, misalnya ia bertanya kepada negarawan, hakim, tukang, pedagang, dan sebagainya. Menurut **Xenophon**, ia bertanya tentang salah dan tidak salah, adil dan tidak adil, berani dan pengecut dan lain-lain.⁷¹

Menurut filsafat **Socrates** bahwa segala sesuatu kejadian yang terjadi di alam adalah karena adanya "akal yang mengatur" yang tidak lalai dan tidak tidur. Akal yang mengatur itu adalah Tuhan yang pemurah. Dia bukan benda, hanya wujud yang rohani semata-mata. Pendapat **Socrates** tentang Tuhan lebih dekat kepada akidah tauhid. Dia menasehatkan supaya orang menjaga perintah-perintah agama, jangan menyembah berhala dan mempersekutukan Tuhan.

Menurut **Socrates**, bahwasanya pengertian dari etika atau intisari dari etika yaitu budi yang berarti tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Sebagai contoh, apabila seseorang

71 Dalam menggunakan metode tersebut untuk mencari ikhwal kebenaran obyektif, **Socrates** selalu menganggap jawaban pertama sebagai hipotesis, dan dengan jawaban-jawaban lebih lanjut dan menarik konsekuensi-konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Jika ternyata hipotesis pertama tidak dapat dipertahankan, karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka hipotesis itu diganti dengan hipotesis lain, lalu hipotesis kedua ini diselidiki dengan jawaban-jawaban lain, dan begitulah seterusnya. Sering terjadi percakapan itu berakhir dengan *aporia* (kebingungan). Akan tetapi, tidak jarang dialog itu menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. Metode yang biasa digunakan **Socrates** biasanya disebut *dialektika* yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode **Socrates** dinamakan *dialektika* karena dialog mempunyai peranan penting didalamnya. Lihat dalam: **Ahmad Tafsir**, *Filsafat Umum Akal dan Hati sejak Thales Sampai Capra*, Rosda Karya: Bandung, 2009, hlm: 47-54.

telah mengetahui tentang kebenaran adanya kenikmatan surga dan siksa neraka, maka sudah pastilah ia akan mengikuti jalan ajaran Tuhannya untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Dan hanya orang-orang yang tidak mempercayai adanya kenikmatan surga dan siksa nerakalah yang enggan untuk melaksanakan aturan dari Tuhannya yang dapat membawanya kepada kenikmatan surga tersebut. Akan tetapi ia malahan melakukan tindakan yang dilarang oleh Tuhannya dan meniggalkan perintah dari Tuhannya. Sedangkan paham etika **Socrates** selanjutnya yaitu kelanjutan daripada metode-metodenya. Selanjutnya, siapa yang mengetahui hukum mestilah bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Tak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan. Oleh karena budi berdasar atas pengetahuan, maka budi itu dapat dipelajari.

Dari ucapan itu nyatalah bahwa ajaran etika **Socrates** intelektual sifatnya. Selain dari itu juga rasionil. Apabila budi adalah tahu, maka tak ada orang yang sengaja, atas maunya sendiri, berbuat jahat. Kedua-duanya, budi dan tahu bersangkut-paut. Apabila budi adalah tahu, berdasarkan timbangan yang benar, maka "jahat" hanya datang dari orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mempunyai pertimbangan atau penglihatan yang benar. Orang yang kesasar adalah korban daripada kekhilafannya sendiri. Kesasar bukanlah perbuatan yang disengaja. Tidak ada orang yang khilaf atas maunya sendiri.

Menurut **Socrates**, manusia itu pada dasarnya baik. Seperti dengan segala barang yang ada itu ada tujuannya, begitu juga hidup manusia. Apa misalnya tujuan meja? Kekuatannya, kebaikannya. Begitu juga dengan manusia. Keadaan dan tujuan manusia ialah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya.

Dari pandangan etika yang *rasional* itu **Socrates** sampai kepada sikap hidup, yang penuh dengan rasa keagamaan. Menurut keyakinannya, menderita kezaliman lebih baik dari berbuat zalim. Sikap itu diperlihatkannya dengan kata dan perbuatannya, dalam pembelaannya di muka hakim. Socrates adalah orang yang percaya kepada Tuhan.

Alam ini teratur susunannya menurut wujud yang tertentu. Hal itu katanya adalah tanda perbuatan Tuhan. Kepada Tuhan dipercayakannya segala-galanya yang tak dapat diduga oleh otak manusia. Jiwa manusia itu dipandangannya bagian daripada Tuhan yang menyusun alam. Sering pula dikemukakannya, bahwa Tuhan itu dirasai sebagai suara dari dalam, yang menjadi bimbingan baginya dalam segala perbuatannya. Itulah yang disebutnya daimonion. Bukan dia saja yang begitu katanya. Semua orang dapat mendengar suara daimonion itu dari dalam jiwanya, apabila ia mau.

Juga dalam segi pandangan **Socrates** yang berisi keagamaan, terdapat pengaruh paham rasionalisme. Semuanya itu menunjukkan kebulatan ajarannya, yang menjadikan ia seorang filosof yang terutama seluruh masa.⁷²

c. Intisari Pemikiran Etika Socrates.

Filsafat etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas masalah seputar moralitas (norma-norma), prinsip-prinsip moral, dan teori-teori moral. Misalnya teori hati nurani, teori rasa moral, teori keputusan moral, teori tentang kebaikan mutlak dan teori tentang kebaikan relatif, teori tentang kejahatan, teori kriteria moral, teori tentang asal mula manusia harus bermoral, dan lain-lain. Adapun filsafat etika ini memiliki aliran-aliran yang diantaranya yaitu aliran etika naturalisme, aliran etika hedonisme, aliran etika utilitarisme, aliran etika idealisme, aliran etika vitalisme, dan aliran etika teologis. Dimana aliran-aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi masalah etika tersebut.

Selanjutnya **Socrates** mengungkapkan bahwasanya intisari dari etika itu adalah budi, yang berarti tahu. Ajaran etika yang diberikan oleh Socrates itu sifatnya intelektual dan rasional. Karena cara penyampaian yang disampaikan oleh **Socrates** berdasarkan pada hal-

72 Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Tintamas: Jakarta, 1986, hlm.: 83-90.

hal yang masuk akal pada umumnya dan dalam upaya penegakan sains dengan cara yang berdialog. Sebagai contoh ungkapan **Socrates** yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya baik, hal itu sebagaimana dengan segala barang yang ada itu pasti ada tujuannya, begitu juga dengan hidup manusia. Contohnya saja tujuan dari meja, yaitu berupa kekuatan dan kebaikan yang dihasilkan oleh meja tersebut. Begitu juga dengan manusia, yang mana keadaan dan tujuan manusia ialah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya.

Sebagaimana para sofis, disini **Socrates** memulai filsafatnya dengan bertitik tolak dari pengalaman keseharian dan kehidupan kongkret. Perbedaannya terletak pada penolakan **Socrates** terhadap relativisme yang pada umumnya dianut para sofis. Menurut **Socrates** tidak benar bahwa yang baik itu baik bagi warga negara Athena dan lain lagi bagi warga negara Sparta. Yang baik mempunyai nilai yang sama bagi semua manusia, dan harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Pendirinya yang terkenal adalah pandangannya yang menyatakan bahwa keutamaan (*arete*) adalah pengetahuan, pandangan ini kadang-kadang disebut intelektualisme etis. Dengan demikian, **Socrates** telah menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia.

Perkataan adalah senjata, dan tindakan adalah keuntungan/kemenangan, dan hakikat manusia senantiasa belajar dari alam dan kembali ke alam untuk belajar. Kebenaran akan datang ketika kesalahan itu ada (sebab dan akibat). Proses berfikir dengan manusia yang lain itu selalu berada di garis yang sama, dan ketika pincang maka timbullah yang dinamakan pertengkaran. Dan ketika kita belajar filsafat, tidak cukup hanya dengan makalah ini saja, dan tidak cukup hanya mempelajarinya sehari dan semalam saja, melainkan dengan berdiskusi/dialektika berorganisasi. Insan yang baik adalah insan yang berguna dalam kehidupan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Maka keharusan bagi kita sebagai makhluk yang berfikir adalah belajar berorganisasi dan berjuang.

4. Pelajaran Etika Menurut Plato.

a. Menapak Tilas Kelahiran Plato.

Filosof Yunani kuno **Plato** tak pelak lagi cikal bakal filosof politik Barat dan sekaligus sumber pemikiran etika dan metafisika mereka. Pendapat-pendapatnya di bidang ini sudah terbaca luas lebih dari 2300 tahun. Tak pelak lagi, **Plato** berkedudukan bagai bapak moyangnya pemikir Barat.

Plato dilahirkan dari kalangan famili Athena kenamaan sekitar tahun 427 SM. Di masa remaja dia berkenalan dengan filosof kesohor **Socrates** yang jadi guru sekaligus sahabatnya. Tahun 399 SM, tatkala **Socrates** berumur tujuh puluh tahun, dia diseret ke pengadilan dengan tuduhan tak berdasar berbuat brengsek dan merusak akhlak angkatan muda Athena. **Socrates** dikutuk, dihukum mati. Pelaksanaan hukum mati **Socrates** (yang disebut **Plato** "*orang terbijaksana, terjujur, terbaik dari semua manusia yang saya pernah kenal*") Membuat **Plato** benci kepada pemerintahan demokratis.⁷³

Tak lama sesudah **Socrates** mati, **Plato** pergi meninggalkan Athena dan selama sepuluh-duabelas tahun mengembara ke mana kaki membawa. Sekitar tahun 387 SM dia kembali ke Athena, mendirikan perguruan di sana, sebuah akademi yang berjalan lebih dari 900 tahun. **Plato** menghabiskan sisa umurnya yang empat puluh tahun di Athena, mengajar dan menulis ihwal filsafat. Muridnya yang masyhur, **Aristoteles**, yang jadi murid akademi di umur tujuh belas tahun sedangkan **Plato** waktu itu sudah menginjak umur enam puluh tahun. **Plato** tutup mata pada usia tujuh puluh.⁷⁴

Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, kebanyakan menyangkut masalah politik dan etika selain metafisika dan teologi. Tentu saja mustahil mengikhtisarkan isi semua buku itu hanya dalam

73 Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 1986, hlm: 88-90.

74 K Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Op cit: 152-153.

beberapa kalimat. Tetapi, dengan risiko menyederhanakan pikiran-pikirannya, saya mau coba juga meringkas pokok-pokok gagasan politiknya yang dipaparkan dalam buku yang kesohor, *Republik*, yang mewakili pikiran-pikirannya tentang bentuk masyarakat yang menurutnya ideal. Bentuk terbaik dari suatu pemerintahan, usul **Plato**, adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum aristokrat. Yang dimaksud *aristokrat* di sini bukannya aristokrat yang diukur dari takaran kualitas, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh putera terbaik dan terbijak dalam negeri itu. Orang-orang ini mesti dipilih bukan lewat pungutan suara penduduk melainkan lewat proses keputusan bersama. Orang-orang yang sudah jadi anggota penguasa atau disebut "*guardian*" harus menambah orang-orang yang sederajat semata-mata atas dasar pertimbangan kualitas.

Politeia en auton, bersemayamnya kecenderungan untuk hidup berpolis dalam diri manusia. Bagi **Plato**, polis memang tidak dapat dilihat terlepas dari individu manusia, maupun sebaliknya manusia adalah polis yang kecil, sedangkan polis adalah manusia yang besar.⁷⁵ Zaman (Yunani) kuno bermula pada abad ke-6 SM sampai abad ke-5 M, tatkala Kekaisaran Romawi runtuh. Pada awal zaman kuno ini, rakyat Yunani sudah hidup dalam polis-polis yang satu sama lain memiliki penguasa, sistem pemerintahan, dan sistem hukum tersendiri.⁷⁶

Semula penguasa polis memegang kekuasaan tunggal. Baru pada abad ke-5, setelah munculnya kaum *Sofisme*, polis-polis tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Tentu saja prinsip-prinsip itu masih belum matang, karena kepercayaan manusia yang masih sangat besar terhadap kekuatan supranatural, seperti keyakinan terhadap dewa-dewi Olympus.⁷⁷ Namun, **Plato** melihat bahwa kematian **Socrates**

75 Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo: Jakarta, 2004, hlm: 35-37.

76 Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004, hlm: 80-100.

77 Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Ibid: 80-82

telah menjadi kegagalan kaum sofis merumuskan tujuan polis untuk memberikan keadilan.

Menurut **Plato** bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam yakni sebagai berikut; Pemerintahan yang dapat diselenggarakan: pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalur hukum. Jika pemerintahan terbentuk melalui jalan hukum dan dijalankan oleh shopia dari seseorang, bentuknya adalah *monarcheia*. Jika pemerintahan terbentuk oleh beberapa orang kita akan memperoleh aristokrasi (artinya adalah yang terbaik). Jika pemerintahan dijalankan demi kehormatan, maka yang terselenggara adalah timokratein. Sedangkan massa yang miskin yang berkuasa melalui jalan hukum akan membuat negara diperintah oleh demokrasi. Di samping ketiga bentuk pemerintahan yang baik itu, juga dimungkinkan tiga bentuk pemerintahan yang tidak baik karena dicapai tidak melalui jalur hukum: tirani (*tyrannis*) jika pemerintahan dipegang oleh satu orang saja; oligarki jika pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang, dan okhlokrasi jika pemerintahan dilaksanakan oleh massa.⁷⁸

Plato (428-348 SM) adalah filsuf Yunani, lahir sebagai keluarga Aristokrat di Athena⁷⁹ Semula ia ingin bekerja sebagai seorang politikus, akan tetapi kematian **Socrates** memadamkan ambisinya untuk menjadi politikus⁸⁰ Pemikiran-pemikiran **Plato** sangat dipengaruhi oleh **Scorates**⁸¹ karena selama 8 tahun ia menjadi murid **Socrates**. **Plato** adalah seorang penulis yang *imajinatif*, dengan kecerdasan dan daya pukau yang luar biasa.⁸² Banyak sekali karyanya yang masih utuh.

78 Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Ibid: 104.

79 Speake, Jennifer, *A Dictionary of Philosophy*. London: Pan Books Ltd. 1968, P: 268.

80 Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Op cit: 38-40.

81 Speake, Jennifer, *A Dictionary of Philosophy*, Op cit: 45.

82 Bertrand Russel, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq (Penj.), *Sejarah Filsafat*

Dari sekian karyanya yang paling populer ialah *Apologia*, *Politeia*, *Sophistes*, *Timaios*.

Kematian **Socrates** sangat mempengaruhi pandangan Plato tentang negara. **Socrates** dihukum mati di Athena, yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis.⁸³ Kematian tersebut berdampak pada diri **Plato**, sehingga dia mencoba mencari konsep negara yang ideal. Negara ideal menurut **Plato** tergambar dari konsep negara Sparta. Negara Sparta memiliki undang-undang yang rumit. Ada dua raja yang berasal dari keluarga yang berbeda, dan digantikan secara turun temurun. Salah satu raja memimpin pasukan di masa perang, namun di masa damai kekuasaannya dibatasi. Mereka menjadi anggota Dewan sesepuh, suatu lembaga yang terdiri dari tiga puluh orang (termasuk raja); dua puluh delapan anggota lainnya harus berusia lebih dari enam puluh tahun, dan diangkat seumur hidup oleh seluruh warganegara, namun hanya yang termasuk keluarga bangsawan.

Selain raja, Dewan Sesepuh, dan Majelis, terdapat pula lembaga pemerintahan keempat yang khas Sparta, yakni lima ephor. Lembaga ini dipilih dari antara semua warganegara lewat metode diundi. Para ephor inilah yang merupakan unsur “demokratis” dalam undang-undang Sparta, yang agaknya dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan raja.⁸⁴

Plato begitu kagum dengan Sparta karena stabilitas negara tersebut. Sparta telah menjadi ideal bagi **Plato** karena selama periode yang panjang bangsa tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni terciptanya suatu ras yang terdiri dari para serdadu yang tak tertaklukkan. **Plato** pun, akhirnya, mengidealisasikan secara

Barat: Kaitanya dengan Kondisi Sosio-politik zaman kuno hingga sekarang. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006, hlm: 113.

83 **Bertrand Russel**, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, Ibid: 81.

84 **Bertrand Russel**, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, Ibid: 131.

filosofis atas negara Sparta dalam karyanya "*Republic*". Kebesaran Lycurgus, yang bijak dan gagah perkasa dalam perang, menjadi sosok perpaduan raja-filsuf.

b. Epistemologi Dasar Pemikiran Filsuf Plato.

Epistemologi Pemikiran **Plato** dapat dikatakan sebagai filsuf pertama yang secara jelas mengemukakan epistemologi dalam filsafat, meskipun ia belum menggunakan secara resmi istilah epistemologi ini. Filsuf Yunani berikutnya yang berbicara tentang epistemologi adalah **Aristoteles**. Ia murid **Plato** dan pernah tinggal bersama **Plato** selama kira-kira 20 tahun di Akademia.

Pembahasan tentang epistemologi **Plato** dan **Aristoteles** akan lebih jelas dan ringkas kalau dilakukan dengan cara membandingkan keduanya. *Idea* merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh **Plato**. Ia beranggapan bahwa *idea* merupakan suatu yang objektif, adanya *idea* terlepas dari subjek yang berfikir. *Idea* tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya pemikiran itu tergantung dari *idea-idea*. Ia memberikan beberapa contoh seperti segitiga yang digambarkan di papan tulis dalam berbagai bentuk itu merupakan gambaran yang merupakan tiruan tak sempurna dari *idea* tentang segitiga. Maksudnya adalah berbagai macam segitiga itu mempunyai satu *idea* tentang segitiga yang mewakili semua segitiga yang ada.⁸⁵

85 Mohhamd Hatta, *Alam Pemikiran Yunani*, Op cit: 97. Dalam menerangkan *idea* ini **Plato** menerangkan dengan teori dua dunianya, yaitu dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan pancaindera, sifat dari dunia ini tidak tetap terus berubah, dan tidak ada suatu kesempurnaan. Dunia lainnya adalah dunia *idea*, dan dunia *idea* ini semua serba tetap, sifatnya abadi dan tentunya serba sempurna. *Idea* mendasari dan menyebabkan benda-benda jasmani. Hubungan antara *idea* dan realitas jasmani bersifat demikian rupa sehingga benda-benda jasmani tidak bisa berada tanpa pendasaran oleh *idea-idea* itu. Hubungan antara *idea* dan realitas jasmani ini melalui 3 cara, pertama, *idea* hadir dalam benda-benda konkrit. Kedua, *benda konkrit* mengambil bagian dalam *idea*, disini **Plato** memperkenalkan partisipasi dalam filsafat. Ketiga, *Idea* merupakan model atau contoh bagi benda-benda konkrit. Benda-benda konkrit itu merupakan gambaran tak sempurna yang menyerupai model tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam: **Lorens Bagus**, *Kamus Filsafat*, Op cit: 851.

Pandangan tentang dunia, menurut **Plato**, Ada 2 dunia: dunia ide & dunia sekarang (semu) sementara dalam pandangan **Aristoteles**, Hanya 1 dunia: Dunia nyata yang sedang dijalani. Kenyataan sejati, menurut **Plato**, Ide-ide berasal dari dunia ide. Sementara dalam kacamata **Aristoteles**, segala sesuatu yang ada di alam bisa diindera.

Pandangan tentang manusia, menurut **Plato**, Terdiri dari badan dan jiwa. Jiwa abadi; badan fana (tidak abadi), Jiwa terpenjara oleh badan. Sementara dalam pandangan **Aristoteles**, badan dan jiwa sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Asal pengetahuan, menurut **Plato**, dunia ide, namun tertanam dalam jiwa setiap manusia. Sementara dalam pandangan **Aristoteles**, kehidupan dunia dan alam nyata. Cara meraih pengetahuan, menurut **Plato**, terpancar dari alam jiwa (*Anamnesis*). Sementara dalam pandangan **Aristoteles**, observasi dan abstraksi lalu diolah dengan logika.

Perbedaan epistemologi **Plato** dan **Aristoteles** ini memiliki pengaruh besar terhadap para filsuf modern. **Idealisme Plato** mempengaruhi filsuf-filsuf Rasionalis seperti **Spinoza**, **Leibniz**, dan **Whitehead**. Sedangkan pandangan **Aristoteles** tentang asal dan cara memperoleh pengetahuan mempengaruhi filsuf-filsuf Empiris seperti **Locke**, **Hume**, dan **Berkeley**. Antara abad 17 hingga akhir abad ke-19, masalah utama yang muncul dalam pembahasan epistemologi adalah *resistensi* antara kubu rasionalis *vis-à-vis* kubu empiris (inderawi-persepsi). Filsuf Francis, **René Descartes** (1596-1650), filsuf Belanda, **Baruch Spinoza** (1632-1677), dan filsuf Jerman, **Wilhelm Leibniz** (1646-1716) adalah para pemimpin kubu *rasionalis*. Mereka berpandangan bahwa sumber utama dan pengujian akhir ilmu pengetahuan adalah logika deduktif (*qiyas*) yang bersandarkan kepada prinsip-prinsip swabukti (*badihî*) atau *axioma-axioma*.

Sementara orang-orang seperti, **Francis Bacon** (1561-1626) **John Locke** (1632-1704) keduanya adalah filsuf Inggris berkeyakinan bahwa sumber utama dan pengujian akhir ilmu pengetahuan adalah bersandar kepada pengalaman, persepsi dan inderawi.

Filsuf Francis **René Descartes** secara *rigoris* menggunakan metode deduksi dalam jelajah filsafatnya. Barangkali **Descartes** ini dikenal baik atas karya pionirnya untuk bersikap skeptis dalam berfilsafat. Dialah yang pertama kali memperkenalkan metode sangsi dalam investigasi terhadap ilmu pengetahuan. **Descartes** yang kerap disebut sebagai Bapak Filsafat Modern (sekaligus filsafatnya kemudian dikenal sebagai **Cartesians**) ini dalam mengusung metode rasionalnya, dia menggunakan metode sangsi dalam menyikapi pelbagai fenomena atau untuk mencerap ilmu pengetahuan. Postulat, *Cogito Ergo Sum* adalah milik **Descartes**. Rumusan postulat ini yang menemaninya untuk menyingkap ilmu pengetahuan. Menurut **Descartes** segala sesuatu yang berada di dunia luar harus disangsikan dan diragukan.

Pandangan **Descartes** tentang manusia bersifat *dualisme*. Ia melihat manusia sebagai dua substansi: jiwa dan tubuh. Jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keluasan. Tubuh tidak lain adalah suatu mesin yang dijalankan jiwa. Hal ini dipengaruhi oleh epistemologinya yang memandang rasio sebagai hal yang paling utama pada manusia. *Empirisme* pertama kali diperkenalkan oleh filsuf dan negarawan Inggris **Francis Bacon** pada awal-awal abad ke-17, akan tetapi **John Locke** yang kemudian mendesainnya secara sistemik yang dituangkan dalam bukunya "*Essay Concerning Human Understanding* (1690).

John Locke memandang bahwa akal manusia pada awal lahirnya adalah ibarat sebuah tabula rasa, sebuah batu tulis kosong tanpa isi, tanpa pengetahuan apapun. Lingkungan dan pengalamanlah yang menjadikannya berisi. Pengalaman inderawi menjadi sumber pengetahuan bagi manusia dan cara mendapatkannya lewat observasi dan pemanfaatan seluruh indera manusia. **John Locke** adalah orang yang tidak percaya terhadap konsepsi intuisi dan batin. Filsuf empirisme lainnya adalah Hume. Ia memandang manusia sebagai sekumpulan persepsi (*a bundle or collection of perceptions*).

Manusia hanya mampu menangkap kesan-kesan saja lalu menyimpulkan kesan-kesan itu seolah-olah berhubungan. Pada

kenyataannya, menurut Hume, manusia tidak mampu menangkap suatu substansi. Apa yang dianggap substansi oleh manusia hanyalah kepercayaan saja. Begitu pula dalam menangkap hubungan sebab-akibat. Manusia cenderung menganggap dua kejadian sebagai sebab dan akibat hanya karena menyangka kejadian-kejadian itu ada kaitannya, padahal kenyataannya tidak demikian. Selain itu, Hume menolak ide bahwa manusia memiliki kedirian (*self*). Apa yang dianggap sebagai diri oleh manusia merupakan kumpulan persepsi saja.

c. **Negara Ideal Menurut Plato.**

Dalam buku *Politeia* **Plato** melukiskan suatu model tentang negara yang adil. Negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya, supaya adil. Dalam negara macam itu tiap-tiap golongan mempunyai tempat alamiahnya. Timbullah keadilan, bila tiap-tiap kelompok (filsuf, tentara, pekerja) berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugasnya⁸⁶.

Plato percaya bahwa bagi semua orang, entah dia lelaki atau perempuan, mesti disediakan kesempatan memperlihatkan kebolehannya selaku anggota "*guardian*". **Plato** merupakan filosof utama yang pertama, dan dalam jangka waktu lama nyatanya memang cuma dia, yang mengusulkan persamaan kesempatan tanpa memandang kelamin. Untuk membuktikan persamaan pemberian kesempatannya, **Plato** menganjurkan agar pertumbuhan dan pendidikan anak-anak dikelola oleh negara. Anak-anak pertama-tama harus memperoleh latihan fisik yang menyeluruh, tetapi segi musik, matematika dan lain-lain disiplin akademi tidak boleh diabaikan. Pada beberapa tahap, ujian ekstensif harus diadakan. Mereka yang kurang maju harus dialurkan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan orang-orang yang maju harus terus melanjutkan dan menerima

86 **Theo Huijbers**, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta, 2006, hlm: 80.

gembleran latihan. Penambahan pendidikan ini harus termasuk bukan cuma pada mata pelajaran akademi biasa, tetapi juga mendalami filosofi yang oleh **Plato** dimaksud menelaah doktrin bentuk ideal faham metafisikanya.

Pada usia tiga puluh lima tahun, orang-orang ini yang memang sudah betul-betul meyakinkan mampu menunjukkan penguasaannya di bidang teori-teori dasar, harus menjalani lagi tambahan latihan selama lima belas tahun, yang mesti termasuk bekerja mencari pengalaman praktek. Hanya orang-orang yang mampu memperlihatkan bahwa mereka bisa merealisasi dalam bentuk kerja nyata dari buku-buku yang dipelajarinya dapat digolongkan kedalam "kelas guardian." Lebih dari itu, hanya orang-orang yang dengan jelas bisa menunjukkan bahwa minat utamanya adalah mengabdikan kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam. "kelas guardian."

Plato menyarankan sistem *komunisme* sepenuhnya bagi kelas pemimpin, dan juga untuk kelas serdadu. Para pemimpin hendaknya menempati rumah kecil dan mengkonsumsi makanan sederhana; mereka hendaknya hidup dalam asrama, makan bersama-sama secara berkelompok.⁸⁷

Kemelaratan dan kekayaan merupakan sesuatu yang berbahaya, dan dalam negeri **Plato** keduanya tidak boleh ada. Pemikiran **Plato** tersebut sangat mencerminkan bahwa dia terpengaruh oleh konsep negara Lysurgus. Lysurgus, menurut Plutarchus, benar-benar mengatur warga-negaranya sedemikian rupa sehingga mereka tak menghendaki dan tak bisa hidup sendirian, kecuali hidup dalam keadaan di mana manusia saling terikat satu sama lain, dan senantiasa berkelompok bersama-sama, seperti lebah-lebah yang senantiasa terikat dengan ratunya.⁸⁸

87 **Bertrand Russel**, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, Op cit: 150-155.

88 **Bertrand Russel**, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, Ibid: 139-150.

Dalam konteks doktrin *ide Plato*, ide keadilan bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan ide tentang polis, karena perenungan gagasan tentang polis ini menghasilkan sebuah citra di mana hukum dan perundangan nyaris tidak memainkan peran sama sekali. Pemikiran Plato tentang polis sangat dicirikan dengan kekuasaan filsuf-raja.⁸⁹

Lebih lanjut untuk mengefektifkan kelembagaan kenegaraan, **Plato** membagi penduduk dalam tiga golongan:⁹⁰

1. Golongan Bawah, yaitu golongan rakyat jelata, yang merupakan petani, tukang dan saudagar. Kerja mereka adalah menghasilkan keperluan sehari-hari bagi ketiga golongan. Mereka merupakan dasar ekonomi bagi masyarakat. Karena mereka menghasilkan mereka tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan. Sebagai golongan yang berusaha mereka boleh mempunyai hak milik dan harta boleh berumah tangga sendiri;
2. Golongan tengah, yaitu penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Tugas mereka adalah mempertahankan negara dari serangan musuh. Dan menjamin supaya undang-undang dipatuhi oleh rakyat. Dasar kerjanya mengabdikan kepada negara. Oleh karena itu mereka tinggal bersama dalam asrama dan tidak boleh berkeluarga. Hidup mereka didasarkan atas perbaikan jenis manusia dan hubungan mereka dengan perempuan diatur oleh negara dengan pengawasan yang rapih. Anak yang lahir dari hubungan mereka dipugut dan dididik oleh negara. Anak itu tidak tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Semua anak yang lahir mengaku satu sama lain bersaudara berkakak adik. Taip orang laki-laki dipandang bapak dan tiap wanita dipandang ibu. Dengan begitu diharapkan akan timbul rasa persaudaraan antara segala manusia;

89 Friedrich Carl Joichim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Raisul Muttaqien (penj). *filsafat Hukum: Perspektif Sejarah*, Nuansa dan Nusamedia: Bandung, 2004, hlm: 19-25.

90 Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Op cit: 44; Lihat pula dalam: Lorens Bagus, 1996: 852.

3. Golongan Atas, yaitu kelas pemerintah atau filosof. Mereka terpilih dari yang cakap dan terbaik dari kelas penjaga, setelah menempuh pendidikan dan latihan yang spesial. Tugas mereka adalah membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Mereka memangku jabatan yang tertinggi. Selain itu mereka mempergunakan waktu luang untuk memperdalam filosofi dan ilmu pengetahuan tentang idea kebaikan. Mereka harus menyempurnakan budi yang tepat bagi golongan mereka yaitu budi kebijaksanaan.

Dalam negara yang *ideal* golongan pengusaha menghasilkan tetapi tidak memerintah. Golongan penjaga melindungi tapi tidak memerintah. Golongan cerdik pandai di beri makan dan dilindungi dan mereka memerintah. Ketiga macam budi yang dimiliki masing-masing golongan yaitu bijaksana berani dan menguasai diri dapat menyelenggarakan dengan kerja sama budi keempat bagi masyarakat yaitu keadilan. Ketika Plato menulis dialog yang dikenal berjudul *politeia*, atau "*konstitusi*" (bukan republik).⁹¹ Dia yakin bahwa ini merupakan problema yang sangat sulit, namun bukan berarti tidak dapat dipecahkan. **Plato** yakin solusinya ialah bahwa filsuf mesti menjadi penguasa atau filsuf penguasa, atau orang-orang yang mengupayakan kearifan melalui pemahaman sejati mengenai gagasan.

Dia yakin bahwa jika kebetulan seseorang yang memiliki kekuasaan tak terbatas dalam sebuah polis bertemu dengan pencari kearifan itu, penciptaan masyarakat yang benar-benar baik bisa diharapkan terlaksana. **Plato**, seperti diketahui, mengupayakannya sendiri dan bertindak sejalan dengan keyakinan ini ketika dia menerima undangan dari rekannya **Dion** untuk bekerja pada **Dionysius I** dan **Dionysius II Syracuse** dengan harapan akan menciptakan *polis Syracuse* dalam gambarannya. Namun usaha itu gagal.⁹²

91 Friedrich Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Op cit: 19-24.

92 Friedrich Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Ibid: 20.

Plato kemudian kembali kepada doktrin Yunani tradisional yang menyatakan bahwa tatanan polis yang baik hanya bisa diwujudkan dengan membuat peraturan mendasar atau *nomos*. Namun *nomos* ini dipandang **Plato** sebagai partisipasi dalam gagasan keadilan, dan melalui partisipasi ini ia pada gilirannya berperanserta dalam gagasan kebijakan. Sebuah *polis* bukanlah gagasan itu sendiri, melainkan ia “berpartisipasi” dalam gagasan itu. **Plato** menyatakan tujuan hidup ialah *eudaimonia* atau hidup lebih baik.⁹³

Keadilan menurut **Plato**, bahwa negara harus diselenggarakan menurut cara-cara tradisional, atau menurut cara yang ia anjurkan, untuk dapat merealisasikan sejumlah cita-cita etis seutuhnya. Dikatakan bahwa keadilan terwujud pada kenyataan di mana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing. Di negara yang tak mengalami perubahan dari generasi ke generasi, seperti di Mesir purba dan kerajaan Inca, tugas seseorang tak berbeda dengan tugas ayahnya, dan tak ada persoalan yang timbul. Namun, di negara yang dibayangkan **Plato** tak seorang pun yang mempunyai ayah yang resmi. Tugas warganegara dengan demikian harus ditentukan baik berdasarkan seleranya sendiri atau berdasarkan keputusan negara sesuai dengan bakatnya. Pilihan kedua inilah yang dikehendaki **Plato**.⁹⁴

Plato menjelaskan tentang otoritas hukum, dengan memberi contoh, bahwa hukum yang mengatur manusia untuk menikah sebelum usia tiga puluh lima tahun harus diimplementasikan dengan sebuah pembukaan (*preamble*) yang menjelaskan perlunya kepala rumah tangga demi keberlangsungan masyarakat.⁹⁵ Penjelasan yang demikianlah inilah, hukum dapat ditegakkan dan dijaga.

Gambaran hukum tersebut mencerminkan bagaimana pengaruh Sparta terhadap pemikirannya tentang negara.

93 Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Op cit: 43-45.

94 Bertrand Russel, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, Op cit: 155.

95 Friedrich Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, OP cit: 22-25.

Pemikiran yang dituangkannya dalam *Republic* terbaca luas selama berabad-abad. Tetapi harus dicatat, sistem politik yang dianjurkan didalamnya belum pernah secara nyata dipraktekkan sebagai model pemerintahan mana pun.

Selama masa antara jaman **Plato** hingga kini, umumnya negara-negara Eropa menganut sistem kerajaan. Di abad-abad belakangan ini beberapa negara menganut bentuk pemerintah demokratis. Ada juga yang menganut sistem pemerintahan militer, atau di bawah tiran demagog seperti misalnya **Hitler** dan **Mussolini**. Tak satu pun pemerintahan-pemerintahan ini punya kemiripan dengan republik *ideal* **Plato**. Teori **Plato** tak pernah jadi anutan partai politik mana pun, atau jadi basis gerakan politik seperti halnya terjadi pada ajaran-ajaran **Karl Marx**, apakah dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hasil karya **Plato**, kendati diperbincangkan dengan penuh penghargaan, sebenarnya sepenuhnya disisihkan orang dalam praktek? Saya pikir tidak.

Memang benar, tak satu pun pemerintahan sipil di Eropa disandarkan atas model **Plato** secara langsung. Namun, terdapat persamaan yang mengagumkan antara posisi gereja Katolik di Eropa abad tengah dengan “kelas guardian” **Plato**. Gereja Katolik abad pertengahan terdiri dari kaum elite yang mempertahankan diri sendiri agar tidak layu dan tersisihkan, yang anggota-anggotanya mendapat latihan-latihan filosofis resmi. Pada prinsipnya, semua pria, tak peduli dari mana asal-usulnya dapat dipilih masuk kependetaan (meski tidak untuk wanita). Juga pada prinsipnya, para pendeta itu tak punya famili dan memang diarahkan semata-mata agar mereka memusatkan perhatian pada kelompok mereka sendiri, bukannya nafsu keagungan disanjung-sanjung.

Peranan partai Komunis di Uni Soviet juga ada yang membandingkannya dengan “kelas guardian” Plato dalam dia punya republik ideal. Di sini pun kita temukan kelompok elite yang kesemuanya terlatih dengan filosofi resmi. Gagasan **Plato** juga mempengaruhi struktur pemerintahan Amerika Serikat. Banyak anggota konvensi konstitusi

Amerika mengenal dan tak asing dengan gagasan-gagasan politik **Plato**. Dia maksud, sudah barang tentu, agar Konstitusi Amerika Serikat membuka kemungkinan menggali dan mempengaruhi kehendak rakyat. Dan juga diinginkan sebagai sarana memilih orang-orang yang paling bijak dan paling baik untuk memerintah negara.

Kesulitan menentukan arti penting pengaruh **Plato** sepanjang masa, meski luas dan menyebar adalah ruwet dipaparkan dan bersifat tidak langsung. Sebagai tambahan teori politiknya, diskusinya di bidang etika dan metafisika telah mempengaruhi banyak filosof yang datang belakangan. Apabila **Plato** ditempatkan pada urutan sedikit lebih rendah ketimbang **Aristoteles** dalam daftar sekarang ini, hal ini terutama lantaran **Aristoteles** bukan saja seorang filosof melainkan pula seorang ilmuwan yang penting. Sebaliknya, penempatan **Plato** lebih tinggi urutannya ketimbang pemikir-pemikir seperti **John Locke**, **Thomas Jefferson** dan **Voltaire**, sebabnya lantaran tulisan-tulisan ihwal politiknya mempengaruhi dunia cuma dalam jangka masa dua atau tiga abad, sedangkan **Plato** punya daya jangkau lebih dari dua puluh tiga abad.

Lebih lanjut **Plato** menjelaskan, legislasi atau penyusunan undang-undang yang hanya melayani kepentingan kelompok dia dianggap sebagai sesuatu yang wajar, namun dia tidak menganggapnya sebagai *legislasi* yang berkualitas hukum sejati. Dalam pernyataan yang mengarah kepada hukum alam, **Plato** menemukan landasan untuk menegaskan bahwa pemerintah hanyalah pelayan hukum.⁹⁶

Segala kebaikan yang telah dipersiapkan oleh **Tuhan** bagi komunitas sejati, yakni kebahagiaan sejati warga negara, hanya bisa diwujudkan dalam negara di mana "*hukum adalah penguasa atas penguasa*", atau dengan kata lain, negara yang pemerintahannya tunduk kepada hukum. Karena hukum merupakan sarana untuk memastikan bahwa manusia tidak hanya hidup namun juga hidup

96 Friedrich Carl Joachim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, OP cit: 22.,

sejahtera (*eu zen*) dan menjadi seluhur mungkin. **Plato** menyatakan, *Bahwa hukum dan perundang-undangan merupakan objek dari spekulasi filosofis yang bebas, dan keduanya hanya bisa diperoleh dari nalar dan gagasan tentang kebaikan. Bahkan hukum yang benar hanyalah perkiraan tentang kebenaran abadi.*⁹⁷

Plato menekankan kepada kebenaran yang di luar dunia ini, hal itu tidak berarti, bahwa ia bermaksud melarikan diri dari dunia. Dunia yang kongkrit ini dianggap penting juga. Hanya saja, hal yang sempurna tidak dapat dicapai di dalam dunia ini. Namun kita harus berusaha hidup sesempurna mungkin. Hal ini tampak ajarannya tentang negara. Dapat dikatakan bahwa seluruh usahanya dimaksudkan untuk memperbaiki negara. Pemikiran filsafat hukum dan negara **Plato** terkait erat dengan etika. Tugas-tugas etis manusia dikaitkan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Persoalan pokok di dalam negara ialah keselamatan para orang yang diperintah, bukan keselamatan para orang yang memerintah. Para orang yang memerintah harus mempersembahkan hidup mereka bagi pemerintahan, dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Tugas para negarawan adalah menciptakan keselarasan antara semua keahlian, agar supaya keselarasan itu terjamin. Umpamanya: jenderal harus pandai berperang, negarawan harus pandai memutuskan bilamana orang harus berperang, hakim harus pandai mengadili yang baik, dan sebagainya.

d. Ajaran (Ilmu) Etika Menurut Plato.

Pendapat **Plato** seterusnya tentang *etik* bersendi ada ajarannya tentang *idea*. Dualisme dunia dalam teori pengetahuan diteruskannya ke dalam praktik hidup. Oleh karena kemauan seorang bergantung kepada pendapatnya, nilai kemauannya itu ditentukan pula oleh pendapat itu.

97 Friedrich Carl Joichim, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Ibid: 23.

dari pengetahuan yang sebenarnya yang dicapai dengan *dialektik* timbul budi yang lebih tinggi daripada yang dibawakan oleh pengetahuan dari pandangan. Jadinya, menurut **Plato** ada 2 macam budi. *Pertama*, budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. *Kedua*, budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak.

Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan, melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam hidup sehari-hari. Negara Ideal dalam pandangan **Pandangan Plato** tentang negara dan luasnya masih terpaut pada masanya. Ia lebih memandang kebelakang dari pada kemuka. Negara Grik di masa itu ialah kota. Jumlah penduduknya tidak lebih daripada dua atau tiga ribu jiwa. Penduduk kota ialah orang-orang merdeka, yang mempunyai milik tanah terletak diluar kota yang dikerjakan oleh budak-budaknya. Diantara mereka terdapat saudagar, tukang, pandai seni dan pejabat negara. Menurut kebiasaan di waktu itu pekerjaan yang kasar dikerjakan oleh budak belian. Mereka itu tidak dianggap sebagai penduduk sebab tidak merdeka.⁹⁸

Plato berpendapat bahwa dalam tiap-tiap negara segala golongan dan segala orang-orang seorang adalah alat semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Kesejahteraan semua itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya. Dan itu pulalah yang menentukan nilai pembagian pekerjaan. Dalam negara yang ideal itu golongan pengusaha menghasilkan, tetapi tidak memerintah. Golongan penjaga melindungi, tetapi tidak memerintah. Golongan cerdik pandai, diberi makan dan dilindungi, dan mereka memerintah. Ketiga macam budi yang dimiliki oleh masing-masing golongan, yaitu bijaksana, berani dan menguasai diri dapat menyelenggarakan dengan kerjasama budi keempat bagi masyarakat, yaitu keadilan.

Ajaran **Plato** tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa, *manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan*

98 Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Op cit: 43.

hidup yang baik ini dapat dicapai dalam suatu polis. Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani Kuno yaitu hidup sebagai manusia serentak juga berarti hidup dalam bermasyarakat, ia menolak bahwa negara hanya berdasarkan *nomos* (adat) kebiasaan saja dan bukan *physis* / kodrat.

Diceritakan dalam sejarah alam pemikiran filsafat Yunani **Plato** tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial, dengan demikian manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau Negara. Menurut **Plato** negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya maka terjadilah suatu spesialisasi bidang pekerjaan, sebab tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu.⁹⁹

Polis atau negara ini dimungkinkan adanya perkembangan wilayah karena adanya penambahan penduduk dan kebutuhanpun bertambah sehingga memungkinkan adanya perang dalam perluasan ini. Dalam menghadapi hal ini maka di setiap negara harus memiliki penjaga-penjaga yang harus di didik khusus.

Ada tiga golongan dalam negara yang baik, yaitu pertama, Golongan Penjaga yang tidak lain adalah para filsuf yang sudah mengetahui yang baik dan kepemimpinan dipercayakan pada mereka. Kedua, Pembantu atau Prajurit. Dan ketiga, Golongan pekerja atau petani yang menanggung kehidupan ekonomi bagi seluruh polis. Plato tidak begitu mementingkan adanya undang-undang dasar yang bersifat umum, sebab menurutnya keadaan itu terus berubah-ubah dan peraturan itu sulit disama-ratakan itu semua tergantung masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Adapun negara yang diusulkan oleh Plato berbentuk demokrasi dengan monarkhi, karena jika hanya monarkhi maka akan terlalu banyak kelaliman, dan jika terlalu demokrasi maka akan terlalu banyak kebebasan, sehingga perlu

⁹⁹ J. J. Von Shimd, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan: Jakarta, 1988, hlm: 10-23.

diadakan penggabungan, dan negara ini berdasarkan pada pertanian bukan perdagangan. Hal ini dimaksudkan menghindari nasib yang terjadi di Athena.

5. Aristoteles.

a. *Sejarah Kelahiran Filsuf Aristoteles.*

Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Macedonia, 384 SM. Ayahnya seorang ahli fisika kenamaan. Pada umur tujuh belas tahun Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi **Plato**. Dia menetap di sana selama dua puluh tahun hingga tak lama **Plato** meninggal dunia. Dari ayahnya, **Aristoteles** mungkin memperoleh dorongan minat di bidang biologi dan “pengetahuan praktis”. Di bawah asuhan **Plato** dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis.¹⁰⁰

Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. Sepuluh jenis kata yang dikenal orang saat ini seperti. Kata kerja, kata benda, kata sifat dan sebagainya merupakan pembagian kata hasil pemikirannya. Dia jugalah yang mengatakan bahwa manusia adalah mahluk sosial. Ayahnya yang bernama **Nicomachus**, seorang dokter di sitana Amyntas III, raja Mecodinia, kakek **Alexander Agung**. Meninggal ketika **Aristoteles** berusia 15 tahun. Karenanya, ia kemudia dipelihara oleh **Proxenus**, pamanya saudara dari ayahnya, pada usia 17 tahun ia masuk akademi milik Plato di Athena. Dari situlah ia kemudian menjadi murid **Plato** selama 20 tahun.¹⁰¹

Dengan meninggalnya **Plato** pada tahun 347 sM. **Aristoteles** meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu ia mendirikan akademi di Assus dan menikah dengan **Pythias** yang tak lama kemudian meninggal. Ia lalu menikah lagi

100 K Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Op cit: 154

101 Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Op cit: 45.

Bab Tiga

Melintasi Etika Profesi Kehidupan Dengan Pisau Analitis Etika Keilmuan

A. Prospek Etika Keilmuan Untuk Etika Profesi.

1. Berkenalan Dengan Etika Keilmuan.

Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak **Rene Descartes** dengan sikap skeptis-metodisnya meragukan segala sesuatu, kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu (*Cogito Ergo Sum*). Sikap ini berlanjut pada masa Aufklarung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman rasional tentang dirinya dan alam. Persoalannya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai.

Bebas nilai yang dimaksudkan adalah sebagaimana **Josep Situmorang**¹³⁷ menyatakan bahwa;

Bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri.

¹³⁷ Lasiyo dan Yuwono, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Liberty: Yogyakarta, 1985.

Paling tidak ada tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu:

1. Ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti: faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya.
2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri.
3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.

Tokoh sosiologi, **Max Weber** menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. **Weber** tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar atau menulis mengenai bidang ilmu sosial itu mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan tertentu atau tidak bias. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan bagian-bagian praktis ilmu sosial jika praktek itu mengandung tujuan atau rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan segelintir orang, budaya, maka ilmuwan sosial tidak beralasan mengajarkan atau menuliskan itu semua. Suatu sikap moral yang sedemikian itu tidak mempunyai hubungan obyektivitas ilmiah.¹³⁸

Tokoh lain **Jürgen Habermas** sebagaimana yang ditulis oleh **Rizal Mustansyir dan Misnal Munir**¹³⁹ berpendirian teori sebagai produk ilmiah tidak pernah bebas nilai. Pendirian ini diwarisi **Habermas** dari

138 **Rizal Mustansyir dan Misnal munir**, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa Kehati-hatian **Weber** dalam memutuskan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, bisa dipahami mengingat disatu pihak obyektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedang di pihak lain subyek yang mengembangkan ilmu dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pemilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya.

139 **Rizal Mustansyir dan Misnal munir**, *Filsafat Ilmu*, Ibid.

pandangan **Husserl** yang melihat fakta atau obyek alam diperlukan oleh ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi. Fakta atau obyek itu sebenarnya sudah tersusun secara spontan dan primordial dalam pengalaman sehari-hari, dalam *Lebenswelt* atau dunia sebagaimana dihayati. Setiap ilmu pengetahuan mengambil dari *Lebenswelt* itu sejumlah fakta yang kemudian diilmiahkan berdasarkan kepentingan-kepentingan praktis.

Habermas menegaskan lebih lanjut bahwa ilmu pengetahuan alam terbentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan teknis. Ilmu pengetahuan alam tidaklah netral, karena isinya tidak lepas sama sekali dari kepentingan praktis. Ilmu sejarah dan hermeneutika juga ditentukan oleh kepentingan-kepentingan praktis kendati dengan cara yang berbeda. Kepentingannya ialah memelihara serta memperluas bidang aling pengertian antar manusia dan perbaikan komunikasi. Setiap kegiatan teoritis yang melibatkan pola subyek-subyek selalu mengandung kepentingan tertentu. Kepentingan itu bekerja pada tiga bidang yaitu pekerjaan, bahasa, dan otoritas. Pekerjaan merupakan kepentingan ilmu pengetahuan alam, bahasa merupakan kepentingan ilmu sejarah dan hermeneutika, sedang otoritas merupakan kepentingan ilmu sosial.

Ruang lingkup dalam ilmu, berupaya untuk mengungkapkan realitas sebagaimana adanya, sedangkan moral (etika) pada dasarnya adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif-alternatif untuk membuat keputusan politik dengan berkiblat kepada pertimbangan-pertimbangan moral.

Bagaimana kaitannya antara etika dengan keilmuan, mak dalam hal ini, ilmuwan mempunyai tanggung jawab profesional, khususnya di dunia ilmu dan dalam masyarakat ilmuwan itu sendiri dan mengenai metodologi yang dipakainya. Ilmuwan juga memikul tanggung jawab sosial, yang bisa dibedakan atas tanggung jawab legal yang formal

sifatnya, dan tanggung jawab moral yang lebih luas cakupannya.¹⁴⁰

Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup yang menjadi obyek penelaahan serta penafsiran tentang hakekat realitas dari obyek penelaahan tersebut. Epistemologi merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Aksiologi merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut.

Agar mendapatkan pengertian yang jelas mengenai kaitan antara ilmu dan moal maka kajiannya harus didekati dari ketiga komponen tiang penyangga tubuh pengetahuan yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi. Namun sebelum sampai pendekatan dari ketiga hal tersebut dibahas dahulu tentang antara etika, moral, norma dan kesusilaan, kemudian pengertian dan ciri-ciri ilmu. Bahasan ditutup dengan bagaimana sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan.

2. Problema Etika Ilmu Pengetahuan.

Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis, merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan

140 Untuk memahami landasan dasar antara etika dengan keilmuan, maka dapat dikatakan Ilmu dan moral termasuk ke dalam *genus* pengetahuan yang mempunyai karakteristik masing-masing. Tiap-tiap pengetahuan mempunyai tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi dan aksiologi. Lihat dalam: **Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Buku IA Filsafat Ilmu**, Jakarta, 1984-1985, hlm: 88.

teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.

Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu, sekarang maupun apa akibatnya bagi masa depan berdasar keputusan-keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti ada yang dapat mengubah sesuatu aturan baik alam maupun manusia. Hal ini tentu saja menuntut tanggung jawab untuk selalu menjaga agar apa yang diwujudkan dalam perubahan tersebut akan merupakan perubahan yang terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri maupun bagi perkembangan eksistensi manusia secara utuh.¹⁴¹

Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Tetapi harus menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungannya sebagai pribadi, dalam hubungan dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Khaliknya.

Jadi sesuai dengan pendapat **Van Melsen**¹⁴² bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaan manusia tergantung pada manusianya itu sendiri, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dalam kebudayaannya.

Kemajuan di bidang teknologi memerlukan kedewasaan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan untuk mengerti mana yang layak dan yang tidak layak, yang buruk dan yang baik.

141 **Achmad Charris Zubair**, *Dimensi Etik dan Asketik ilmu Pengetahuan Manusia : Kajian Filsafat Ilmu*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI): Yogyakarta, 2002.

142 **Van Melsen, A.G.M.**, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, PT Gramedia, Jakarta, 1985, Terjemahan **K. Bertens**, Judul asli "*Wetenschap en Verantwoordelijkheid*".

Tugas terpenting ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menyediakan bantuan agar supaya manusia dapat sungguh-sungguh mencapai pengertian tentang martabat dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja sarana untuk mengembangkan diri manusia saja tetapi juga merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia itu sendiri.

3. Pendekatan Ontologis dalam Keilmuan.

Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Dalam kaitan dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang obyek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana ujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?¹⁴³

Secara ontologis ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Obyek penelaahan yang berada dalam batas pra-pengalaman dan pasca-pengalaman diserahkan ilmu kepada pengetahuan lain. Ilmu hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas-batas ontologis tertentu. Penetapan lingkup batas penelaahan keilmuan yang bersifat empiris ini adalah konsisten dengan asas epistemologi keilmuan yang mensyaratkan adanya verifikasi secara empiris dalam proses penemuan dan penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah.¹⁴⁴

Dalam kaitannya dengan kaidah moral bahwa dalam menetapkan obyek penelaahan, kegiatan keilmuan tidak boleh melakukan upaya yang bersifat merubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia dan mencampuri permasalahan kehidupan. Di samping itu secara ontologis ilmu bersifat netral terhadap nilai-nilai yang bersifat dogmatik

143 Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Op cit: 34.

144 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op cit: 88-90.

dalam menafsirkan hakekat realitas sebab ilmu merupakan upaya manusia untuk mempelajari alam sebagaimana adanya.

4. Pendekatan Epistemologi dalam Keilmuan.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal, sumber, metode, struktur dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Dalam kaitan dengan ilmu, landasan epistemologi mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? ¹⁴⁵

Landasan epistemologi ilmu tercermin secara operasional dalam metode ilmiah. Pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan:

1. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun;
2. Menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut dan;
3. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual.

Kerangka pemikiran yang logis adalah argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan penjelasan terhadap fenomena alam. Verifikasi secara empiris berarti evaluasi secara obyektif dari suatu pernyataan hipotesis terhadap kenyataan faktual. Verifikasi ini berarti bahwa ilmu terbuka untuk kebenaran lain selain yang terkandung dalam hipotesis. Demikian juga verifikasi faktual membuka diri

¹⁴⁵ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Op cit: 34-37.

terhadap kritik terhadap kerangka pemikiran yang mendasari pengajuan hipotesis. Kebenaran ilmiah dengan keterbukaan terhadap kebenaran baru mempunyai sifat pragmatis yang prosesnya secara berulang (siklus) berdasarkan cara berfikir kritis.

Dalam kaitan dengan moral maka dalam proses kegiatan keilmuan setiap upaya ilmiah harus ditujukan untuk menemukan kebenaran, yang dilakukan dengan penuh kejujuran, tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual. Jadi ilmu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan membenci kebohongan.

5. Pendekatan Aksiologi dalam Keilmuan.

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik, prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional?¹⁴⁶

Pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini maka ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia dan kelestarian/keseimbangan alam.

Untuk kepentingan manusia tersebut maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal berarti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama, setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi ras, ideologi atau agama.

146 Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Ibid: 34-37.

6. Sikap Ilmiah yang harus Dimiliki Ilmuwan.

Ilmu bukanlah merupakan pengetahuan yang datang demikian saja sebagai barang yang sudah jadi dan datang dari dunia khayal. Akan tetapi ilmu merupakan suatu cara berpikir yang demikian dalam tentang sesuatu obyek yang khas dengan pendekatan yang khas pula sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang ilmiah. Ilmiah dalam arti bahwa sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Disebabkan oleh karena itu pula ia terbuka untuk diuji oleh siapapun.

Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang di dalam dirinya memiliki karakteristik kritis, rasional, logis, obyektif, dan terbuka. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi seorang ilmuwan untuk melakukannya. Namun selain itu juga masalah mendasar yang dihadapi ilmuwan setelah ia membangun suatu bangunan yang kokoh kuat adalah masalah kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Memang tak dapat disangkal bahwa ilmu telah membawa manusia kearah perubahan yang cukup besar. Akan tetapi dapatkah ilmu yang kokoh, kuat, dan mendasar itu menjadi penyelamat manusia bukan sebaliknya. Disinilah letak tanggung jawab seorang ilmuwan, moral dan akhlak amat diperlukan. Oleh karenanya penting bagi para ilmuwan memiliki sikap ilmiah.

Manusia sebagai makhluk Tuhan berada bersama-sama dengan alam dan berada di dalam alam itu. Manusia akan menemukan pribadinya dan membudayakan dirinya bilamana manusia hidup dalam hubungannya dengan alamnya. Manusia yang merupakan bagian alam tidak hanya merupakan bagian yang terlepas darinya. Manusia senantiasa berintegrasi dengan alamnya. Sesuai dengan martabatnya maka manusia yang merupakan bagian alam harus senantiasa merupakan pusat dari alam itu. Dengan demikian, tampaklah bahwa diantara manusia dengan alam ada hubungan yang bersifat keharusan dan mutlak. Oleh sebab itulah, maka manusia harus senantiasa menjaga

kelestarian alam dalam keseimbangannya yang bersifat mutlak pula. Kewajiban ini merupakan kewajiban moral tidak saja sebagai manusia biasa lebih-lebih seorang ilmuwan dengan senantiasa menjaga kelestarian dan keseimbangan alam yang juga bersifat mutlak.

Para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah barang tentu mereka juga perlu memiliki visi moral yaitu moral khusus sebagai ilmuwan. Moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah.¹⁴⁷

Sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Hal ini disebabkan oleh karena sikap ilmiah adalah suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat obyektif. Sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, melainkan bagaimana cara untuk mencapai suatu ilmu yang bebas dari prasangka pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial untuk melestarikan dan keseimbangan alam semesta ini, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya selaras dengan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan.

Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut **Abbas Hamami M.**, sedikitnya ada enam, yaitu:

1. Tidak ada rasa pamrih (*disinterestedness*), artinya suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang obyektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi.
2. Bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap pelbagai hal yang dihadapi. Misalnya hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau , cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasi.
3. Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi (mind).

147 **Abbas Hamami M.**, *Filsafat (Suatu Pengantar Logika Formal – Filsafat Pengetahuan)* Yogyakarta, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM, 1976, (Diktat), hlm: 161-167

4. Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan (*belief*) dan dengan merasa pasti (*conviction*) bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian.
5. Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset, dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya.
6. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis (akhlak) yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara.

Norma-norma umum bagi etika keilmuan sebagaimana yang dipaparkan secara normatif berlaku bagi semua ilmuwan. Hal ini karena pada dasarnya seorang ilmuwan tidak boleh terpengaruh oleh sistem budaya, sistem politik, sistem tradisi, atau apa saja yang hendak menyimpangkan tujuan ilmu. Tujuan ilmu yang dimaksud adalah objektivitas yang berlaku secara universal dan komunal.

Disamping sikap ilmiah berlaku secara umum tersebut, pada kenyataannya masih ada etika keilmuan yang secara spesifik berlaku bagi kelompok-kelompok ilmuwan tertentu. Misalnya, etika kedokteran, etika bisnis, etika politisi, serta etika-etika profesi lainnya yang secara normatif berlaku dan dipatuhi oleh kelompoknya itu. Taat asas dan kepatuhan terhadap norma-norma etis yang berlaku bagi para ilmuwan diharapkan akan menghilangkan kegelisahan serta ketakutan manusia terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahkan diharapkan manusia akan semakin percaya pada ilmu yang membawanya pada suatu keadaan yang membahagiakan dirinya sebagai manusia. Hal ini sudah barang tentu jika pada diri para ilmuwan tidak ada sikap lain kecuali pencapaian obyektivitas dan demi kemajuan ilmu untuk kemanusiaan.

Yang perlu diperhatikan bagi para ilmuwan khususnya di Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya etika keilmuan dijelaskan bahwa etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan mengharagai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

B. Etika Profesi Kehidupan Manusia.

1. Antara Manusia Dan Kebutuhannya.

Mengapa manusia harus bekerja? Benarkah hanya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya? Atau karena memiliki alasan lain, tidak sekedar memenuhi kebutuhan hidup? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dilontarkan untuk memahami hakikat manusia sebagai makhluk yang bekerja, bahwa terlepas sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia adalah makhluk pekerja. Sebagai makhluk yang istimewa, untuk melengkapi kehidupannya manusia harus

bekerja keras dan berkarya. Karya tersebut dilakukan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupannya.

Bicara tentang kebutuhan manusia, **W. MacDougall** dalam bukunya *Introduction to Social Psychology*¹⁴⁸ berpendapat bahwa ada paling sedikit tujuh macam dorongan naluri manusia, yaitu :

1. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini memang merupakan suatu kekuatan biologi yang juga ada pada semua makhluk di dunia ini dan yang menyebabkan bahwa semua jenis makhluk mampu mempertahankan hidupnya di muka bumi ini.
2. Dorongan sex. Dorongan ini malahan telah menarik perhatian banyak ahli psikologi, dan berbagai teori telah dikembangkan sekitar soal ini. Suatu hal yang jelas adalah bahwa dorongan ini timbul pada setiap individu yang normal tanpa terkena pengaruh pengetahuan, dan memang dorongan ini mempunyai landasan biologi yang mendorong makhluk manusia untuk membentuk keturunan yang melanjutkan jenisnya.
3. Dorongan untuk usaha mencari makan. Dorongan ini tidak perlu dipelajari, dan sejak bayi pun manusia sudah menunjukkan dorongan untuk mencari makan, yaitu dengan mencari susu ibunya atau botol susunya, tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan tentang adanya hal-hal itu tadi.
4. Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia. Dorongan ini memang merupakan landasan biologi dari kehidupan masyarakat manusia sebagai makhluk kolektif.
5. Dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Dorongan ini merupakan sumber dari adanya beraneka warna kebudayaan di

¹⁴⁸ **Koentjaraningrat**, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru: Jakarta, 1986. Berlainan dengan **W. MacDougall**, ahli lainnya **AFC Wallace**, seorang ahli *etnopsikologi* dalam bukunya *Culture and Personality* berpendapat bahwa ada dua kebutuhan manusia yakni kebutuhan organik dan kebutuhan psikologi. Kebutuhan organik: makan dan minum, istirahat dan tidur, sex, keseimbangan suhu, buang hajat, dan bernafas. Kebutuhan psikologi: pengendalian ketegangan dan bersantai, kemesraan dan cinta, kepuasan altruistik (kesempatan berbuat baik atau berbakti kepada orang lain), kepuasan ego, kehormatan, kepuasan dan kebanggaan mencapai tujuan.

anatar makhluk manusia karena adanya dorongan ini manusia mengembangkan adat yang memaksanya berbuat konform dengan manusia sekitarnya.

6. Dorongan untuk berbakti. Dorongan ini mungkin ada dalam naluri manusia, karena manusia merupakan makhluk, yang hidup kolektif, sehingga untuk dapat hidup bersama dengan manusia lain secara serasi ia perlu mempunyai suatu landasan biologi untuk mengembangkan rasa altruistik, rasa simpati, rasa cinta dan sebagainya, yang memungkinkannya hidup bersama itu.
7. Dorongan akan keindahan, dalam arti keindahan bentuk, warna, suara, atau gerak.

Abdulkadir Muhammad¹⁴⁹ mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi empat kelompok sebagai berikut:

1. Kebutuhan ekonomi (material). Kebutuhan ekonomi merupakan yang bersifat material, baik harta maupun benda yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Kebutuhan ini misalnya sandang, pangan dan papan.
2. Kebutuhan psikis (non-materi). Kebutuhan psikis, merupakan kebutuhan yang bersifat non-material untuk kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi, biasa juga disebut kebutuhan rohani seperti misalnya agama, pendidikan, hiburan, dan lain-lain.
3. Kebutuhan biologis (proses regenerasi). Kebutuhan biologi, merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kebutuhan ini sering disebut juga kebutuhan seksual yang diwujudkan dalam perkawinan, membentuk keluarga dan lain sebagainya.

¹⁴⁹ **Abdulkadir Muhammad**, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Seribu: Jakarta, 1997. Periksa juga dalam; **Teguh Wahyono**, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, ANDI: Yogyakarta, 2006, hlm: 44-47.

4. Kebutuhan pekerjaan (kebutuhan akan status dan derajat). Kebutuhan pekerjaan, merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan pekerjaan ini misalnya adalah profesi, perusahaan dan lain sebagainya.

2. Istilah-Istilah Dasar Profesi.

a. *Pekerjaan, Profesi Dan Profesional.*

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Sebagai contoh, seorang petugas staf administrasi tidak masuk dalam golongan profesi karena untuk bekerja sebagai staf administrasi seseorang bisa berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus sesuai dengan bidangnya dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun.

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai ketrampilan tersebut. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui ketrampilannya sesuai perkembangan teknologi.

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.

Bulle dalam **Teguh Wahyono**¹⁵⁰ mendefinisikan bahwa; *profesi adalah sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat*. Definisi ini meliputi tiga aspek, yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan/kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum.

Dari beberapa uraian mengenai profesi di atas, dapat diberikan beberapa catatan tentang profesi sebagai berikut:

1. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan ketrampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya.
2. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya.
3. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui ketrampilannya sesuai perkembangan teknologi.

Kemudian, dari berbagai pengalaman tentang profesi, tercatat dua hal tentang profesi khusus yang dibedakan dari profesi-profesi pada umumnya. Dua kategori yang dianggap sebagai profesi khusus tersebut adalah profesi yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan profesi yang merupakan profesi luhur dan menekankan pengabdian.

150 **Teguh Wahyono**, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Ibid: 48-50. Berdasarkan pendapatnya Teguh Wahyono tersebut, penulis mengartikan Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi perbedaan antara profesi dan pekerjaan pada umumnya ialah bahwa profesi memiliki keahlian yang khas. Diantara profesi-profesi pada umumnya terdapat profesi-profesi yang khusus. Kekhususannya ialah bahwa hakikatnya terjadi dalam suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Jadi meskipun orang yang menjalankan profesi itu hidup daripadanya – itu haknya; ia dan keluarganya harus hidup – akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaan untuk melayani sesama. Profesi-profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pengabdian itu disebut **profesi luhur**.

b. Istilah Profesi dan Profesional.

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, maka timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.¹⁵¹

Profesi bisa dikatakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

Jadi perbedaan antara profesi dan profesional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

151 Profesi sering kita artikan dengan "pekerjaan" atau "job" kita sehari-hari. Tetapi dalam kata *profession* yang berasal dari perbendaharaan Anglo Saxon tidak hanya terkandung pengertian "pekerjaan" saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti "*profession*" terpaku juga suatu "panggilan". Dengan begitu, maka arti "*profession*" mengandung dua unsur. Pertama unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang "profesional" harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi "profesional". Kedua-duanya harus menyatu.

Perbedaan Profesi & Profesional

<ol style="list-style-type: none">1. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus;2. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu);3. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup;4. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.	<ol style="list-style-type: none">1. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.2. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.3. Hidup dari situ.4. Bangga akan pekerjaannya
---	--

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain

pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Berkaitan dengan *profesionalisme* ini ada dua pokok yang menarik perhatian dari keterangan *Encyclopedia Talcoot Parson*, mengenai profesi dan profesionalisme itu.

1. Bahwa manusia-manusia profesional tidak dapat di golongan sebagai kelompok “kapitalis” atau kelompok “kaum buruh”. Juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok “administrator” atau “birokrat”.
2. Bahwa manusia-manusia profesional merupakan suatu kelompok tersendiri, yang bertugas memutar roda perusahaan, dengan suatu *leadership* status. Jelasnya mereka merupakan lapisan kepemimpinan dalam memutar roda perusahaan itu. Kepemimpinan di segala tingkat, mulai dari atasan, melalui yang menengah sampai ke bawah.

Profesionalisme merupakan suatu proses yang tidak dapat di tahan-tahan dalam perkembangan dunia perusahaan modern dewasa ini. **Talcoot Parsons** tidak tahu arah lanjut proses *profesionalisasi* itu nantinya, tapi menurutnya, bahwa keseluruhan kompleks profesionalisme itu tidak hanya tampil ke depan sebagai sesuatu yang terkemuka, melainkan juga sudah mulai mendominasi situasi sekarang.

Dalam perkembangannya perlu diingat, bahwa *profesionalisme* mengandung dua unsur, yaitu unsur keahlian dan unsur panggilan, unsur kecakapan teknik dan kematangan etik, unsur akal dan unsur moral. Dan kedua-duanya itulah merupakan kebulatan unsur kepemimpinan. Dengan demikian, jika berbicara tentang profesionalisme

tidak dapat kita lepaskan dari masalah kepemimpinan dalam arti yang luas.

Menurut **Soegito Reksodihardjo** arti yang diberikan kepada kata “*profes*” adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Meskipun lazimnya profesi dikaitkan dengan tarap lulusan akademi atau universitas, suatu profesi tidak mutlak harus dijalankan oleh seorang sarjana. Di dalam masyarakat Indonesiapun kita telah mengenal berbagai profesi non-akademik, seperti misalnya, profesi bidan, pemain sepak bola, atau petinju “profesional”, dan bahkan “profesi tertua di dunia”.

Walaupun obyek yang ditangani dapat berupa orang atau benda fisik, yang menjadi penilaian orang tentang suatu profesi ialah hasilnya, yaitu tentang mutu jasa atau baik buruk penanganan fungsinya. Dalam situasi yang penuh tantangan dan persaingan ketat seperti sekarang ini, kunci keberhasilan profesi terletak pada taraf kemahiran orang yang menjalankan.

Taraf kemahiran demikian hanya dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih sampai tingkat kesempurnaan yang dipersyaratkan untuk itu tercapai. Dalam proses ini tidak terpat jalan pintas.

Bagi seseorang yang berbakat dan terampil, proses itu mungkin dapat terlaksana secara lebih baik atau lebih cepat dari pada orang lain yang kurang atau tidak memiliki kemampuan itu. Bagi golongan terakhir ini, apabila mereka tidak bersedia untuk bersusah payah melebihi ukuran biasa untuk menguasai sesuatu kejujuran, pilihan terbaik ialah untuk mencari profesi lain yang lebih sesuai dengan bakat mereka.

Dalam lapangan kerja, atasan seharusnya menilai kemampuan orang bukan semata-mata atas dasar diploma atau gelarnya, tetapi atas dasar kesanggupannya untuk mewujudkan prestasi berupa kemajuan nyata dengan modal pengetahuan yang ada padanya. Dalam praktek, kita jumpai bahwa tidak semua orang mampu mendayagunakan pengetahuannya dalam pekerjaan. Tidak jarang kita jumpai seorang

sarjana yang mampu bekerja secara rutin. Sebaliknya seorang non-sarjana yang kreatif ternyata mampu memberi bukti kesanggupan berkembang dan menambah aneka bentuk faedah baru dengan dasar pengetahuannya yang relatif masih terbatas itu.

Diploma dan gelar bukan jaminan prestasi seseorang. Prestasi harus diukur di satu pihak dengan hasil yang diperoleh dari seseorang dan di lain pihak dengan tolak ukur yang dikaitkan dengan kemampuan yang semestinya ada pada orang itu. Diploma hanya memberi harapan tentang adanya kemampuan itu, tetapi kemampuan nyata harus dibuktikan melalui hasil penerapan pengetahuan yang ditandai dengan diploma tadi dalam pekerjaannya.

Untuk memperoleh kemampuan demikian, pengamalan merupakan guru yang terbaik. Tanpa kesanggupan untuk menarik pelajaran dari pengalamannya, seseorang tidak akan mengalami proses kemajuan dan pematangan dalam pekerjaan. Orang yang sudah puas dengan perolehan tanda lulus atau gelar saja dan tidak meneruskan proses belajarnya dari praktek bekerja, akan mengalami kemunduran dalam dunia yang dinamis ini dan akan tertinggal dari yang lain.

Di bawah ini dikemukakan beberapa ciri *profesionalisme*:

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan mutu;
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan;
3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai;
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergo-yahkan oleh "keadaan terpaksa" atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup;
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Ciri di atas menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi seorang pelaksana profesi yang profesional, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang mendasarinya. Lebih jelas lagi di kemukakan oleh **Tjerk Hooghiemstra**¹⁵² bahwa seorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya.

Perlu dibedakan antara unjuk kerja superior dengan rata-rata. Kompetensi dapat berupa *motiv*, sifat, konsep diri pribadi, *attitude* atau nilai-nilai, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan dan berbagai sifat-sifat seseorang yang dapat diukur dan dapat menunjukkan perbedaan antara rata-rata dengan superior.¹⁵³

c. Hubungan antara profesi pada umumnya dan profesi luhur.

Ada dua prinsip etika profesi pada umumnya. Yakni setiap pemegang profesi harus dituntut agar ia menjalankan secara bertanggung jawab, dan agar ia tidak melanggar hak-hak pihak lain.

Pemegang profesi bertanggung jawab dalam dua arah, yaitu:¹⁵⁴

1. Kita diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan dan terhadap hasilnya. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu ini mempunyai beberapa segi. Kita harus mengusahakan agar kita

152 Kompetensi menurut **Tjerk Hooghiemstra**, Hay group, The Netherlands pada tulisannya yang berjudul *"Integrated Management of Human Resources"*; Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang yang berhubungan dengan unjuk kerja yang efektif atau superior pada jabatan tertentu.

153 Apa yang dikemukakan oleh **Lyle M. Spencer** dalam bukunya berjudul *"Competence at Work"* tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan **Tjerk Hooghiemstra** sebelumnya; Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang yang berhubungan dengan atau menghasilkan unjuk kerja yang efektif dan atau superior pada jabatan tertentu atau situasi tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Karakteristik pokok mempunyai arti kompetensi yang sangat mendalam dan merupakan bagian melekat pada pribadi seseorang dan dapat menyesuaikan sikap pada berbagai kondisi atau berbagai tugas pada jabatan tertentu. Ada lima karakteristik kompetensi: *motiv*, *sikap*, *konsep diri* (*attitude*, *nilai-nilai* atau *imaginasi diri*), *pengetahuan* dan *keterampilan*.

154 **Franz Magnis Suseno**, *Etika Dasar*, Op cit: 34.

sendiri menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar kita kompeten. Kita harus terus-menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang kita jalankan. Cara kita bekerja harus efisien dan efektif. Hasil pekerjaan kita harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang dapat diharapkan oleh pemakai/orang yang akan memanfaatkannya.

2. Kita harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain. Kepentingan langganan, lingkungan, ancaman potensial terhadap lingkungan alamiah, kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara; semuanya itu perlu diperhatikan

Pemegang profesi harus hormat terhadap hak orang lain. Prinsip ini tak lain adalah tuntutan keadilan. Keadilan menuntut agar kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam rangka pelaksanaan sebuah profesi tuntutan keadilan itu berarti: di dalam pelaksanaannya kita tidak boleh melanggar hak orang, atau lembaga lain, atau pun hak negara.

Jadi tuntutan etika profesi dapat dirumuskan dalam sebuah prinsip tanggung jawab sebagai berikut: *dalam segala usaha bertindaklah sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat tindakan tidak dapat merusak, bahkan tidak dapat membahayakan atau mengurangi mutu kehidupan manusia dalam lingkungannya, baik mereka yang hidup pada masa sekarang, maupun generasi-generasi yang akan datang.*

Menurut **Franz Magnis Suseno**¹⁵⁵ ada dua prinsip etika profesi luhur, yakni:

1. Mendahulukan kepentingan pasien/klien.
Tuntutan dasar etika profesi luhur yang pertama ialah agar profesi itu dijalankan tanpa pamrih. Itu tidak berarti bahwa dokter atau penasehat hukum tidak boleh minta pembayaran dari pasien/

155 Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Ibid: 34.

kliennya. Ia berhak agar dapat hidup dari profesinya. Tetapi pembayaran itu tidak menjadi tujuan pelaksanaan profesi. Jadi ia diharapkan menjalankan profesi demi kebaikan pasien/klien.

2. Pengabdian pada tuntutan luhur profesi.

Etika profesi luhur menuntut agar tuntutan profesi tetap dipegang walaupun bertentangan dengan keinginan pasien. Oleh karena itu banyak profesi luhur memiliki kode etik. Kode etik adalah kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktekannya. Kode etik tidak dapat ditetapkan dari luar, misalnya oleh pemerintah, melainkan harus ditetapkan oleh para pelaku profesi itu sendiri. Jadi etika profesi luhur menuntut agar orang yang menjalankannya, dalam keadaan apa pun menjunjung tinggi tuntutan profesinya.

Tuntutan etika profesi luhur jelas sekali menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Terutama ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi luhur, yakni:

1. Berani berbuat dengan bertekad.

Pertama dituntut agar ia bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Artinya, harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Ia bukan orang yang mengikuti perasaan dan emosinya saja, jadi yang diselewengkan dari kewajiban oleh perasaan malu, malas, takut, sentimen, benci, orang yang asal diperintah oleh atasan, melupakan kewajibannya. Jadi, ia mesti orang bertekad yang tidak mundur dari apa yang diketahui merupakan kewajibannya, meskipun ia ditekan atau diancam.

2. Kesadaran berkewajiban.

Profesi harus mempunyai kesadaran tajam tentang tuntutan etika profesinya. Artinya, ia mentaatinya tidak hanya sebagai hobi, atau karena rekan-rekan profesi juga mentaatinya, melainkan karena yakin sedalam-dalamnya bahwa tuntutan etika profesi itu merupakan kewajiban yang berat.

3. Idealisme.

Semua tuntutan-tuntutan etika profesi luhur hanya dapat dipenuhi oleh orang yang memiliki idealisme. Idealisme dalam arti bahwa ia sungguh-sungguh, tanpa pamrih, mau melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya. Orang yang hanya pragmatis, apalagi yang hanya mencari kepentingannya sendiri tidak memadai bagi profesi luhur.

3. Syarat Sebuah Profesi Kehidupan.

Sebagaimana pengalaman penulis yang berprofesi sebagai birokrat sekaligus merangkap seorang dosen, penulis dan pengamatan, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh profesional dalam menjalankan profesinya, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.
- d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- e. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut:

1. Menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Sebuah profesi akan mengandalkan suatu pengetahuan khusus yang dimiliki oleh sekelompok profesional agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang yang profesional adalah seseorang yang menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, tidak setengah-setengah atau

sekedar tahu saja sehingga benar-benar memahami hakikat pekerjaan yang ditekuninya.

2. Mampu mengkonversi ilmu menjadi ketrampilan. Ketrampilan berarti dapat melakukan praktik-praktik atau kegiatan khusus sesuai tugas dan pekerjaannya dengan baik. Orang yang profesional adalah orang yang tidak sekedar tahu banyak hal tentang sebuah 'teori', tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan yang dilakukan.
3. Selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Biasanya pada setiap profesi, khususnya profesi luhur atau profesi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terdapat suatu aturan yang disebut 'kode etik' profesi. Misalnya ada kode etik pengacara, kode etik kedokteran, kode etik wartawan dan sebagainya. Kode etik tersebut merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan.¹⁵⁶

Seorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Untuk menjadi seorang yang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut:

1. Komitmen tinggi. Seorang profesional harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukannya.
2. Tanggung jawab. Seorang profesional juga harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri.
3. Berpikir sistematis. Seorang profesional harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.

156 Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, Op cit: 50-51.

4. Penguasaan materi. Seorang profesional harus menguasai secara mendalam bahan/materi pekerjaan yang sedang dilakukannya.
5. Menjadi bagian masyarakat profesional. Seyogyanya seorang profesional harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya.

Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu "profesi". Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.

4. Prinsip Dasar Etika Profesi.

Pada dasarnya setiap orang penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesinya, hasil dan dampaknya yang ditimbulkan tersebut terapat dua arti:

1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (*by function*), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standard profesi, efisien dan efektif;
2. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi (*by profession*) tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi / perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna yang baik bagi dirinya atau pihak lainnya. Prinsipnya, sebagai profesional harus berbuat yang baik (*beneficence*) dan tidak untuk berbuat sesuatu kejahatan (*non maleficence*).

Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi tetap memiliki komitmen

dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional.

Kemudian setelah bertanggungjawab, prinsip dasar selanjutnya adalah Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui akan kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Dalam menjalankan profesinya, maka setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Di samping itu harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan nama baik, martabat dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara obyektif dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip dasar etika profesi yang terakhir adalah Otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuannya, organisasi dan departemen yang dipimpinnya itu melakukan kegiatan operasional atau kerja yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apa pun yang dilakukannya itu adalah merupakan konsekuensi dari tanggung jawab profesi, kebebasan, otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bagi setiap profesional.

5. Manfaat Mempelajari Etika Profesi.

Etika profesi pada awalnya terbentuk guna kepentingan kelompok profesi itu sendiri karena bermula dari pemasalahan-permasalahan yang timbul, dalam perkembangannya sesuai dengan situasi dan kondisi ilmu pengetahuan filsafat yang terkait dengan etika maka berkembang menjadi lebih maju sesuai dengan hasil penelitian empiris yang

didukung oleh norma yang ada diperoleh suatu hipotesa dan sampailah pada hasil akhir profesi guna kepentingan masyarakat dengan konsekuensi logis etika profesi merefleksikan kinerjanya secara etis atas kebutuhan masyarakat.

Etika profesi merupakan bagian dari kebutuhan profesi dalam sistem pergulatan profesi baik diantara profesi itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang makin majemuk, mengglobal, berkembang maju baik bidang ekonomi, teknologi, serta bidang yang lain. Komunikasi antar daerah maupun negara makin cepat membuktikan mobilitas masyarakat makin meningkat dan tidak terkendali. Seiring dengan hal tersebut maka peran profesi makin dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas dari profesi harus makin meningkat guna mengimbangi kemajuan jaman serta kuantitas dari bertambahnya jenis kebutuhan penanganan oleh profesi akibat kemajuan dari berbagai bidang merupakan tantangan profesi yang harus didukung perangkat etika profesi yang memadai sebagai suatu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab etika profesi tidak dapat lepas dari manfaat etika profesi.

Adapun manfaat etika profesi dalam perkembangan terdiri dari:

1. Manfaat terhadap diri sendiri. Penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik;
2. Manfaat terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain;
3. Manfaat terhadap negara. Penyandang profesi dapat berperan serta memajukan negara dengan keahlian bidang tertentu yang dimilikinya. Segala bidang dalam aktifitas negara saling terkait, apabila segala bidang kehidupan dapat berjalan dengan maksimal maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang menjadi maju yang berdampak pada kemajuan negara.

4. Manfaat terhadap hukum. Negara kita adalah negara hukum dan hukum sebagai panglima yang tertinggi. Profesi pada bidangnya masing-masing tetap hukum menjadi panutan bagi profesi sesuai pandangan segala segi kehidupan harus berpatokan pada hukum yang berlaku. Profesi hukum merupakan profesi yang terdepan dalam berupaya menegakkan hukum berfungsi sebagai panutan bagi profesi selain hukum dan masyarakat.

Emmanuel levinas menyatakan *respondeo ergo sum* (aku bertanggung jawab, jadi aku ada). Setiap orang memiliki kebebasan baik secara natural maupun secara yuridis untuk menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari termasuk memilih pekerjaan / profesi yang akan digeluti. Kebebasan tersebut menimbulkan konsekuensi logis terhadap dampak positif maupun negatif yang harus diterima dengan analogi segala langkah kehidupan tidak dapat lepas dari efek positif dan efek negatif. Tanggung jawab tidaklah dapat lepas dari akibat kebebasan memilih yang harus diterima dengan lapang dada.

Kebebasan tidaklah dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya mengingat kebebasan dapat menyentuh hak hukum atau kebebasan orang lain. Kebebasan harus diartikan sebagai kebebasan hukum yakni kebebasan sesuai ketentuan hukum yang berupaya mengcover moral , hukum kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajibannya dan yang tak kalah pentingnya tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Tanggung jawab oleh sebagian ahli hukum diartikan sebagai tanggung gugat. Tanggung gugat sebenarnya merupakan tanggung jawab atas tuntutan hukum, tapi disisi lain terdapat tanggung jawab moral yang tidak dapat digantikan oleh tanggung gugat secara hukum, bahkan moral pertanggungjawabannya diwakilkan pada kode etik melalui Dewan Kehormatan. Terdapat pertanggungjawaban lain

yang tidak dapat terselesaikan yaitu tanggung jawab hati nurani serta dampaknya terhadap nama baik penyandang profesi.

6. Organisasi Penindakan dan Pengawasan Etika Profesi.

Organisasi merupakan kelompok dari sebagian masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama serta berinteraksi sosial dalam organisasi dengan didukung oleh perangkat aturan demi kepentingan organisasi maupun kepentingan masyarakat. Pendapat serupa juga dikemukakan **Max Weber**.¹⁵⁷

organisasi atau kelompok kerja sama merupakan suatu hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsi yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasinya.

Aspek dari pengertian dimaksud oleh **Max Weber** ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.

1. Organisasi mempunyai batas-batas tertentu (*boundaries*) sehingga seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu;
2. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama didalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja;
3. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian

157 Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*,

kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hierarki (*hierachy*). Konsekuensi dari adanya hierarki ini bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf.

Pendapat Max Weber lebih condong kearah interaksi, struktur organisasi, serta pentingnya aturan dalam organisasi, sedangkan Kelompok masyarakat tidak akan membentuk suatu organisasi tanpa adanya kehendak yang sama serta yang terpenting mempunyai tujuan organisasi yang akan dicapai demi kepentingan bersama yang juga merupakan kepentingan anggota juga, bahkan yang dikatakan sebagai tujuan organisasi merupakan motivasi awal terbentuknya suatu organisasi, sedangkan Amitai Etziomi yang dikutip oleh Miftah Thoha mengemukakan bahwa: organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok semacam ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai pembagian kerja, kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang dikomunikasikan. Pembagian ini tidaklah dikomunikasikan. Pembagian ini tidak dilakukan secara acak (*random*) melainkan sengaja dilakukan untuk meningkatkan usaha mencapai tujuan tertentu;
2. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan dan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Pusat kekuasaan ini juga harus dapat dipergunakan untuk menilai kembali secara ajek pelaksanaan organisasi, dan menyempurnakan struktur yang dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi; dan
3. Adanya suatu pergantian kepegawaian, misalnya seseorang yang cara kerjanya tidak memuaskan dapat dipindahkan dan diganti oleh orang lain. Dalam organisasi juga dapat dilakukan usaha

memadukan kembali kegiatan kepegawaian dengan cara pemindahan atau promosi.

Pelaksanaan organisasi baik struktur maupun sistem kerja organisasi diarahkan pada tujuan organisasi yang merupakan kehendak dari para anggotanya, sehingga pendapat ini lebih melihat pada cita-cita sebagai realita dari suatu organisasi. Tujuan dari organisasi sebagai suatu patokan dasar justru dapat membaca itikad dari suatu organisasi baik terhadap anggota organisasi, sesama organisasi, masyarakat maupun negara. Lebih lanjut **Richard Scott** yang dikutip oleh **Miftah Thoha** mengemukakan organisasi sebagai tujuan khusus dalam hal-hal sebagai berikut:

organisasi itu sebagai suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan, akan lebih jelas persoalannya bahwa organisasi itu bagaimanapun adanya, mempunyai gambaran prospek yang jelas, dan berbeda dari sekedar khususnya tujuan atau kelangsungan aktivitas.

Perbedaan gambaran itu meliputi hal-hal antara lain:

1. Adanya batas-batas yang jelas;
2. Adanya aturan-aturan yang normatif;
3. Adanya jenjang otoritas;
4. Adanya suatu sistem komunikasi; dan
5. Adanya suatu sistem insentif yang mampu mendorong berbagai tipe partisipasi dalam usaha bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan yang khusus merupakan pengendali suatu organisasi tidak melenceng dari cita-cita organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat terfokus pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Peran

organisasi dengan patokan yang jelas memberikan kesempatan luas yang terkondisi positif untuk mencapai tujuan yang dapat mengcover kehendak masyarakat maupun kehendak anggota. Tujuan organisasi dapat terwujud apabila didukung oleh seperangkat sistem yang didalamnya terdapat aturan atau batasan yang jelas bagi organisasi baik secara umum maupun khusus bagi anggotanya. Kriteria dari suatu organisasi secara umum memiliki kesamaan dengan organisasi profesi, akan tetapi letak perbedaan pada tujuan dari suatu organisasi terpengaruh oleh latar belakang dari sejarah perkembangannya, karena mendapat pengaruh dari fungsi profesi berdasarkan kondisi jaman yang tidak lain memiliki perbedaan atas kebutuhan masyarakat atas fungsi profesi itu sendiri.

Terbentuknya beberapa Organisasi profesi hukum menimbulkan dilema dalam penegakan etika profesi, karena setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik masing-masing. Anggota dari suatu organisasi dapat pindah ke organisasi lain apabila akan dijatuhi sanksi dari organisasinya, sehingga penegakan etika profesi hanya sebagai wacana ataupun cita-cita dari organisasi profesi.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh **Shidarta** sebagai berikut: *secara jujur harus diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Lembaga semacam Dewan atau Majelis Pertimbangan Profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwibawa dimata para anggotanya. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Padahal kajian ini pasti akan lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi para fungsionaris hukum kita. Munculnya berbagai organisasi profesi sejenis dengan Kode*

Etiknya sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian ini dimata orang-orang yang mempelajari etika profesi hukum.

Kajian terhadap efektifitas hukum ataupun etika profesi tidak dapat dicermati dari nilai yang ada, akan tetapi harus disertai gambaran riil yang terjadi dimasyarakat. Anggota Organisasi profesi/profesi hukum wajib mematuhi Kode Etik layaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh **Abdulkadir Muhammad** bahwa:

Sama halnya dengan penegakan hukum adalah penegakan Kode Etik. Penegakan Kode Etik adalah usaha melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali, karena Kode Etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum Undang-undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik.

Penegakan Kode Etik serupa dengan penegakan terhadap hukum positif, bahkan dengan ditegakkannya Kode Etik maka berarti telah menegakkan hukum karena Kode Etik sebagai bagian dari hukum positif. Sebagai konsekuensi penegakan Kode Etik maka organisasi profesi memiliki perangkat Pengawas guna mengawasi keseharian profesi/profesi hukum dalam menjalankan tugasnya, serta Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili profesi/profesi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Liliana Tedjosaputro sebagai berikut:

Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar menukar informasi dan perlindungan dikalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. Bahkan

organisasi profesi bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi dikalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi.

Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewibawaan yang tinggi bagi para anggotanya dan dimata anggota masyarakat dan juga Pemerintah. Organisasi profesi yang solid akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya. Apabila ada pelanggaran, penjatuhan sanksi yang objektif diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar Kode Etiknya.

Penjatuhan sanksi yang objektif merupakan suatu harapan demi tegaknya etika profesi sekaligus merupakan pelindung bagi para anggotanya dan memiliki kewibawaan dimata masyarakat. Pengertian objektif itu sendiri memiliki makna yang dapat diperdebatkan, mengingat yang ditegakkan adalah etika yang merupakan sekumpulan nilai sehingga penegakannya tidak dapat lepas dari subyek yang menilai.

Sesuai pula dengan yang dikemukakan oleh **Shidarta** sebagai berikut:

Nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini adalah sesuatu obyek yang tertentu. Apabila kualitas tersebut dilihat dari kondisi sebenarnya maka nilai demikian disebut nilai objektif. Nilai objektif tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari subyek yang memberikan penilaian. Subyek ini dapat berupa individu, kelompok masyarakat, suatu bangsa, atau universal. Nilai yang diberikan oleh subyek disebut nilai subyektif dan pada umumnya nilai memang bersifat subyektif karena subyeklah yang memberikan keputusan tentang nilai itu. Secara teoritis kedua macam nilai ini dapat dibedakan, tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk menentukan mana nilai objektif dan subyektif. Walaupun kriteria nilai objektif adalah dilihat dari obyeknya, namun tetap saja yang menentukan nilai dari obyek itu adalah si subyek, itulah sebabnya ada pendapat yang

mengatakan bahwa nilai itu senantiasa bersifat subyektif, dan semakin banyak subyek yang memberikan nilai yang sama pada suatu obyek, maka dikatakan semakin bernilai objektiflah obyek yang bersangkutan.

Nilai objektif dan subjektif saling bertaut sehingga sulit dipisahkan, karenanya suatu nilai dapat menjadi objektif harus melalui proses yang objektif pula dan dalam organisasi dapat diwujudkan dalam bentuk penilaian anggota atas suatu obyek agar dapat bersifat objektif. Pembahasan dari para anggota atas proses penegakan Kode Etik sangat berpengaruh dalam menegakkan etika profesi. Pembahasan dan penilaian bersama menimbulkan anggota organisasi dapat menerima sanksi pelanggaran secara lapang dada karena anggota telah menyadari atas resiko terhadap pelanggaran yang telah diperbuat.

7. Bentuk Organisasi Etika Profesi.

Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi yaitu:

1. Kredibilitas. Bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi.
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya.
3. Kualitas Jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi keempat hal tersebut, dalam rangka menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di mata masyarakat maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya. Organisasi itulah yang disebut organisasi profesi.

Beberapa profesi penting di Indonesia telah memiliki organisasi profesi yang secara formal diakui oleh pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Organisasi-organisasi profesi tersebut diantaranya adalah:

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di Indonesia.
2. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi akuntan di Indonesia.
3. Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Merupakan organisasi profesi insinyur Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia dan lain sebagainya.
4. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). Merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika sarjana farmasi atau apoteker di Indonesia.

Pada dasarnya, organisasi profesi memiliki empat fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi, yaitu:

1. Mengatur keanggotaan organisasi. Dalam hal ini, organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi dan kemudian lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Organisasi profesi merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya.
3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. Organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk mengatur syarat-syarat sertifikasi, teknis pelaksanaan sertifikasi dan sebagainya.
4. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.
5. Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksinya bervariasi, tergantung jenis pelanggaran, dan bisa bersifat internal organisasi seperti misalnya black list atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa

yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

3. Prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Pelaku profesi harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap pekerjaan atau jasa profesional yang dilakukannya.
4. Prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
5. Prinsip integritas. Pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya.
6. Prinsip obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam hal ini, pelaku profesional harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.
7. Prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
8. Prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya.

Kode etik profesi supaya dapat berfungsi dengan semestinya, maka biasanya:

1. Kode etik dibuat oleh profesi itu sendiri.
2. Kode etik harus menjadi hasil (pengaturan diri) dari profesi.
3. Pelaksanaan kode etik diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu 'dewan kehormatan' atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

C. Berbagai Macam Profesi Yang Terpenting.

1. Etika Hukum Profesi Kedokteran.

a. *Menyoal Etika Profesi Kedokteran.*

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat banyak yang menyoroti profesi dokter, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik.¹⁵⁹

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menganggap sorotan-sorotan tersebut sebagai suatu kritik yang baik terhadap profesi kedokteran, agar para dokter dapat meningkatkan pelayanan profesi kedokterannya terhadap masyarakat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyadari bahwa kritik yang muncul tersebut merupakan "puncak suatu gunung es", artinya masih banyak kritik yang tidak muncul ke permukaan karena ketidakmampuan pasien atau keluarganya menganggap apa yang dialaminya tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Bagi Ikatan Dokter Indonesia, banyaknya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter menggambarkan bahwa masyarakat belum puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para dokter.

Sebenarnya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter merupakan satu pertanda bahwa saat ini sebagian masyarakat belum puas

¹⁵⁹ Iskandar, Dalmay, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika: Jakarta, 1999, hlm: 34.

terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi dokter di masyarakat. Pada umumnya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didapatkan oleh pasien.

Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.¹⁶⁰

Di sisi lain, Konvensi International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan PBB pada tahun 1966 juga mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya. Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapa pun.

Sehat itu sendiri tidak hanya sekadar bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup *produktif* secara ekonomis. Maka, sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.

160 Dalam penjelasan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa; Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil makmur. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya maupun sumber dayanya.

Pada saat sekarang ini, dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan yang pengetahuannya sangat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kedudukan dan peran dokter tetap dihormati, tetapi tidak lagi disertai unsur pemujaan. Dari dokter dituntut suatu kecakapan ilmiah tanpa melupakan segi seni dan artistiknya.

Persoalan yang paling mendasar adalah kesenjangan yang besar antara harapan pasien dengan kenyataan yang diperolehnya menyusul dilakukannya merupakan *predisposing* faktor. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan dokter yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati nasehat dokter.

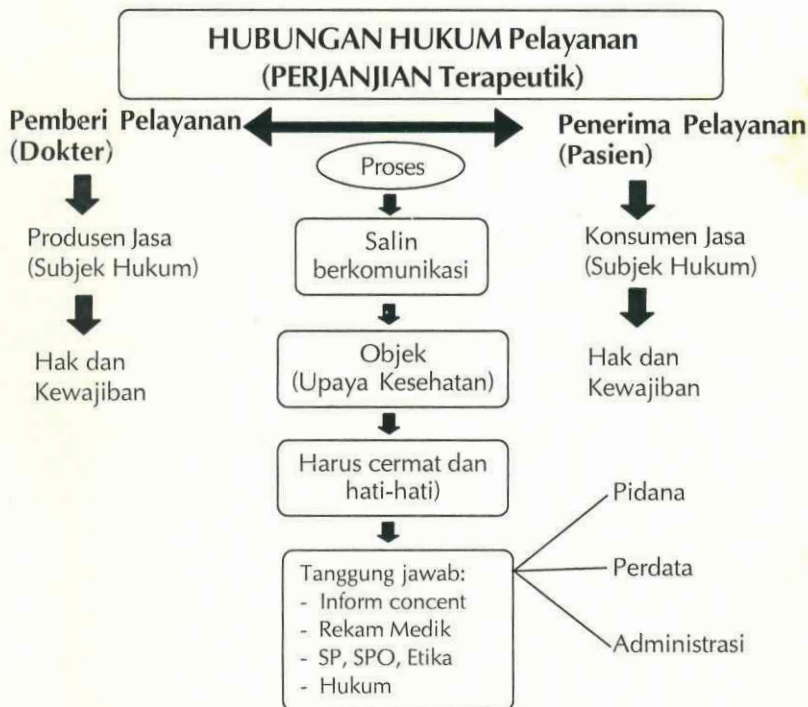
Faktor-faktor tadi dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu, tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan *uncertainty* dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik.

b. Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (jaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan *transaksi*

terapeutik.¹⁶¹ Hubungan yang sangat pribadi itu oleh **Wilson**¹⁶² digambarkan seperti halnya hubungan antara pendeta dengan jemaah yang sedang mengutarakan perasaannya. Pengakuan pribadi itu sangat penting bagi eksplorasi diri, membutuhkan kondisi yang terlindung dalam ruang konsultasi.¹⁶³

Proses transaksi terapeutik, dapat digambarkan sebagai berikut;



161 **King Joseph H**, *The Law of Medical Malpractice in a Nutshell*. West Publishing Co. Stimuli. Paul, Minn, 1986.; **Koeswadiji, Hermien Hadiati**, *Hukum dan Masalah Medik*. Erlangga University Press, Surabaya, 1984; lihat juga dalam; **Komalawati, Veronika**, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1989.

162 **Waitzkin, Howard B & Waterman Barbara**, *Sosiologi Kesehatan*. Prima Aksara: Jakarta, 1993.

163 Transaksi Terapeutik merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka terapi. Dalam hal ini terapi bukan hanya menyangkut kesehatan saja, tapi juga menyangkut semua aspek kesehatan antara lain promosi, prefensi, pengobatan dan rehabilitasi.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan *vertikal paternalistik* seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "*father knows best*"¹⁶⁴ yang melahirkan hubungan yang bersifat *paternalistik*. Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga pasien menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter.

Dalam transaksi terapeutik ini, Hubungan Dokter Pasien dalam Hukum Kesehatan dikenal sebagai Transaksi Terapeutik (TT) sebagai suatu perjanjian perdata, Transaksi Terapeutik tunduk pada peraturan mengenai hukum perjanjian dalam buku III KUH Perdata. Perjanjian Dokter Pasien dilihat dari isinya merupakan perjanjian upaya (*Inspanningverbitenis*) dan bukan perjanjian hasil (*Resultaatverbitenis*). Adanya perjanjian pada Transaksi Terapeutik melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak. Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik secara umum dapat dibagi 3 yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh (1) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), (2) Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata), (3) Tanggungjawab atas terhadap bawah (Pasal 1367 KUH Perdata), dan (4) Wanprestasi (Pasal 1239 KUH Perdata). Dalam pertanggungjawaban tersebut Dokter juga wajib untuk mengikuti Kode Etik Kedokteran Indonesia, Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional serta ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi (Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Praktek) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Dokter. Terdapat beberapa unsur transaksi terapeutik: Ada kesepakatan antara kedua belah pihak; Ada keahlian sesuatu; serta, Ada sebab yang legal

- 164 Dalam hal ini, menurut penulis bahwa "*father knows best*" dalam hubungan paternalistik ini akan mengupayakan untuk bertindak sebagai "bapak yang baik", dengan mengupayakan untuk secara cermat dan hati-hati sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya yang diperolehnya melalui pendidikan yang sulit dan panjang serta pengalaman yang bertahun-tahun untuk kesembuhan si sakit. Dalam mengupayakan kesembuhan si sakit ini, sang pengobat dibekali oleh lafal sumpah yang diucapkannya pada awal ia memasuki jabatan sebagai pengobat yang berlandaskan pada norma etik yang mengikatnya berdasarkan pada kepercayaan si sakit yang datang kepadanya itu bahwa dialah yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dengan berkembang pesatnya sarana informasi melalui berbagai mass media, kerahasiaan profesi dokter mulai terbuka, sementara itu keawaman pasien terhadap kesehatan mengalami perubahan ke arah masyarakat yang terdidik dalam bidang kesehatan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab atas kesehatannya sendiri, mengakibatkan pergeseran paradigma yang berlaku dari kepercayaan yang semula tertuju pada kemampuan dokter secara pribadi sekarang bergeser kearah kemampuan ilmu dari sang pengobat. Dari sinilah kemudian timbul kesadaran warga masyarakat untuk menuntut adanya hubungan seimbang antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai pihak penerima jasa pelayanan kesehatan,

Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya, dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien, dan peranannya lebih penting daripada pasien.

Pola hubungan vertikal yang melahirkan sifat paternalistik dokter terhadap pasien ini mengandung baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif pola vertikal yang melahirkan konsep hubungan paternalistik ini sangat membantu pasien, dalam hal pasien awam terhadap penyakitnya. Sebaliknya dapat juga timbul dampak negatif, apabila tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan pasien itu merupakan tindakan-tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien, yang dalam sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia telah ada sejak lahirnya. Pola hubungan yang vertikal paternalistik ini bergeser pada pola horizontal kontraktual.

Hubungan ini melahirkan aspek hukum horisontal kontraktual yang bersifat "*inspanningsverbintenis*" yang merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subyek hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien.

dimana pasien tidak lagi sepenuhnya pasrah kepada dokter. Berbagai ahli yang telah melakukan penelitian tentang hubungan antara dokter dan pasien baik dibidang medis, maupun sosiologis dan antropologis, antara lain Russel, Freidson & Darsky, Schwarz & Kart, Kisch & Reeder, serta Szasz & Hollender: Russel menyatakan bahwa hubungan antara dokter dan pasien lebih merupakan hubungan kekuasaan, yaitu hubungan antara pihak yang memiliki wewenang (dokter) sebagai pihak yang aktif, dengan pasien yang menjalankan peran ketergantungan sebagai pihak yang pasif dan lemah.

c. Hubungan Hukum Kontraktual.

Hubungan hukum kontraktual yang terjadi antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktek dokter sebagai mana yang diduga banyak orang, tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (*oral statement*) atau yang tersirat (*implied statement*) dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya. Dengan kata lain hubungan *terapeutik* juga memerlukan kesediaan dokter. Hal ini sesuai dengan asas konsensual dan berkontrak.

Mengenai syarat sahnya transaksi *terapeutik* didasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut:

Pertama; *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming van degene die zich verbinden)*. Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Saat terjadinya perjanjian bila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara dokter dengan pasien yaitu pada saat pasien menyatakan keluhannya dan ditanggapi oleh dokter. Di sini antara pasien dengan dokter saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian *terapeutik* yang obyeknya adalah upaya penyembuhan. Bila kesembuhan adalah tujuan utama maka akan mempersulit dokter karena tingkat keparahan penyakit maupun daya tahan tubuh terhadap obat setiap pasien adalah tidak sama. Obat yang sama tidak pasti dapat hasil yang sama pada masing-masing penderita.

Kedua; *Kecakapan untuk membuat perikatan (bekwaamheid om eene verbinten is aan te gaan)*. Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan seseorang

untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶⁵

Di dalam transaksi *therapeutik*, pihak penerima pelayanan medis, terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya.¹⁶⁶

Ketiga; Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Hal tertentu ini yang dapat dihubungkan dengan obyek perjanjian / transaksi

165 Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang dibuat perjanjian tertentu.

166 Mengenai hal kedewasaan, di Indonesia ada berbagai peraturan yang menyebutkan batasan usia dewasa diantaranya: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dikatakan bahwa belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak / belum menikah. Berarti dewasa ialah telah berusia 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun, bila perkawinannya pecah sebelum umur 21 tahun, tidak kembali dan keadaan belum dewasa; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2), menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian pasal 50 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2), menyatakan bahwa perwalian ini mengenai pribadi anak maupun harta bendanya; Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV yang disebarluaskan berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pemeliharaan Anak pasal 98 tercantum:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (ayat (1));
- b) Orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (ayat (2));
- c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (ayat (3)).

terapeutik ialah upaya penyembuhan. Oleh karenanya obyeknya adalah upaya penyembuhan, maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut tidak dapat atau tidak boleh dijamin oleh dokter. Lagi pula pelaksanaan upaya penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi banyak faktor lain yang ikut berperan, misalnya daya tahan pasien terhadap obat tertentu, tingkat keparahan penyakit dan juga peran pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi kepentingan pasien itu sendiri.

Keempat; *Suatu sebab yang sah (geoorloofde oorzaak)*. Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sebab yang sah adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

d. Informed Consent.

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) mencakup tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi. Berdasarkan Permenkes 585/1989 dikatakan bahwa *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Pada hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat terjadi tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis. Oleh karena hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya komunikasi atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara

pengobatan itu sangat penting. Hasil penelitian King membuktikan bahwa essensi dari hubungan antara dokter dan pasien terletak dalam wawancara pengobatan. Pada wawancara tersebut para dokter diharapkan untuk secara lengkap memberikan informasi kepada pasien mengenai bentuk tindakan yang akan atau perlu dilaksanakan dan juga risikonya.

Bahasa kedokteran banyak menggunakan istilah asing yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang awam dalam bidang kedokteran. Pemberian informasi dengan menggunakan bahasa kedokteran, tidak akan membawa hasil apa-apa, malah akan membingungkan pasien. Oleh karena itu seyogyanya informasi yang diberikan oleh dokter terhadap pasiennya disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien.

Setelah informasi diberikan, maka diharapkan adanya persetujuan dari pasien, dalam arti ijin dari pasien untuk dilaksanakan tindakan medis. Pasien mempunyai hak penuh untuk menerima atau menolak pengobatan untuk dirinya, ini merupakan hak asasi pasien yang meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.

Oleh karena itu sebelum pasien memberikan persetujuannya diperlukan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Penjelasan lengkap mengenai prosedur yang akan digunakan dalam tindakan medis tertentu (yang masih berupa upaya, percobaan) yang diusulkan oleh dokter serta tujuan yang ingin dicapai (hasil dari upaya, percobaan);
2. Deskripsi mengenai efek-efek sampingan serta akibat-akibat yang tak diinginkan yang mungkin timbul;
3. Diskripsi mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pasien;
4. Penjelasan mengenai perkiraan lamanya prosedur berlangsung;
5. Penjelasan mengenai hak pasien untuk menarik kembali persetujuan tanpa adanya prasangka (jelek) mengenai hubungannya dengan dokter dan lembaganya;

6. Prognosis mengenai kondisi medis pasien bila ia menolak tindakan medis tertentu (percobaan) tersebut.
7. Mengenai bentuk *informed consent* dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat disampaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan ataupun tertulis dan *informed consent* yang dilakukan secara diam-diam yaitu tersirat dari anggukan kepala ataupun perbuatan yang mensiratkan tanda setuju.

Informed consent dilakukan secara lisan apabila tindakan medis itu tidak berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis. Sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko misalnya pembedahan, maka *informed consent* dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien.

Di negara-negara maju, berbagai bentuk formulir persetujuan tertulis sengaja disediakan di setiap rumah sakit. Rupanya pengalaman menuntut dan digugat menjadikan mereka lebih berhati-hati. Pada prinsipnya formulir yang disediakan tersebut memuat pengakuan bahwa yang bersangkutan telah diberi informasi serta telah memahami sepenuhnya dan selanjutnya menyetujui tindakan medis yang disarankan dokter.

Jadi, pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif.

Yang tidak boleh dilupakan adalah dalam memberikan informasi tidak boleh bersifat memperdaya, menekan atau menciptakan ketakutan sebab ketiga hal itu akan membuat persetujuan yang diberikan menjadi cacat hukum. Sudah seharusnya informasi diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Memang dapat

didelegasikan kepada dokter lain atau perawat, namun jika terjadi kesalahan dalam memberikan informasi maka yang harus bertanggung jawab atas kesalahan itu adalah dokter yang melakukan tindakan medis. Lagi pula dalam proses mendapatkan persetujuan pasien, tidak menutup kemungkinan terjadi diskusi sehingga memerlukan pemahaman yang memadai dari pihak yang memberikan informasi.

Ada sebagian dokter menganggap bahwa *informed consent* merupakan sarana yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum jika terjadi *malpraktek*. Anggapan seperti ini keliru besar dan menyesatkan mengingat *malpraktek* adalah masalah lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar. Meskipun sudah mengantongi *informed consent* tetapi jika pelaksanaannya tidak sesuai standar maka dokter tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Dari sudut hukum pidana *informed consent* harus dipenuhi hal ini berkait dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), tentang penganiayaan. Suatu pembedahan yang dilakukan tanpa ijin pasien, dapat disebut sebagai penganiayaan dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Leenen¹⁶⁷ memberikan contoh, apabila A menusuk / menyayat pisau ke B sehingga timbul luka, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai penganiayaan. Apabila A adalah seorang dokter, tindakan tersebut tetap merupakan penganiayaan, kecuali:

1. Orang yang dilukai (pasien) telah menyetujui;
2. Tindakan medis tersebut (pembedahan yang pada hakekatnya juga menyayat, menusuk, memotong tubuh pasien) berdasarkan suatu indikasi medis;
3. Tindakan medis tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran yang diakui dalam dunia kedokteran.

167 **Leenen, H.J.J. dan Lamintang, PA F**, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta: Bandung, 1991.

Dari sudut hukum perdata *informed consent* wajib dipenuhi. Hal ini terkait bahwa hubungan antara dokter dengan pasien adalah suatu perikatan (transaksi terapeutik) untuk syahnya perikatan tersebut diperlukan syarat syah dari perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di antaranya adalah adanya kesepakatan antara dokter dengan pasien. Pasien dapat menyatakan sepakat apabila telah diberikan informasi dari dokter yang merawatnya terhadap terhadap terapi yang akan diberikan serta efek samping dan risikonya. Juga terkait dengan unsur ke-2 (dua) mengenai kecakapan dalam membuat perikatan. Hal ini terkait dengan pemberian informasi dokter terhadap pasien yang belum dewasa atau yang ditaruh di bawah pengampuan agar diberikan kepada orang tua, *curator* atau walinya.

Pada prinsipnya, persyaratan untuk memperoleh *informed consent* dalam tindakan medis tertentu tidak dibedakan dengan *Informed consent* yang diperlukan dalam suatu eksperimen. Hanya saja, dalam eksperimen suatu penelitian baik yang bersifat terapeutik maupun non-terapeutik yang menggunakan pasien sebagai *naracoba*, maka *informed consent* harus lebih dipertajam, sebab menyangkut perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pencegahan terjadinya paksaan dan kesesatan serta penyalahgunaan keadaan.

e. *Etika (Tanggung Jawab) Hukum Dokter Terhadap Pasien.*

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 434/Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan struktural Undang-undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar

manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Berikut diajukan beberapa contoh:

1. Pelanggaran etik murni
 - a) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi;
 - b) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya;
 - c) Memuji diri sendiri di depan pasien;
 - d) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan;
 - e) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.
2. Pelanggaran etikolegal;
 - a) Pelayanan dokter di bawah standar;
 - b) Menerbitkan surat keterangan palsu;
 - c) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter;
 - d) Abortus provokatus.

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan *profesionalisme* seorang dokter. Hal ini terkait dengan:

1. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita.

2. Derajat risiko perawatan

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan minimal mungkin. Di samping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita maupun keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.

3. Peralatan perawatan

Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Namun dari jawaban responden bahwa tidak semua pasien bersedia untuk diperiksa dengan menggunakan alat bantu (alat kedokteran canggih), hal ini terkait erat dengan biaya yang harus dikeluarkan bagi pasien golongan ekonomi lemah.

4. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.

2. Kode Etik Profesi Bidan.

a. Siapakah Bidan itu?

Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara dan memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di negara itu. Dia harus mampu memberikan supervisi, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil, persalinan dan masa pasca persalinan (*post partum period*), memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak.

Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak hadirnya tenaga medik lainnya. Dia mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita tersebut, tetapi juga termasuk keluarga dan komunitasnya.

Pekerjaan ini termasuk pendidikan *antenatal*, dan persiapan untuk menjadi orang tua, dan meluas ke daerah tertentu dari ginekologi, keluarga berencana dan asuhan anak. Dia juga berpraktek di rumah sakit, klinik, unit kesehatan, rumah perawatan atau tempat-tempat pelayanan lainnya.

b. Pelayanan Kebidanan.

Pelayanan kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kebidanan tergantung bagaimana struktur sosial budaya masyarakat dan termasuk kondisi sosial ekonomi, sosial demografi. Pelayanan kebidanan meliputi aspek *biopsikososial spiritual* dan *cultural*. Pasien memerlukan bidan yang mempunyai karakter sebagai berikut: *semangat melayani, simpati, empati, ikhlas, member kepuasan*.

Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan dan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan serta peyelenggaraannya sesuai kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan Ukuran pelayanan kebidanan yang bermutu:

1. Ketersediaan pelayanan kebidanan;
2. Kewajaran pelayanan kebidanan;
3. Kesiambungan pelayanan kebidanan;
4. Penerimaan jasa pelayanan kebidanan;
5. Ketercapaian pelayanan kebidanan;
6. Keterjangkauan pelayanan kebidanan;
7. Efisiensi pelayanan kebidanan;
8. Mutu pelayanan kebidanan

c. Penerapan Etika Kebidanan.

Pelayanan kebidanan disuatu institusi memiliki norma dan budaya yang unik. Setiap irstitusi pelayanan memiliki norma sendiri dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terdiri dari beberapa praktisi atau profesi kesehatan. Walaupun demikian subjek pelayanan hanya satu, yaitu manusia atau individu. Sehingga setiap indiividu harus jelas batas wewenangny. Area kewenangan bidan tertuang dalam Kepmenken 900 / Menkes / SK/ VII / 2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Mengenai kejelasan peran bidan diatur dalam standar praktik kebidanan dan standar pelayanan kebidanan.

Pertama; *Etika dalam pelayanan kontrasepsi* Dalam merencanakan jumlah anak, seorang ibu telah merundingkan dengan suami dan telah menetapkan metode *kontrasepsi* yang akan digunakan. Sehingga keputusan untuk kontrasepsi, merupakan hak klien dan berada di luar kompetensi bidan. Jika klien belum mempunyai keputusan karena disebabkan ketidaktahuan klien tentang kontrasepsi, maka menjadi kewajiban bidan untuk memberikan informasi tentang kontrasepsi. Yang dapat dipergunakan klien, dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai alat kontrasepsi dan beberapa alternative sehingga klien dapat memilih sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya.

Bidan sebagai konselor dalam pelayanan kontrasepsi harus memiliki kemampuan teknik konseling, pengetahuan tentang alat kontrasepsi dan pemakaiannya, indikasi, kontra indikasi, serta efek sampingnya. Klien atau ibu sebagai calon ekseptor tidak boleh dipaksa oleh bidan sebagai provider, namun pengambilan keputusan klien untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi merupakan pilihan klien sendiri, setelah memahami mengenai alat kontrasepsi.

Pemilihan alat kontrasepsi merupakan hak klien dan suami untuk merencanakan pengaturan kelahiran mereka. Tujuan konseling kontrasepsi, adalah:

1. Agar calon *ekseptor* mampu memahami manfaat KB bagi diri dan keluarganya;

2. Calon *ekseptor* mempunyai pengetahuan yang baik tentang alasan menggunakan KB dan segala hal yang berkaitan dengan kontrasepsi.

Bidan sebagai *konselor* harus memiliki kepribadian sebagai berikut:

1. Minat untuk menolong orang lain.
2. Mampu untuk empati.
3. Menjadi pendengar yang aktif dan baik.
4. Mempunyai pengamatan yang tajam.
5. Terbuka terhadap pendapat orang lain.
6. Mampu mengenali hambatan psikologis sosial dan budaya.

Setelah klien memutuskan memilih salah satu alat kontrasepsi, bidan menyiapkan *informed consent* secara tertulis. Bidan harus bersikap netral dalam memberikan konseling kontrasepsi. Perlu diingat bahwa belum adanya alat kontrasepsi yang aman dan efektif tanpa efek samping, juga perlu diingat bahwa pemakaian kontrasepsi berhubungan dengan keyakinan atau agama masing-masing klien yang harus dihargai. Sangat diperlukan penjelasan mengenai keuntungan, indikasi, kontra indikasi dan efek samping pemakaian kontrasepsi karena berhubungan dengan kesehatan klien. *Informed consent* dalam pemilihan alat kontrasepsi sebaiknya dilakukan secara tertulis dan melibatkan suami, karena mengingat dalam hak reproduksi bahwa; merupakan hak suami dan isteri untuk menentukan jumlah anak dan cara pembatasan kelahiran.

Kedua; Etika dalam penelitian kebidanan; Menurut kode etik bidan internasional adalah bidan seharusnya meningkatkan pengetahuannya melalui berbagai proses seperti dari pengalaman pelayanan kebidanan dan dari riset kebidanan. Riset dan diseminasinya menjadi tanggung jawab bidan. Tuntutan masyarakat tentang mutu pelayanan kebidanan makin tinggi, karena semakin majunya jaman, dan kita memasuki era globalisasi, akses informasi bagi masyarakat juga semakin meningkat.

Beberapa waktu yang lalu praktik kebidanan masih banyak berdasarkan kebiasaan atau dogma, 'dulu saya diajarkan begitu', atau 'biasanya seperti ini', dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan praktik yang seperti itu tidak dilaksanakan lagi, tetapi dituntut praktek profesional berdasarkan evidence based atau hasil penelitian.

d. Penerapan Etika & Moral Dalam Pelayanan Kebidanan.

Aplikasi dalam praktek klinis bagi perawat/bidan diperlukan untuk menempatkan nilai-nilai dan perilaku kesehatan pada posisinya. Perawat/bidan bisa menjadi sangat frustrasi bila membimbing atau memberikan konsultasi kepada pasien yang mempunyai nilai-nilai dan perilaku kesehatan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pasien kurang memperhatikan status kesehatannya. Pertama-tama yang dilakukan oleh perawat/bidan adalah berusaha membantu pasien untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar kehidupannya sendiri.

Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan kasus sebagai berikut:

Seorang pengusaha yang sangat sukses dan mempunyai akses di luar dan dalam negeri sehingga dia menjadi sibuk sekali dalam mengelola usahanya. Akibat kesibukannya dia sering lupa makan sehingga terjadi perdarahan lambung yang menyebabkan dia perlu dirawat di rumah sakit. Selain itu dia juga perokok berat sebelumnya. Ketika kondisinya telah mulai pulih perawat berusaha mengadakan pendekatan untuk mempersiapkannya untuk pulang. Namun perawat menjadi kecewa, karena pembicaraan akhirnya mengarah pada keberhasilan serta kesuksesannya dalam bisnis. Kendati demikian upaya tersebut harus selalu dilakukan dan kali ini perawat menyusun list pertanyaan dan mengajukannya kepada pasien tersebut.

Pertanyaannya, “Apakah tiga hal yang paling penting dalam kehidupan bapak dari daftar dibawah ini?” Pasen diminta untuk memilih atas pertanyaan berikut:

1. Bersenang-senang dalam kesendirian (berpikir, mendengarkan musik atau membaca).
2. Meluangkan waktu bersama keluarga.
3. Melakukan aktifitas seperti: mendaki gunung, main bola atau berenang.
4. Menonton televisi.
5. Membantu dengan sukarela untuk kepentingan orang lain.
6. Menggunakan waktunya untuk bekerja.

Langkah berikutnya adalah mengajaknya untuk mendiskusikan prioritas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya, dengan mengikuti klarifikasi nilai-nilai sebagai berikut:

1. **Memilih:** Setelah menggali aspek-aspek berdampak terhadap kesehatan pasien, misalnya stress yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu aktifitasnya, maka sarankan kepadanya memilih secara bebas nilai-nilai kunci yang dianutnya. Bila dia memilih masalah kesehatannya, maka hal ini menunjukkan tanda positif.
2. **Penghargaan:** Berikan dukungan untuk memperkuat keinginan pasien dan promosikan nilai-nilai tersebut dan bila memungkinkan dapatkan dukungan dari keluarganya. Contoh: istri dan anak anda pasti akan merasa senang bila anda memutuskan untuk berhenti merokok serta mengurangi kegiatan bisnis anda, karena dia sangat menghargai kesehatan anda.
3. **Tindakan:** Berikan bantuan kepada pasien untuk merencanakan kebiasaan baru yang konsisten setelah memahami nilai-nilai pilihannya. Minta kepada pasien untuk memikirkan suatu cara bagaimana nilai tersebut dapat masuk dalam kehidupan sehari-

hari. Kata-kata yang perlu diucapkan perawat/bidan kepada pasennya: *"Bila anda pulang, anda akan menemukan cara kehidupan yang berbeda, dan anda menyatakan ingin mulai menggunakan waktu demi kesehatan anda"*.

Perawat atau bidan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan profesional. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan perawat atau bidan, dan berlanjut pada diskusi formal maupun informal dengan sejawat atau teman. Perilaku yang etis mencapai puncaknya bila perawat atau bidan mencoba dan mencontoh perilaku pengambilan keputusan yang etis untuk membantu memecahkan masalah etika. Dalam hal ini, perawat atau bidan seringkali menggunakan dua pendekatan: yaitu pendekatan berdasarkan prinsip dan pendekatan berdasarkan asuhan keperawatan/kebidanan.

Pendekatan berdasarkan prinsip, sering dilakukan dalam *bio etika* untuk menawarkan bimbingan untuk tindakan khusus. **Beauchamp Childress** (1994)¹⁶⁸ menyatakan empat pendekatan prinsip dalam etika biomedik antara lain;

1. Sebaiknya mengarah langsung untuk bertindak sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi setiap orang;
2. Menghindarkan berbuat suatu kesalahan;
3. Bersedia dengan murah hati memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya;
4. Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yang dihadapi.

Dilema etik muncul ketika ketaatan terhadap prinsip menimbulkan penyebab konflik dalam bertindak. Contoh; seorang ibu yang memerlukan biaya untuk pengobatan progresif bagi bayinya yang lahir

168 Shirley R.Jones, *Ethics In Midwifery*, by Mosby – Year Book Europe Ltd, 1994.

tanpa otak dan secara medis dinyatakan tidak akan pernah menikmati kehidupan bahagia yang paling sederhana sekalipun.

Di sini terlihat adanya kebutuhan untuk tetap menghargai otonomi ibu akan pilihan pengobatan bayinya, tetapi dilain pihak masyarakat berpendapat akan lebih adil bila pengobatan diberikan kepada bayi yang masih memungkinkan mempunyai harapan hidup yang besar. Hal ini tentu sangat mengecewakan karena tidak ada satu metoda pun yang mudah dan aman untuk menetapkan prinsip-prinsip mana yang lebih penting, bila terjadi konflik diantara kedua prinsip yang berlawanan. Umumnya, pendekatan berdasarkan prinsip dalam bioetik, hasilnya terkadang lebih membingungkan. Hal ini dapat mengurangi perhatian perawat atau bidan terhadap sesuatu yang penting dalam etika.

Ketidakpuasan yang timbul dalam pendekatan berdasarkan prinsip dalam bioetik mengarahkan banyak perawat atau bidan untuk memandang "care" atau asuhan sebagai fondasi dan kewajiban moral. Hubungan perawat/bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, dimana memberikan langsung perhatian khusus.

kepada pasien, sebagaimana dilakukan sepanjang kehidupannya sebagai perawat atau bidan. Perspektif asuhan memberikan arah dengan cara bagaimana perawat/bidan dapat membagi waktu untuk dapat duduk bersama dengan pasien atau sejawat, merupakan suatu kewajiban yang dapat membahagiakan bila diterapkan berdasarkan etika.

Karakteristik perspektif dari asuhan meliputi:

1. Berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan;
2. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien atau pasien sebagai manusia;
3. Mau mendengarkan dan mengolah saran-saran dari orang lain sebagai dasar yang mengarah pada tanggung-jawab profesional;
4. Mengingat kembali arti tanggung-jawab moral yang meliputi

kebajikan seperti: kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih-sayang, dan menerima kenyataan.¹⁶⁹

Asuhan juga memiliki tradisi memberikan komitmen utamanya terhadap pasien dan belakangan ini mengklaim bahwa *advokasi terhadap pasien* merupakan salah satu peran yang sudah dilegitimasi sebagai peran dalam memberikan asuhan keperawatan / kebidanan. Advokasi adalah memberikan saran dalam upaya melindungi dan mendukung hak-hak pasien.

Hal tersebut merupakan suatu kewajiban moral bagi perawat atau bidan, dalam menemukan kepastian tentang dua sistem pendekatan etika yang dilakukan yaitu pendekatan berdasarkan prinsip dan asuhan. Perawat atau bidan yang memiliki komitmen tinggi dalam mempraktekkan keperawatan profesional dan tradisi tersebut perlu mengingat hal-hal sebagai berikut;

1. Pastikan bahwa loyalitas staf atau kolega agar tetap memegang teguh komitmen utamanya terhadap pasien;
2. berikan prioritas utama terhadap pasien dan masyarakat pada umumnya;
3. Kepedulian mengevaluasi terhadap kemungkinan adanya klaim otonomi dalam kesembuhan pasien. Bila menghargai otonomi, perawat atau bidan harus memberikan *informasi yang akurat, menghormati dan mendukung hak pasien dalam mengambil keputusan*.

Dalam upaya mendorong profesi keperawatan dan kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus memanfaatkan nilai-nilai keperawatan/kebidanan dalam menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang

169 Carol Taylor, Carol Lillies, Priscilla Le Mone, *Fundamental Of Nursing Care*, Third Edition, by Lippicott Philadelphia, New York, 1997.

Bab Empat

Merancang Model Pelayanan Publik Untuk Pemerintahan Daerah: Pisau Analisis Etika Administrasi Negara

A. Eksistensi Desentralisasi di Indonesia.

1. Dari Desentralisasi Menuai Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas²³⁵ dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

235 Pemberian wewenang yang lebih luas tersebut, dapat diistilahkan sebagai “desentralisasi”, eksistensinya di Negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD hampir setiap kabinet yang terbentuk di masa lalu mencanumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya. Bahkan dalam masa Orde Baru, strategi bagi penyelenggaraan desentralisasi selalu tertuang dalam GBHN, sedangkan kebijakan dan programnya terjabar dalam Repelita Nasional. Ratusan

Sebagaimana dikemukakan **Hoessein**,²³⁶ bahwa Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Realitas saat ini, menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang”, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain

peraturan perundang-undangan telah terbentuk dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Sejumlah sumber daya telah terserap untuk memperkuat program desentralisasi melalui serangkaian kajian dan penelitian. Masa kini desentralisasi merupakan salah satu agenda reformasi. Sungguh tidak keliru apabila dalam tahun limapuluhan **Maryanov** (1958) dari Universitas Cornell pernah menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa desentralisasi di Indonesia telah diterima sebagai aksioma. Lihat dala: **Maryanov, Gerald S**, *Decentralization in Indonesia: As Political Problem*, Cornell University Press: New York, 1958.

- 236 **Hoessein, B**, “*Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*”; Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.²³⁷

Terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis, dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasi; seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelola pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat, kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta.²³⁸

Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi para-

237 Marjoni Rachman, *Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*, Jurnal Prediksi: Untag, Agustus Nomor: 7 Tahun 2008, hlm: 1-3.

238 Norman Flynn (1990), pernah mengemukakan bahwasanya pelayanan publik yang dikelola pemerintah secara hierarkis cenderung bercirikan *over bureaucratic, bloated, wasteful, dan under performing*. Lihat dalam: Flynn Norman., *Public Sector Management*, Harvester Wheatsheaf, London, 1990. Kejadian-kejadian tersebut seperti yang disebutkan oleh Norman Flynn, lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani. Seharusnya, dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", "mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang". Selanjutnya dapat dibaca dalam bukunya: Mustopadidjaja AR, *Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ceramah Perdana Pada Program Magister Manajemen Penibangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN, Pemerintah Prov. Kaltim, dan Universitas Mulawarman, 15 Januari, 2002. Samarinda, 2002.

digma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Oleh sebab itu reformasi paradigma pelayanan publik tersebut harus dibarengi dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, dalam konteks otonomi daerah berarti bagaimana mereformasi pola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Mereformasi Pemerintahan Daerah.

Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi yang dikehendaki di dalam UU tersebut tergolong reformasi yang radikal (*radical change*) atau drastik (*drastic change*) dan bukan reformasi yang bersifat gradual (*gradual change*). Oleh karena itu, konflik, krisis dan guncangan yang menyertai reformasi tersebut lebih besar daripada serangkaian reformasi yang pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan dengan reformasi pemerintahan daerah di berbagai negara berkembang lainnya pun reformasi pemerintahan daerah di Indonesia masih tergolong sangat besar. Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia tergolong *big bang approach*.

Besarnya perubahan yang terjadi di dalam reformasi pemerintahan daerah tersebut dapat dilihat dari pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang terjadi. Paradigma "*structural efficiency model*" yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal (*local government*) ditinggalkan dan dianut paradigma "*local democracy model*" yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan itu terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi.²³⁹

Namun perubahan sejumlah paradigma dan model tersebut tidak berakar pada strategi. Desentralisasi bukanlah tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam TAP MPR No. IV/2000 ditegaskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselerasan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah dan antar Daerah dalam kewenangan dan keuangan, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah. Tujuan desentralisasi tersebut belum tertampung dalam strategi reformasi pemerintahan daerah yang digulirkan melalui kedua undang-undang tersebut. Oleh sebab itu berbagai tantangan dan permasalahan timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi tersebut.

Dalam konsep pelayanan publik saat ini, menurut **Hendarin**²⁴⁰ dapat digambarkan sebagai adanya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Berikut adalah permasalahan yang dimaksudkan:

1. Permasalahan pertama dari segi *supply* adalah dengan semakin terbatasnya daya dukung alam dan sumber pembiayaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan di pihak lain tuntutan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
2. Permasalahan yang kedua, dari segi *demand* bahwa pemerintah

239 Hoessein, B, "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara"; Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance; Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

240 Marjoni Rachman, *Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*, Op cit: 4-5.

daerah menghadapi permintaan yang terus menerus meningkat terhadap pemenuhan barang dan jasa publik, yang diartikan sebagai *urban services*. Transportasi massal, pengendalian banjir, dan pemeliharaan kebersihan atau lingkungan merupakan contoh *urban services* yang kebutuhannya semakin meningkat.

Kedua permasalahan tersebut merupakan fenomena *government growth* yang dihadapi banyak pemerintah daerah, jika fenomena ini tidak bisa diantisipasi secara tepat, maka proses pembangunan pun akan mengalami hambatan. Antisipasi yang dilakukan tersebut dimaksudkan demi tercapainya pemerintah yang mampu memberikan inovasi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

3. Reinventing Government Management: Konsep Pelayanan Publik di era Modern.²⁴¹

Model *New Public Management* mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep "*managerialism*"; "*market-based public administration*"; "*post-bureaucratic paradigm*"; dan "*entrepreneurial government*".²⁴² *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerin-

241 Untuk lebih memahami tentang konsep *Reinventing Governance Management* ini, dapat pembaca lihat dalam buku penulis yang berjudul: *Dimensi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Memberantas Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal*, CV. Maulana Media Grafika: Bandung, 2013, Hlm:505-506.

242 Osborne, David & Gaebler, T, *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Reading, Massachussets : A William Patrick Book, 1992.

tahan di era *New Public Management* adalah model pemerintahan yang diajukan oleh **Osborne** dan **Gaebler** (yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep "*reinventing government management*").²⁴³ Untuk melakukan reformasi manajemen pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dapat diupayakan melalui program *reinventing government management*. Pada dasarnya konsepsi mengenai *reinventing government management* bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat.

Untuk dapat melakukan reformasi manajemen pemerintahan, di Negara ini dapat menuri apa yang sudah dilakukan oleh **Bill Clinton** pada saat menjadi Presiden Amerika Serikat, yang mengemukakan pentingnya melihat empat prinsip yang menonjol dan perlu diperhatikan secara khusus, langkah tersebut adalah sebagai berikut:²⁴⁴

1. Memangkas penyakit birokrasi (*cutting rate tape*);
2. Menempatkan pelanggan sebagai fokus (*putting customer first*);

243 **Osborne, David & Peter Plastrik**, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*, Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1997. Menurut **Osborne** dan **Gaebler**, terdapat sepuluh prinsip *reinventing government management*, yaitu yang pertama adalah *pemerintahan katalis* yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah dan fungsi sebagai pelaksana. Kedua *pemerintah milik masyarakat*, yaitu mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki pemerintah ke tangan masyarakat. Ketiga, *pemerintah yang kompetitif*, yang mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Keempat, *pemerintah yang digerakkan oleh misi*, yaitu mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Kelima, *pemerintah yang berorientasi hasil*, yaitu pemerintah yang *result-oriented* mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada hasil. Keenam, *pemerintah berorientasi pada pelanggan*, yaitu pemerintah yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. Ketujuh, *pemerintahan wirausaha*, yaitu pemerintah yang berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Kedelapan, *pemerintah antisipatif*, yaitu pemerintah yang berupaya mencegah daripada mengobati. Kesembilan, *pemerintah desentralisasi*, yaitu pemerintah yang dijalankan dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Kesepuluh, *pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar*, yaitu pemerintah yang mampu mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

244 **Al Gore**, *The Best Kept Secret In Government*, NPR, Washington, 1996.

3. Memberdayakan pegawai untuk mencapai hasil (*empowering employes to get result*);
4. Melihat dan mengembalikan pada aspek fundamental (*cutting back to basic*).

Relevansi konsep *reinventing government management* terhadap upaya pengembangan aparatur dan mekanisme penyelenggaraan aparatur pemerintah daerah sangat banyak. Antara lain adanya komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, disertai perlu adanya visi dan misi yang jelas dari pimpinan untuk melakukannya. Dengan kekuatan visi dan misi yang dimiliki oleh pimpinan diharapkan mampu menyeimbangkan gaya dan pola manajemen dengan perubahan dan dinamika lingkungan yang semakin kompleks.

Hal lain yang sangat esensial dalam *reinventing government management* ini adalah berbagai mekanisme penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang seharusnya ditangani oleh pemerintah daerah secara bertahap dialihkan dengan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian keterbatasan pendanaan dan sebagainya dapat tertutupi dengan pola seperti ini.

4. Rekonstruksi Paradigma Pelayanan Publik.

Denhardt and Denhardt²⁴⁵ mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*old public administration*) ke model manajemen publik baru (*new public management*) dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (*new public service*) seperti terlihat pada tabel berikut ini.

245 **Marjoni Rachman**, *Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*, Op cit: 6-7.

Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik

Aspek	Old Public Administration	New Public Manajemen	New Public Service
Dasar Teori	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
Konsep Kepentingan Publik	Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politik dan yang tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi dan kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dari agregasi dialog tentang berbagai nilai
Kepada Siapa Birokrasi harus Bertanggung jawab	Klien dan Pemilih	Pelanggan	Warganegara
Peran Pemerintah	Pengayuh (<i>rowing</i>)	Mengarahkan steering	Menegosiasikan dan mengela- borasi berbagai kepentingan warganegara dan kelompok komunitas
Akuntabilitas	Menurut hierarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan keinginan pelanggan	Multi aspek; akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar profesional, kepentingan warga negara

Dalam model *new public service*, berlandaskan teori demokrasi yang mengajarkan adanya *egaliter* dan persamaan hak diantara warga negara. Dalam model ini kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertera dalam

aturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari warga negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada. Dalam model ini birokrasi publik bukan hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma politik yang berlaku, standar profesional dan kepentingan warga negara. Itulah serangkaian konsep pelayanan publik yang ideal masa kini di era demokrasi.

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service* adalah bahwa pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara. Dengan demikian karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Disamping itu pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan tanpa membedakan asal usul, suku, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepertaian. Ini berarti setiap warga negara diperlakukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam menerima layanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme. Model pelayanan publik seperti ini diharapkan dapat menjadi suatu model yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Bab Lima

Catatan Penutup; Menuju Etika Hukum dengan Penegakan Hukum Berkarakter *Good Governance*

A. Wacana Penegakan Hukum.

Dalam literatur hukum administrasi negara, seorang ahli hukum tata negara, **Montesquieu** membagi kekuasaan dalam tiga bidang yakni *eksekutif*, *yudikatif* dan *legislatif* yang selanjutnya dikenal dengan Trias Politika. Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak menganut paham Trias Politika. Meski demikian pelembagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika.²⁴⁸ Pelembagaan berbagai kekuasaan negara dalam UUD 1945 tidak dipisahkan secara tegas yang akan menimbulkan *checking power with power*. Namun demikian masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tetap ada keterkaitan dan koordinasi (*checks and balances*).

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim orde baru, telah membawa perubahan besar dalam bidang

248 Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm: . 274.

kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Dalam bidang politik, telah banyak bermunculan partai-partai politik dan masyarakat diberikan kebebasan dalam membentuk dan memilih partai politik sesuai dengan aspirasinya. Dalam bidang hukum, adanya amandemen UUD 1945 yang dijadikan dasar untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan dibawah UUD untuk mencapai tujuan negara.

Meski reformasi telah berhasil mengganti kepemimpinan nasional, bukan berarti permasalahan telah selesai. Dalam bidang hukum, munculnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat baik dipusat maupun di daerah, munculnya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, timbulnya perselisihan antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dengan KPK, dan masih banyak permasalahan negara yang butuh penanganan yang serius dari pemerintah. Proses penegakkan hukum masih *diskriminatif* dan tidak konsisten serta parameter yang digunakan tidak objektif dan cenderung mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Perjalanan reformasi selama hampir sebelas tahun telah menyisakan permasalahan yang sama dengan masa orde baru yaitu transparansi dalam penegakkan hukum. Hukum harus diposisikan sebagai panglima dalam tingkah laku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik masyarakat, aparat pemerintah termasuk didalamnya aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum tanpa adanya diskriminatif dan segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Penulis mengamati, penegakkan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan (jauh antara api dari panggang). Suatu gambaran diperoleh dalam penegakkan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha (orang kaya).

Intelektual muda Indonesia, **Anis Baswedan**,²⁴⁹ menilai, kepercayaan publik pada penegakan hukum di Indonesia semakin memudar. Bahkan, penegak hukum di Indonesia menjadi simbol dari lemahnya hukum. Beliau, mengatakan bahwa Komponen *Rule of Law* di Indonesia mendekati bangkrut! Kepastian hukum tidak muncul, hukum untuk rasa keadilan tidak muncul. Parahnya, yang jadi penegak hukum itu malah jadi simbol lemahnya hukum.

Penulis sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Anis Bawedan, mengapa? Sebab kondisi hukum di Negeri ini sudah tidak lagi mencerminkan hukum sebagaimana sejatinya hukum, apabila giliran yang kuat melanggar hukum maka hukum akan sangat berhati-hati dan bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, jika yang lemah, kecil melanggar hukum tentunya hukum akan langsung siap bekerja dan tanpa memandang bulu. Jelas ini adalah sebuah aplikasi dari azas *equality before the law* akan tetapi siapa dulu yang melanggarnya. Bagaimana hukum itu benar-benar bekerja?, kita tidak akan pernah mengetahuinya, apakah memang bekerja atau hanya berpura-pura saja. Layaknya sebuah sandiwara, yang memainkan lawakan dengan canda tawa.

Awal tahun 2013 ini tidak ada salahnya jika kita renungkan kembali, tentang begitu banyaknya pengalaman negatif menyangkut moralitas penegak hukum kita di tahun-tahun sebelumnya, karena harus diakui bahwa pengalaman negatif itu dapat membekas dan membentuk mentalitas bangsa yang akan menghasilkan ketakutan, dan ketakutan itu kemudian menimbulkan sesuatu yang bersifat *destruksi*, sementara *destruksi* itu sendiri menakutkan. Keduanya bersumber dari sesuatu yang rapuh yaitu jiwa yang takut. Moralitas negatif penegak hukum akan menimbulkan bangsa ini hidup dalam rasa takut yang berkepanjangan. Patut untuk dipertanyakan, apakah memang moralitas

249 Anis Bawedan, *Penegak Hukum Simbol Lemahnya Hukum di Indonesia*, Oke zone News, Rabu 23 Mei 2013.

penegakan hukum kita terlalu berpihak kepada yang rendah? Sungguh sebuah lingkaran yang tidak bisa diputuskan dan dicari ujungnya.

Mengapa kondisi penegakan hukum kita sat ini, selalu bersifat *destruksi*? Kita lihat saja, tidak sedikit dari masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum khususnya di Indonesia, mereka yang terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan perundangan sebagai hukum tersebut mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi yang demikian itu, mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang *tumpul*, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.²⁵⁰

Harus diakui secara jujur, bahwa sebuah hukum yang demokratis adalah selalu membesut dari bumi. Artinya, ia merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang melembaga didalam masyarakat yang menjadi sasarannya, kemudian untuk dengan arif menata dan menyinergikan persilangan kepentingan yang juga harus dipelihara, senyatanya terjadi dalam tabel hidup dimasyarakat. Lebih dari itu, terutama didunia modren, hukum bahkan kemudian meluaskan fungsinya untuk melakukan *social engineering*, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masya-

250 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: jakarta, 2000: 1.

rakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam ber hukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Kalau kita menyorot konsepsi **Nonet** dan **Selznick** bahwa "Perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan Negara.

Dalam hal penegakan hukum, yang paling pokok disamping yang lain adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat, pemasyarakatan sehingga sistem komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama, dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum (*law socialization and law education*) sehingga dengan pendidikan hukum tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam ber hukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum. Philipe Nonet dan Philip Selznick dalam pandangannya sangat fokus terhadap pengayaan dalam ilmu hukum terutama dalam menganalisis institusi-institusi hukum. Bangkitnya ilmu sosial berkontribusi dalam ranah ilmu hukum terutama ilmu politik sangat signifikan terhadap perubahan dan perkembangan di dunia hukum. Nonet dan Selznick menyatakan: Politik pada saat itu menempatkan keadilan pada urutan teratas dalam agenda kepentingan publik. Hak-hak sipil, kemiskinan, kejahatan, protes massal, kerusuhan kaum urban, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan, semua itu, tidak seperti masa-masa sebelumnya, dipandang sebagai masalah sosial yang sangat urgen untuk dipecahkan, perubahan hukum akan datang melalui proses politik, bukan dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang ada pada agen-agen hukum yang merespons tuntutan-tuntutan yang bersifat partisan.²⁵¹

Menurut **Soerjono Soekanto**, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:²⁵²

-
- 251 **Philipe Nonet dan Philip Selznick**, *Law and Society in Transition: Toward respons Law*, 1978, Hlm: 2-7. Lihat pula dalam: **Philipe Nonet dan Philip Selznick**, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Ford Foundation (HUMA): Jakarta, 2003.
- 252 **Soerjono Soekanto**, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998, Hlm: 83-84.

1. Hukum dan peraturan itu sendiri; Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum; Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Menurut **Lawrence Meir Friedman** (1975,1998) terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).²⁵³ Kendala penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan dalam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita-cita dalam UUD 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 telah menggariskan dasar bagi terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Substansi Hukum (*legal substance*).

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

²⁵³ **Achmad Ali**, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Cetakan Kedua, 2005, Hlm: 1.

keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).²⁵⁴ Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.²⁵⁵

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Seringkali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak *responsif* terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Peraturan perundang-undangan dibuat oleh kekuasaan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Menurut UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang diberikan kepada DPR sebagai *legislatif* dan Presiden sebagai *Eksekutif*. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat mempe-

254 Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Hlm: 2-4.

255 Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2008, Hlm: . 72.

gang kekuasaan membentuk undang-undang".²⁵⁶ Rancangan undang-undang tersebut dibahas secara bersama-sama antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan secara bersama.

DPR sebagai lembaga *legislatif* yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Untuk saat ini, hampir sebahagian besar produk perundang-undangan yang dihasilkan lembaga DPR masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dan cenderung dipaksakan serta tidak responsif.

Bahkan dalam UU kesehatan yang baru dikeluarkan salah satu contoh, ayat yang mengatur tentang tembakau tidak tercantum. Tidak diaturnya (hilangnya) ayat tentang tembakau dalam UU Kesehatan mencerminkan bahwa kualitas dari anggota DPR patut diragukan.

Menurut **Satjipto Rahardjo** yang mengutip dari **Radbruch**, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum.²⁵⁷ Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini dimasyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

256 Amandemen pertama UUD 1945.

257 **Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, Cetakan kelima, 2000, Hlm: 19.

2. Struktur Hukum.

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan.²⁵⁸ Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam beradaan hukum. Struktur hukum disini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Termasuk dalam struktur hukum yakni hirarki peradilan umum di Indonesia dan unsur struktur yang meliputi jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya, jumlah hakim agung dan hakim lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Sudah terlalu sering kita mendengar bahkan melihat diberbagai pemberitaan media massa, adanya oknum aparat penegak hukum yang melakukan penyelewengan terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ketika penegak hukum memiliki kepentingan terhadap suatu perkara maka sejak saat itulah hukum dikesampingkan. Sungguh ironis, disaat masyarakat menghendaki terciptanya keadilan tercoreng oleh perbuatan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum.

Kebebasan peradilan adalah merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya prinsip-prinsip daripada

258 Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Op Cit: 4-6.

suatu negara hukum sebagian besar adalah tergantung dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan didalam negara tersebut.²⁵⁹ Sebagai sarana parameter penerapan demokrasi, kebebasan badan peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus dijamin oleh konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum dalam arti konkret akan tetapi juga sebagai tempat melahirkan asas dan kaedah hukum baru serta teori-teori baru mengenai hukum.²⁶⁰ Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Fungsi kontrol dari Mahkamah Agung mempunyai arti penting bagi usaha penegakkan hukum di Indonesia karena dengan efektifnya fungsi kontrol maka usaha penegakkan hukum menjadi lebih terjamin. Patut disayangkan sekalipun fungsi ini tetap berjalan namun tidak begitu efektif, bahkan sekarang banyak bermunculan makelar kasus yang berkeliaran di lingkungan Mahkamah Agung. Bagaimana akan melakukan fungsi kontrol terhadap pengadilan lain jika dari dalam sendiri tidak mampu melakukan kontrol atau pengawasan.

Sebagai contoh adalah lemahnya pengawasan Mahkamah Agung dalam bidang administrasi putusan kasasi yang berakibat munculnya putusan palsu (kasasi palsu). Sistem MA yang tertutup dan publik tidak memiliki akses mengikuti sampai tuntas sebagai salah satu faktor penyebabnya. Sehingga perlu adanya pembaharuan di MA yang meliputi Hakim Agung dan tata kerja sistem kendali administrasi atau pembaharuan yang menyeluruh. Dengan kekuasaan dan fasilitas yang

²⁵⁹ Abdurrahman, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, 1980, Hlm: . 1.

²⁶⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH. UI Press, Yogyakarta, 2004, Hlm: . 116.

semakin besar disatu pihak dan tidak ada pengawasan eksternal dipihak lain, dapat menjadikan MA lebih menyeramkan dari keadaan sekarang.²⁶¹

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi; petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:²⁶²

1. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
4. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

261 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Hlm: 117.

262 Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, Hlm: 95.

3. Budaya Hukum.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²⁶³

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.²⁶⁴

Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.²⁶⁵

Peristiwa penyelesaian sengketa diluar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta

263 Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Op Cit, Hlm: 2.

264 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2009, Hlm: 83.

265 Amandemen kedua UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad**, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Seribu: Jakarta, 1997.
- Abdurrahman**, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni: Bandung, 1980.
- Abbas Hamami M.**, *Filsafat (Suatu Pengantar Logika Formal – Filsafat Pengetahuan)*, Yogyakarta, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM, 1976, (Diktat).
- Achmad Ali**, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Cetakan Kedua, 2005,
- Achmad Charris Zubair**, *Kuliah Etika*, Rajawali Pers: Jakarta, 1987,
- Achmad Charris Zubair**, *Dimensi Etik dan Asketik ilmu Pengetahuan Manusia : Kajian Filsafat Ilmu*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI): Yogyakarta, 2002.
- Adami Chazawi**, *Ma'praktik Kedokteran: Tinjauan Norma & Doktrin Hukum*, Bayu Media: Jawa Timur, 2007.
- Afan Gaffar**, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm: 52.
- Anis Bawedan**, *Penegak Hukum Simbol Lemahnya Hukum di Indonesia*, Oke zone News, Rabu 23 Mei 2013

- Arfani, Riza Noer**, *Kinerja Tata Pemerintahan di Sumatra Barat: Mengembalikan Nagari ke Pangkuan?*, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI): Hamburg, 2008,
- Agung Kurniawan**, *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan:* Yogyakarta, 2005
- Agus Dwiyanto**, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2006,
- Ahmad Tafsir**, *Filsafat Umum Akal dan Hati sejak Thales Sampai Capra*, Rosda Karya: Bandung, 2009.
- Ali Mufiz**, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka Depdiknas: Jakarta, 2004.
- Alvin Toffler**, *Future Shock: Kejutana Masa Depan*, PT. Panjja Simpati: Jakarta, 1990.
- Ahmad Daudy**, *Kuliah Filsafat Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1986,
- Amsal Bakhtiar**, *Filsafat Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- A Mangunhardjana**, *Isme-isme Dari A Sampai Z*, Kanisius: Yogyakarta, 1997.
- Anton Bakker**, *Ontologi Metafisika Umum*. Pustaka Kanisius: Yogyakarta, 1992.
- Aristoteles**, *The Nicomachean Ethics*, Copyright, Oxford University Press, 1998.
- A S. Horby**, *Oxford Advanced Learne'r Dictionary*, Oxford University: London, 1995.
- Asmoro Achmadi**, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Atang Abdul Hakim**, *Filsafat umum*, Pustaka Setia: Bandung, 2008,
- Bagus Lorens**, *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bagir Manan**, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH. UI Press, Yogyakarta, 2004.
- Bertrand Russel**, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. **Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro, Imam**

- Muttaqien, Imam Baihaqi, Muhammad Shodiq (Penj.),** *Sejarah Filsafat Barat: Kaitanya dengan Kondisi Sosio-politik zaman kuno hingga sekarang.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.
- Bintoro Tjokroamidjojo,** *Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1995.*
- Bryan S. Turner,** *Menggugat Sosiologi Sekuler: Atudi Analisis Atas Sosiologi Weber,* Suluh Press: Yogyakarta, 2005.
- Budiono Kusumohamidjojo,** *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil,* Grasindo: Jakarta, 2004
- Burhanudin Salam,** *Logika Materiil: Filsafat Ilmu Pengetahuan,* Rineka Cipta: Jakarta, 1997.
- Carol Taylor, Carol Lillies, Priscilla Le Mone,** *Fundamental Of Nursing Care,* Third Edition, by Lippicot Philadelphia, New York, 1997.
- Daryanto,** *Admnistrasi Pendidikan,* Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Daryl Koehn.** *Landasan Etika Profesi.* Pustaka Filsafat, Kanisius: Yogyakarta, 2000.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta,** *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,** *Buku IA Filsafat Ilmu,* Jakarta, 1984-1985.
- Emanuel Kant,** *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals,* Translated by Thomas K. Abbott with an introduction by Marvin Fox, New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1949, p. 57.
- E.Sumaryono,** *Etika Hukum; Norma-Norma Bagi Penegakan Hukum,* Kanisius: Jakarta, 2002.
- E. Sumaryono,** *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,* Kanisius: Yogyakarta, 2002.
- Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo** (Editor), *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer,* Gava Media: Yogyakarta, 2005.

- Ethel M Albert**, *Great Tradition in Ethics*, Van Nostrand Reinbold Company: New York-Toronto-London-Melbourne, 1969.
- E. Y. Kanter**, *Etika Profesi Hukum*, Stora Grafika: Jakarta, 2001
- Sunoto**, *Bunga Rampai Filsafat*, Yayasan Pembinaan Fak. Filsafat UGM: Yogyakarta, 1982.
- Franz Magnis Suseno**, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK GRamedia: Jakarta, 1991.
- Franz Magnis Suseno**, *Etika Dasar*, Kanisius: Yogyakarta, 1987.
- Franz Magnis Suseno**, *13 Tokoh Etika*, Kanisius: Yogyakarta, 1997.
- Friedrich Carl Joachim**, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Raisul Muttaqien (penj). *filsafat Hukum: Perspektif Sejarah*, Nuansa dan Nusamedia: Bandung, 2004.
- Frederick Copleston**, *A History Of Philosophy Volume 2; Albert The Great to Duns Scotus*, Maryland, United States : The Newman Press, 1950,
- Fung Yu-Lan**, *Short History of Chinese Philosophy*, The Macmillan Company: New York, 1960.
- Gordon Scott**, *The history and philosophy of social science*. New York: Routledge, 1991.
- Hamersma Harry**, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1981.
- Harun Hadiwijono**, *Sejarah Filsafat Barat (1 & 2)*, Kanisius: Yogyakarta, 1980.
- H. De Vos**, *Pengantar Etika*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 1987
- I Gede A.B.Wiranata**, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari**, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Immanuel Kant**, *Critique of Practical Reason*, the Liberal Arts Press: New York, 1956.

- Iskandar, Dalmy**, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika: Jakarta, 1999.
- I Wayan Badrika**, *Sejarah Nasional dan Umum untuk Kelas 3 SMA*, Erlangga: Jakarta, 2000,
- Jujun S Suriasumantri**, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan: Jakarta, 2007.
- Juhaya S Praja**, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2013
- J Sudarminta**, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius: Yogyakarta, 2002.
- K. Bertens**, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994,
- K. Bertens**, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius: Yogyakarta, 1999.
- K. Bertens**, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta, 1975,
- King Joseph H**, *The Law of Medical Malpractice in a Nutshell*. West Publishing Co. Stimuli. Paul, Minn, 1986
- Koeswadji, Hermien Hadiati**, *Hukum dan Masalah Medik*. Erlangga University Press, Surabaya, 1984; lihat juga dalam; **Komalawati**,
- Leenen, H.J.J. dan Lamintang, PA F**, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta: Bandung, 1991.
- Lasiyo dan Yuwono**, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Liberty: Yogyakarta, 1985.
- Liliana Tedjosaputro**, *Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum*, Aneka ilmu: Semarang, 2003.
- Lijan Poltak Sinambela**, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara: Jakarta, 2006,
- Louis O. Kattsoff**, *Pengantar Filsafat*, Sinar Harapan: Jakarta, 19980
- Mujtaba Mishbah**, *Daur Ulang Jiwa*, Al-Huda: Jakarta, Cet.1, 2008
- Mustafa**, *Akhlaq Tasawuf*, Pustaka Setia: Bandung, 1997,
- Mustopadidjaja, AR**, 'Format Birokrasi NKRI bagi Percepatan Pemulihan dan Pembangunan Nasional,' Indonesian Bureau-cracy & Service Watch (IBSW): Jakarta, 17 April 2002.

- M. T. Misbah Yazdi**, *Meniru Tuhan*, Al-Huda: Jakarta, Cet. 1, 2006.
- Mohammad Hatta**, *Alam Pikiran Yunani*, Tintamas: Jakarta, 1986.
- Modul Diklat**, *Tata Pemerintahan yang Baik*, Depdagri dan LAN Tahun 2007-2008.
- M.M.Syarif**, *Para Filosof Muslim*, Mizan: Bandung, 1993.
- Miftah Thoha**, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Pers: Jakarta, 2005.
- Miftah Thoha**, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004,
- Miriam Budiardjo**, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta, 2005.
- Partini dan Bambang Wicaksono**, *"Citizens' Charters: Terobosan Baru Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia"*. Makalah yang dipresentasikan pada Diskusi Bulanan PSKK UGM, 2004.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick**, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Ford Foundation (HUMA): Jakarta, 2003.
- Pradana Boy ZTF**, *Filsafat Islam : Sejarah Aliran dan Tokoh*, UMM Press: Malang, 2003.
- Poedjawijatna**, *Tahu dan Pengetahuan: Pengantar Ke Ilmu dan Filsafat*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004,.
- Poedjawijatna**, *Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat*, Rineka Cipta: Jakarta, 1997.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati**, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2009.
- Pinto dalam Sadjijono**, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta: Yogyakarta, Cetakan kedua, 2005.
- Rizal Mustansyir dan Misnal munir**, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001.
- Rowa, Hyronimus**, *'Dimensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Dari Aspek*

Peraturan Kepegawaian' Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, No. 3, Vol. 32, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, Cetakan kelima, 2000.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta: Yogyakarta, Cetakan kedua, 2005.

Samodra Wibawa, *Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara / Publik*, Gava Media: Yogyakarta, 2005,

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2006,

Shirley R. Jones, *Ethics In Midwifery*, by Mosby – Year Book Europe Ltd, 1994.

Sholeh, Badrus et.al, *Balai Mediasi Desa Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, Suhardi Suryadi (editor), LP3ES: Jakarta, 2007,

Sirajudin zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.

Supriat, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006

Sudarsono, *Filsafat Islam*, Rineka Cipta: Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1998

Speake, Jennifer, *A Dictionary of Philosophy*. London: Pan Books Ltd. 1968,

St. Sunardi, *Nietzsche*, LkiS: Yogyakarta, 2011

Sthepen P. Robbins, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Diterjemahan oleh Yusuf Udaya, Arcan: Jakarta, 1994.

Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*, ANDI: Yogyakarta, 2006,

Tjahjadi, Simon Petrus L, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Kanisius: Yogyakarta, 2004.

Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005,

Waitzkin, Howard B & Waterman Barbara, *Sosiologi Kesehatan*. Prima Aksara: Jakarta, 1993.

Wallace Walter L, *The Logic of Science in Sociology*. New York: Aldine Publishing Company, 1971.

Wedberg Anders, *A History of Philosophy*. Oxford: Clarendon Press. Volume 1 & 2, 1982.

Woodrow Wilson, *The Study of Administration* yang dimuat pertama kali oleh *The Journal Political Science Quarterly* pada tahun 1887

Van Melsen, A.G.M., *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, PT Gramedia, Jakarta, 1985, Terjemahan **K. Bertens**, Judul asli "*Wetenschap en Verantwoordelijkheid*".

Wahyudi Kumorotomo, "*Perkembangan Demokrasi dan Pengaruhnya terhadap Birokrasi Publik*", *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Editor: Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo. Gava Media: Yogyakarta, 2005B

Woodrow Wilson, *The Study of Administration* yang dimuat pertama kali oleh *The Journal Political Science Quarterly* pada tahun 1887.

Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006

Tentang Penulis

H. Muhamad Rakhmat adalah seorang birokrat pemerintahan dan juga dosen. Beliau menyelesaikan studi program doktornya di UNISBA dalam waktu 1.5 Tahun. Disertasinya berhasil dibukukan dengan judul: *Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Memberantas Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal*. Buku ini adalah buku kedua beliau, yang ditulis di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang birokrat dan juga dosen.

Lelaki (55 Tahun) ini, dilahirkan di Desa Banjaran Kabupaten Bandung, pada 19 Nopember 1958. Beliau menamatkan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1971, kemudian beliau memilih untuk bersekolah pada SPG Pasundan-Bandung, yang berhasil lulus pada tahun 1977. Kemudian setelah beliau menjadi seorang Guru Sekolah Dasar di Desa Banjaran, pada tahun 1986 melanjutkan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Unpas-Bandung. Setelah berhasil mencapai Gelar Sarjana Hukum, akhirnya hijrah ke Indramayu untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak tahun 1987-sekarang, kiprah beliau diabdikan untuk negara, dari mulai menjadi Staf Kantor Kecamatan Banggodua Kabupaten Indramayu (1987); Kepala Urusan Administrasi Kecamatan Banggodua (1988); Kepala Sub bagian data dan informasi bagian humas Pemda Indramayu (1990); Kepala sub bagian peraturan perundang-undangan bagian hukum pemda indramayu (1994); Wakil kepala dinas pendapatan Kabupaten Indramayu (1997); Kepala bagian

hukum Pemda Indramayu (2000) Camat Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu (2002); Kepala Bagian Hukum Pemda Indramayu (2004); Sekertaris DPRD Kabupaten Indramayu (2006); Kepala Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Indramayu (2009); Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu (2011); Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indramayu- Sekarang. Saat ini beliau sedang menyiapkan naskah buku yang akan segera terbit, yaitu; *Memahami Etika Profesi Hukum; Dasar-Dasar Etika Bagi Penegak Hukum; Logika Hukum- Sebuah Pengantar; Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukumnya; serta Hukum Administrasi Negara.*

Buku ini membicarakan lebih dalam mengenai etika terapan (*applied ethic*). Sebagian besar materi yang dibahas dalam buku ini merupakan bahan-bahan pembahasan dari etika terapan (khususnya dalam setiap bidang profesi kehidupan sehari-hari). Istilah "etika terapan" kedengarannya masih baru, tapi isinya bukanlah sesuatu baru sama sekali dalam sejarah filsafat moral. Sudah sejak zaman Plato dan Aristoteles terdapat penekanan yang jelas bahwa etika merupakan filsafat praktis yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia, dengan memperlihatkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.

Etika terapan dapat membantu untuk mengangkat pertimbangan dan keputusan moral dari taraf subyektif serta emosional ke taraf obyektif dan rasional. Suatu pandangan disebut objektif apabila dalam penalarannya lepas dari faktor-faktor yang hanya penting untuk beberapa orang; tidak memihak atau memenangkan kepentingan pihak tertentu; tidak berprasangka atau bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

Menyelami kedalaman relung-relung materi etika begitu penting, karena kita adalah entitas dari kehidupan yang harus menjunjung nilai-nilai etik. Selamat membaca!

Etika Profesi

Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif



Penulis lahir di Banjaran Kabupaten Bandung tahun 1958. Penulis adalah seorang birokrat sekaligus dosen yang meniti karir dari seorang Guru Sekolah Dasar di Desa Banjaran, pada tahun 1986. Setelah menamatkan Sarjana Hukum penulis memulai tugas PNS di Kabupaten Indramayu. Berbagai jabatan telah penulis emban dan kini penulis menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indramayu.

Buku ini merupakan karyanya yang kedua yang dipublikasi secara luas. Di samping itu, penulis sedang menyiapkan karya-karya berikutnya, antara lain: *Memahami Etika Profesi Hukum, Dasar-Dasar Etika Bagi Penegak Hukum*, dan beberapa topik lainnya yang menarik.

ISBN 978-602-9272-07-9



9 786029 272079